



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020 T.A 2021



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH.....	1
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	2
 BAB II VISI DAN MISI DAERAH	 30
A. VISI.....	30
B. MISI	32
 BAB III URUSAN KONKUREN,FUNGSI PENUNJANG	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	
URUSAN PEMERINTAHAN.....	67
A. URUSAN KONKUREN	67
B. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	258
C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	324
 BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
PEMERINTAH TAHUN 2019	328
 BAB V TUGAS PEMBANTUAN...	 354
 BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	 367
 BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL (SPM).....	435
 BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH...	 453
 BAB IX PENUTUP.....	 542



BAB I

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada Tanggal 1 Juli 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Standar Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1);



7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 645);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120.04/6976/OTDA Tanggal 31 Desember Tahun 2019 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah; Batas Administrasi Daerah; Luas Wilayah; dan Topografi.

a. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0°29' Lintang Selatan (LS) - 04°40' Lintang Utara (LU) serta antara 103°22' sampai dengan 109°04' Bujur Timur. Adapun rincian letak geografis Provinsi Kepulauan Riau menurut wilayah administrasi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
LETAK GEOGRAFIS KEPULAUAN RIAU
MENURUT KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten/ Kota	Letak Geografis	
		Lintang Utara	Bujur Timur
1.	Karimun	1°01'58.93"LU	103°22'32.84"BT
2.	Bintan	1°05'03.94"LU	104°28'56.23"BT
3.	Lingga	0°12'36.24"LS	104°36'18.79"BT
4.	Natuna	3°56'28.62"LU	108°22'38.53"BT
5.	Batam	1°07'40.01"LU	104°03'18.84"BT
6.	Tanjungpinang	0°57'56.48"LU	104°26'27.62"BT
7.	Kep. Anambas	3°12'54.00"LU	106°13'04.80"BT
Kepulauan Riau		0°29'LS - 04°40'LU	103°22'BT-109°04'BT

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau



Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau yang seluruhnya telah diberi nama, dan telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh pulau. Dari hasil verifikasi tersebut diperoleh 1.800 pulau yang lolos dan dapat dikategorikan sebagai pulau sesuai definisi UNCLOS, kemudian telah didaftarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke Badan Dunia PBB untuk didebit sebagai pulau milik Republik Indonesia. Adapun rincian pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau di wilayah administrasi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PULAU-PULAU
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau
1	2	3
1	2	3
1.	Kota Batam	372
2.	Kota Tanjungpinang	9
3.	Kabupaten Bintan	241
4.	Kabupaten Karimun	249
5.	Kabupaten Lingga	537
6.	Kabupaten Natuna	154
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	238
Jumlah		1.800

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau hasil verifikasi ulang Pulau Kepulauan Riau Tahun 2019.

Selain Pulau diatas Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki 22 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sebagian besar dari pulau tersebut merupakan pulau batu karang yang tidak berpenduduk. Adapun rincian pulau-pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
PULAU-PULAU TERLUAR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

No	Kabupaten/ Kota	Pulau Terluar		
		Nama Pulau	Jmlh	Berbatasan dengan Negara



1.	Karimun	Karimun Kecil Iyu Kecil	2	Malaysia dan Singapura
2.	Bintan	Sentut Bintan Wangkang Malang Berdaun	4	Malaysia dan Singapura
3.	Batam	Nipah Pelampong Batu Berhenti Nongsa	4	Singapura
4.	Kep. Anambas	Damar Tokong Berlayar Tokong Nanas Mangkai Tokong Malang Biru	5	
5.	Natuna	Kepala Subi Kecil Senua Sekatung Sebetul Semion Tokong Boro	7	Vietnam dan Malaysia
Jumlah			22	

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

b. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan beberapa provinsi lainnya yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan negara Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Provinsi Riau;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

c. Luas Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas 251.810,71 KM², sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu seluas 241.215,30 KM² (95,79%) sedangkan daratannya hanya seluas 10.595,41 KM² atau sebesar (4,21%) dari luas keseluruhan daratan dan lautan. Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 5 Kabupaten dan 2



Kota yang selanjutnya dibagi dalam kecamatan, kelurahan dan desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
LUAS DAERAH DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU MENURUT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	LUAS DARAT (KM ²)	KEC.	DESA	KEL.
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Bintan	1.739,44	10	36	15
2.	Kab.Karimun	1.524,00	12	42	29
3.	Kab.Lingga	2.117,72	10	75	7
4.	Kab.Natuna	2.814,26	15	70	6
5.	Kab.Kep.Anambas	590,14	7	52	2
6.	Kota Batam	1.570,35	12	-	64
7.	Kota Tg.pinang	239,50	4	-	18
TOTAL		10.595,41	70	275	141

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dipandang dari luas wilayahnya, maka Kabupaten Lingga memiliki luas daratan terbesar yaitu 26,72% dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau diikuti Kabupaten Natuna yang memiliki 24,13% daratan, Kabupaten Bintan seluas 16,17% daratan, Kota Batam 12,24% daratan, dan Kabupaten Karimun seluas 11,1 % daratan, yang paling kecil luas wilayah daratannya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas Tanjungpinang seluas 7,72% daratan, serta Kota Tanjungpinang seluas 1,86% daratan.

d. Topografi

Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan *pratersier* yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka Belitung. Pada gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian



pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2–5 meter dari permukaan laut. Selain digambarkan dengan bentangan pulau-pulau, relief dan topografi Kepulauan Riau juga digambarkan dengan membentangnya pegunungan yang terdapat di beberapa pulau. Gunung tertinggi yaitu Gunung Daik berada di Kabupaten Lingga dengan ketinggian mencapai 1.272 meter. Selain Gunung Daik, Kabupaten Lingga juga memiliki empat gunung lain yang tingginya berkisar antara 343 meter sampai dengan 800 meter. Kabupaten Natuna merupakan kabupaten lain yang memiliki beberapa gunung dengan Gunung Ranai sebagai gunung tertinggi dengan ketinggian 959 meter. Sedangkan di Kabupaten Karimun terdapat Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter, dan di Kabupaten Bintan mempunyai Gunung Bintan dengan ketinggian 380 meter.

2. Gambaran Umum Demografis : Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Struktur Usia, Jenis Pekerjaan, dan Pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Manusia untuk selanjutnya dapat disebut sebagai penduduk yang dapat dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, usia produktif dan non produktif, serta usia lanjut). Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, dan produktivitas. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk karena merespons pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019 dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tercatat berjumlah 1.970.437 jiwa. Jumlah Penduduk yang terbesar berada di Kota Batam yaitu 1.112.583 jiwa dan jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 46.841 jiwa sebagaimana terlihat dalam tabel 1.5 berikut :



Tabel 1.5
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019

No	Kabupaten/ Kota	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	2	3	4	6
1.	Kabupaten Bintan	80.429	76.174	156.603
2.	Kabupaten Karimun	128,344	122.167	250.511
3.	Kabupaten Natuna	41.910	40.042	81.952
4.	Kabupaten Lingga	52.125	49.010	101.135
5.	Kab. Kep. Anambas	23.979	22.862	46.841
6.	Kota Batam	566.502	546.081	1.112.583
7.	Kota Tanjungpinang	111.211	109.601	220.812
Jumlah		1.004.500	965.937	1.970.437

Sumber : Dinas Kepend

Tabel 1.6
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT STRUKTUR UMUR LAKI-LAKI TAHUN 2019

No	Kabupaten/ Kota	0-14 Thn	15-29 Thn	30-44 Thn	45-59 Thn	60-75 Thn
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	19772	18576	20827	14906	6402
2.	Kabupaten Karimun	30041	30466	31283	23395	13159
3.	Kabupaten Natuna	10855	10582	9989	6829	3655
4.	Kabupaten Lingga	11934	12508	12749	9165	5760
5.	Kab. Kep. Anambas	6148	5897	5920	4051	1963
6.	Kota Batam	154218	127583	172161	91998	20482
7.	Kota Tanjungpinang	27657	26722	26823	20193	9816
Jumlah		260625	232334	279752	170537	61237

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Hasil Konsolidasi 31 Desember 2019)

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Struktur Umur
jenis kelamin Laki-laki per Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019 berjumlah



1.004.500 Jiwa. Adapun Untuk Jenis Kelamin perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.7
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT STRUKTUR UMUR PEREMPUAN TAHUN 2019

Sums

No	Kabupaten/ Kota	0-14 Thn	15-29 Thn	30-44 Thn	45-59 Thn	60-75 Thn
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	18454	17808	21382	12487	6043
2.	Kabupaten Karimun	27553	28960	31260	21204	13190
3.	Kabupaten Natuna	10413	10078	11814	6166	3586
4.	Kabupaten Lingga	10907	11836	11814	8374	6091
5.	Kab. Kep. Anambas	5897	5850	5586	3532	2015
6.	Kota Batam	143163	126532	180890	77353	18143
7.	Kota Tanjungpinang	25778	25806	28278	19703	10036
Jumlah		242165	226870	291024	148819	59104

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Hasil Konsolidasi 31 Desember 2019)*

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Struktur Umur jenis kelamin Perempuan per Kab/Kota Tahun 2019 adalah sebanyak 965.937 jiwa. Untuk jenis penduduk menurut jenis Pekerjaan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENURUT JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019

No	Kabupaten Kota	WIRA SWASTA	KARYAWAN SWASTA	BURUH HARIAN LEPAS	NELAYAN PERIKANAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	4,575	18,415	8,654	6,357	1,982
2.	Kabupaten Karimun	12,607	11,081	21,547	9,469	4,531
3.	Kabupaten Natuna	4,802	2,177	823	4,867	2,999
4.	Kabupaten Lingga	5,314	2,902	5,277	8,689	2,336
5.	Kab. Kep. Anambas	1,962	1,328	590	3,846	1,365
6.	Kota Tanjungpinang	10,666	32,864	10,269	1,753	8,079



7.	Kota Batam	323,527	106,436	4,794	9,275	9,159
Jumlah		363.453	175.203	51.954	44.256	30.451

No	Kabupaten Kota	PETANI PEKEBUN	KARYAWAN HONORER	GURU	BURUH NELAYAN PERIKANAN	PEDAGANG
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	2,595	1077	795	679	706
2.	Kabupaten Karimun	7,936	2719	1535	1136	868
3.	Kabupaten Natuna	4,580	2109	390	217	271
4.	Kabupaten Lingga	1,665	1257	597	2478	267
5.	Kab. Kep. Anambas	2,024	1540	311	247	44
6.	Kota Tanjungpinang	405	2460	1420	154	1474
7.	Kota Batam	1,010	1474	5516	424	811
Jumlah		20.215	12.636	10.564	5.335	4.441

No	Kabupaten Kota	TNI	PEMBANTU RUMAH TANGGA	INDUSTRI	TRANSPORTASI	TUKANG BATU
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	431	75	16	117	51
2.	Kabupaten Karimun	261	223	9	43	15
3.	Kabupaten Natuna	297	41	7	10	47
4.	Kabupaten Lingga	66	178	4	29	6
5.	Kab. Kep. Anambas	65	28	6	8	12
6.	Kota Tanjungpinang	1129	153	8	186	62
7.	Kota Batam	884	171	314	270	208
Jumlah		3.133	869	364	663	401

No	Kabupaten Kota	BURUH TANI PERKEBUNAN	PERDAGANGAN	PELAUT	BUMN	SUPIR
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	780	159	303	255	552
2.	Kabupaten Karimun	1670	247	903	965	451
3.	Kabupaten	472	185	30	60	60



	Natuna					
4.	Kabupaten Lingga	416	165	177	54	59
5.	Kab. Kep. Anambas	256	91	29	13	3
6.	Kota Tanjungpinang	242	226	1041	747	596
7.	Kota Batam	263	978	790	1587	854
Jumlah		4.099	2.051	3.273	3.681	2.575

No	Kabupaten Kota	MEKANIK	PERAWAT	TUKANG KAYU	TUKANG JAHIT	TUKANG LAS PANDAI BESI
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	143	119	81	61	25
2.	Kabupaten Karimun	139	161	63	63	36
3.	Kabupaten Natuna	33	125	144	48	14
4.	Kabupaten Lingga	32	59	69	38	12
5.	Kab. Kep. Anambas	8	5	104	12	7
6.	Kota Tanjungpinang	225	207	54	126	59
7.	Kota Batam	220	786	80	173	163
Jumlah		800	1.512	595	521	316

No	Kabupaten Kota	DOKTER	PERANGKAT DESA	KONSTRUKSI	PENDETA	BIDAN
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	54	176	19	28	99
2.	Kabupaten Karimun	73	169	37	32	171
3.	Kabupaten Natuna	19	181	5	8	101
4.	Kabupaten Lingga	18	96	11	9	44
5.	Kab. Kep. Anambas	13	92	3	1	37
6.	Kota Tanjungpinang	176	0	24	53	123
7.	Kota Batam	564	9	180	340	577
Jumlah		917	723	279	471	1.152



No	Kabupaten Kota	JURU MASAK	IMAM MESJID	USTADZ MUBALIGH	TUKANG CUKUR	KONSULTAN
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	8	11	15	19	4
2.	Kabupaten Karimun	4	19	22	19	4
3.	Kabupaten Natuna	3	18	8	6	18
1	2	3	4	6	7	8
4.	Kabupaten Lingga	2	10	3	3	2
5.	Kab. Kep. Anambas	2	8	1	4	2
6.	Kota Tanjungpinang	14	9	13	24	39
7.	Kota Batam	42	103	64	37	46
Jumlah		75	178	126	112	115

No	Kabupaten Kota	BUMD	PETERNAK	WARTAWAN	DOSEN	TUKANG LISTRIK
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	74	23	15	16	6
2.	Kabupaten Karimun	102	20	50	23	6
3.	Kabupaten Natuna	39	26	22	14	6
4.	Kabupaten Lingga	21	9	9	8	6
5.	Kab. Kep. Anambas	5	13	5	0	6
6.	Kota Tanjungpinang	174	12	89	174	17
7.	Kota Batam	57	29	126	409	76
Jumlah		472	132	316	644	121

No	Kabupaten Kota	SENIMAN	APOTEKER	PENATA RIAS	BIARAWATI	ARSITEK
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	4	13	11	3	2
2.	Kabupaten Karimun	2	6	14	3	5
3.	Kabupaten Natuna	1	2	2	0	2



No	Kabupaten Kota	KEPALA DESA	PENATA RAMBUT	BURUH PETERNAKAN	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PENGACARA
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	22	6	28	18	4
2.	Kabupaten Karimun	34	22	26	29	8
3.	Kabupaten Natuna	48	3	8	3	2
4.	Kabupaten Lingga	24	7	9	12	0
5.	Kab. Kep. Anambas	16	0	3	12	0
6.	Kota Tanjungpinang	0	11	7	24	38
7.	Kota Batam	7	26	23	26	64
Jumlah		151	75	104	124	116
4.	Kabupaten Lingga	3	1	9	1	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	2	2	0	2
6.	Kota Tanjungpinang	13	12	10	3	5
7.	Kota Batam	35	49	20	45	50
Jumlah		58	85	68	55	66

No	Kabupaten Kota	TUKANG SOL SEPATU	NOTARIS	AKUNTAN	TABIB	PENELITI
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	6	11	1	8	5
2.	Kabupaten Karimun	3	7	2	1	3
3.	Kabupaten Natuna	1	3	0	3	0
4.	Kabupaten Lingga	1	1	1	2	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	0	0	0	0
6.	Kota Tanjungpinang	6	20	8	6	1
7.	Kota Batam	15	46	25	7	17



Jumlah		32	88	37	27	26
No	Kabupaten Kota	PARA NORMAL	PIALANG	PARAJI	PENYIAR TELEVISI	PENTERJEMAH
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	1	1	0	1	0
2.	Kabupaten Karimun	2	0	2	0	2
3.	Kabupaten Natuna	0	0	1	0	0
4.	Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	1	0	0	0
1	2	3	4	6	7	8
6.	Kota Tanjungpinang	4	2	1	0	2
7.	Kota Batam	2	8	3	3	4
Jumlah		9	12	7	5	8

No	Kabupaten Kota	PAS TOR	ANGGOTA DPRD PROVINSI	PENYIAR RADIO	TUKANG GIGI	PENATA BUSANA
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	3	2	0	5	0
2.	Kabupaten Karimun	2	5	2	6	2
3.	Kabupaten Natuna	0	0	1	4	1
4.	Kabupaten Lingga	1	0	0	0	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	1	0	1	0
6.	Kota Tanjungpinang	5	8	3	2	4
7.	Kota Batam	21	17	10	5	13
Jumlah		32	33	16	23	20

No	Kabupaten Kota	PSIKIATER PSIKOLOG	PERANCANG BUSANA	PILOT	BUPATI	WAKIL BUPATI
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	0	1	0	1	0
2.	Kabupaten Karimun	1	0	0	1	1
3.	Kabupaten Natuna	1	0	0	1	1



4.	Kabupaten Lingga	0	0	0	1	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	0	0	1	1
6.	Kota Tanjungpinang	1	2	0	0	1
7.	Kota Batam	5	3	3	0	0
Jumlah		8	6	3	5	4

No	Kabupaten Kota	ANGGOTA DPD	ANGGOTA DPR RI	PROMOTOR ACARA	ANGGOTA BPK	WAKIL WALIKOTA
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	0	0	0	0	0
2.	Kabupaten Karimun	0	0	1	1	0
3.	Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0
4.	Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	0	0	0	0
6.	Kota Tanjungpinang	0	0	0	0	1
7.	Kota Batam	2	0	3	1	1
Jumlah		5	0	4	2	2

No	Kabupaten Kota	WALI KOTA	GOVERNUR	WAKIL GOVERNUR	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI
1	2	3	4	6	7	8
1.	Kabupaten Bintan	0	0	0	0	0
2.	Kabupaten Karimun	0	0	0	0	0
3.	Kabupaten Natuna	0	0	0	0	0
4.	Kabupaten Lingga	0	0	0	0	0
5.	Kab. Kep. Anambas	0	0	0	0	0
6.	Kota Tanjungpinang	1	1	0	0	0



7.	Kota Batam	1	0	0	0	0
Jumlah		2	1	0	0	0

No	Kabupaten Kota	DUTA BESAR	PRESIDEN	WAKIL PRESIDEN	KEPOLISIAN RI
1	2	3	4	6	7
1.	Kabupaten Bintan	0	0	0	235
2.	Kabupaten Karimun	0	0	0	494
3.	Kabupaten Natuna	0	0	0	125
4.	Kabupaten Lingga	0	0	0	128
5.	Kab. Kep. Anambas	0	0	0	42
6.	Kota Tanjungpinang	0	0	0	615
7.	Kota Batam	5	0	0	1.657
Jumlah		5	0	0	3.296

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Hasil Konsolidasi 31 Desember 2019)

Penyebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota terbesar di 3 (tiga) Kabupaten/ Kota besar yaitu Kota Batam sebanyak 1.112.583 jiwa (56,76%), Kabupaten Karimun sebanyak 250.511 (13%) serta Kota Tanjungpinang sebanyak 220.812 (11,17%) sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan kepadatan penduduk antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kondisi Ekonomi.

a. Potensi Unggulan Daerah.

1) Sektor Kelautan

Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen lebih terdiri dari lautan memiliki potensi sumber daya hayati maupun non hayati yang besar, terdiri dari berbagai hasil perikanan laut, wisata bahari dan pantai, ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut serta



beragam jenis biota dan budidaya laut lainnya. Bila aspek yang berkaitan dengan kelautan, misalnya pariwisata laut dapat lebih dikembangkan dan dikelola dengan baik bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar disamping industri pengolahan ataupun perdagangan.

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04°LS # 106°BT dengan 03°LS # 111°BT. Secara rinci Produksi Perikanan Budidaya menurut jenis Budidaya Menurut Jenis Budidaya Per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.9
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
MENURUT JENIS BUDIDAYA (Ton)
PER KABUPATEN/ KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Budidaya		
		Jaring Apung Laut	Jaring Apung Tawar	Kolam Air Tenang
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	168	23	2031
2.	Kab.Bintan	63	-	4680
3.	Kab.Natuna	6	-	6
4.	Kab.Lingga	2	-	18
5.	Kab.Kep.Anambas	496	-	1122
6.	Kota Batam	319	-	12687
7.	Kota Tg.pinang	58901	-	2044
Jumlah/Total		59.955	23	22.589

No	Kabupaten/ Kota	Budidaya		
		Laut Lainnya	Rumput Laut	Tambak Semi Insentif
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	-	1981	20
2.	Kab.Bintan	19	-	0
3.	Kab.Natuna	0	5808	-



4.	Kab.Lingga	-	-	21
5.	Kab.Kep.Anambas	34	2113	-
6.	Kota Batam	-	2642	1
7.	Kota Tg.pinang	0	-	-
Jumlah/Total		53	12.545	42

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka 2019

Pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap mencapai 309,287,148 (Kg) yang Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10
JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
MENURUT KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019

No	Kabupaten/ Kota	2018 (kg)	2019 (kg)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (kg)
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Karimun	60,442,000	61,174,940	1,21	121,616,940
2.	Kab.Lingga	43,802,000	44,137,532	0,77	87,939,532
3.	Kab Kep. Anambas	27,857,000	28,776,880	3,30	56,633,880
4.	Kab.Natuna	45,991,000	47,579,320	3,45	93,570,320
5.	Kab.Bintan	55,979,000	46,315,000	0.60	102,294,000
6.	Kota Tanjungpinang	9,959,000	10,640,000	6.84	20,599,000
7.	Kota Batam	59,973,000	60,663,476	1.15	120,636,476
Jumlah Total		304,003,000	309,287,148	1,74	603,290,148

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

2) Sektor Peternakan

Walaupun wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar luasnya merupakan laut, selain potensi sektor kelautan, terdapat juga potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yakni sektor peternakan. Dalam konteks ini ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong dan itik.

Adapun rincian populasi ternak pada tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau untuk sapi potong sebanyak 19.270 ekor dan kambing sebanyak 27.987 ekor serta babi sebanyak 369.724 ekor, secara rinci populasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11



**POPULASI TERNAK MENURUT KABUPATEN/ KOTA
DI KEPULAUAN RIAU**

No	Kabupaten/Kota	Sapi Potong	Kambing	Babi
		(ekor)		
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	1.050	5096	1.273
2.	Kab.Bintan	825	1.888	979
3.	Kab.Natuna	9.815	1.461	-
4.	Kab.Lingga	2.098	795	592
5.	Kab.Kep.Anambas	4.019	275	-
6.	Kota Batam	725	2.045	366.350
7.	Kota Tg. Pinang	374	501	530
Jumlah Total		19.270	27.987	369.724

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka 2019

Terhadap Jenis Unggas Produksi Telur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk ayam buras sebanyak 868,48 Ton , ayam petelur sebanyak 4352,34 Ton, Itik sebanyak 122,05 Ton. Secara rinci Jenis Unggas Produksi Telur menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.12
JENIS UNGGAS PRODUKSI TELUR
MENURUT KABUPATEN/ KOTA
DI KEPULAUAN RIAU**

No	Kabupaten/ Kota	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik
		(Ton)		
1	2	3	4	5
1.	Kab.Karimun	15,76	1388,53	10,99
2.	Kab.Bintan	120,40	1495,46	62,33
3.	Kab.Natuna	46,81	-	17,17
4.	Kab.Lingga	68,52	1,78	11,82
5.	Kab.Kep.Anambas	12,36	-	7,08
6.	Kota Batam	599,71	4,18	2,89
7.	Kota Tg. Pinang	4,91	-	9,78
JUMLAH TOTAL		868,48	4352,34	122,05

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka 2019

3) Sektor Pertanian

Mengingat besarnya luas lautan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagian besar masyarakat memilih profesi sebagai nelayan daripada petani, selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh tipe tanah merah di Kepulauan Riau yang bisa



ditanami oleh jenis tanaman tertentu. Kondisi ini memerlukan penelitian dan pengembangan khusus untuk meningkatkan produksi pertanian dan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Secara rinci Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.13
LUAS LAHAN SAWAH DAN BUKAN SAWAH
MENURUT KABUPATEN/ KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
		(hektar)			
1	2	3	4	5	6
1.	Kab.Karimun	176	31.685	181.951	213.812
1	2	3	4	5	6
2.	Kab.Bintan	75	74.164	112.213	186.452
3.	Kab.Natuna	853	127.614	77.288	205.633
4.	Kab.Lingga	801	83.824	127.448	212.217
5.	Kab.Kep. Anambas	673	41.181	22.442	64.006
6.	Kota Batam	-	36.185	117.254	153.439
7.	Kota Tg. Pinang	-	7.656	16.314	23.790
JUMLAH TOTAL		2.578	403.017	654.912	1.060.327

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan

Adapun luas tanam, luas panen, produksi komoditi padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.14
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI, DAN PRODUKSI
KOMODITAS PADI MENURUT KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/ Ha)
1	2	4	5	6
1.	Kab.Karimun	49	26,94	132
2.	Kab.Bintan	32	37,81	121
3.	Kab.Natuna	130	18,31	238
4.	Kab.Lingga	72	21,11	152
5.	Kab.Kep.Anambas	72	26,39	190
6.	Kota Batam	-	-	-
7.	Kota Tg.Pinang	-	-	-
JUMLAH TOTAL		355	23,46	833



4) Sektor Pariwisata

Kepulauan Riau berada pada posisi yang cukup strategis berbatasan dengan Negara-negara tetangga ini tentu memiliki peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan mingguan dengan didukung pula dengan berbagai kemudahan untuk berkunjung melalui kerjasama antar negara yang berdekatan tersebut. Pariwisata Kepulauan Riau bertumpu pada wisata bahari, wisata khusus seperti wisata Golf, wisata belanja, MICE (*meeting, intensive, conference dan exhibition*), wisata sejarah dan budaya, disamping itu semakin mendorong tingkat kunjungan wisata dengan berbagai kegiatan pendukung penyelenggaraan event-event wisata baik berskala nasional maupun internasional.

Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.590.802 orang atau mengalami kenaikan sebesar 11,89% dibanding kunjungan wisman selama tahun 2018 yang mencapai 2.074.673 orang. Upaya lain yang juga terus dilakukan adalah dengan membina kerjasama antara pelaku jasa wisata Kepulauan Riau dengan pihak regional Singapura, Malaysia dan negara-negara pengirim wisatawan termasuk juga mengikuti pameran-pameran wisata di luar negeri.

Tabel 1.15
JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

NO	TUJUAN	TAHUN 2019
1.	Batam	1.758.648
2.	Tanjungpinang	154.198
3.	Bintan	575.532
4.	Karimun	102.424
Jumlah		2.590.802

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

5) Sektor Pertambangan

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau yaitu bahan galian tambang (mineral), seperti timah, bauksit, batu



besi, granit, kuarsa, pasir darat dan bahan galian industri lainnya yang cukup potensial.

Berdasarkan laporan penyelidikan pendahuluan dan informasi yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten/kota bahwa potensi sumber daya mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Timah

Deposit bahan galian timah tersebar di wilayah perairan laut Pulau Kundur Kabupaten Karimun dan Pulau Singkep Kabupaten Lingga, ditinjau dari historis geologi merupakan jalur penyebaran endapan timah yang berasal dari ujung perairan Selat Malaka hingga Pulau Bangka. Secara ekonomis, jumlah cadangan terkira timah laut yang diusahakan oleh PT. Tambang Timah Unit Kundur sekitar 11.360.000 *metric* ton tersebar di wilayah perairan laut Kundur dan Dabo Singkep.

b) Bauksit

Potensi mineral bauksit yang terbesar dan terkenal di Indonesia terdapat di Pulau Bintan dan tersebar juga di pulau-pulau sekitarnya. Berdasarkan penelitian ahli geologi Belanda, Van Bemmelen jumlah cadangan terkira bauksit di wilayah Pulau Bintan sebesar 10.000.000 ton. Kondisi saat ini, kegiatan penambangan (eksploitasi) bauksit tersebar pula di wilayah perairan laut Kabupaten Karimun, Lingga, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Informasi secara rinci mengenai jumlah cadangan ekonomis bauksit (layak tambang) yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau belum tersedia.

c) Batu Besi

Daerah sebaran batu besi erat kaitannya dengan penyebaran bauksit yang berasal dari rombakan batuan induk yang bersifat *granitis*, mengalami pelapukan, pengendapan (*laterisasi*) serta pengkayaan oksida besi. Kegiatan penambangan (eksploitasi) batu besi terdapat di Pulau Baruk Kabupaten Lingga dengan jumlah cadangan terkira sebesar 10 juta ton. Selain itu terdapat



pula deposit batu besi di Kabupaten Anambas, Pulau Mentalak Kecamatan Siantan.

d) Granit

Penyebaran batuan granit tersebar di Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Anambas, Lingga dan Kota Batam, dengan jumlah cadangan terkira yang terdapat di Pulau Karimun sebesar 815.940.000 ton dan di Pulau Bintan sebesar 42.444.000 ton.

e) Kuarsa

Deposit mineral kuarsa (rumus kimia : SiO_2) keterdapatannya sering berasosiasi dengan mineral lain berupa pasir alam, merupakan sumber daya mineral yang cukup prospek untuk dikembangkan, karena banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri semen, industri gelas, kaca dan industri lainnya. Daerah sebaran mineral kuarsa tersebar di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas dan Kota Batam.

f) Pasir Darat

Pasir darat merupakan salah satu bahan galian yang banyak digunakan sebagai sumber baku material/bangunan dan kegiatan penataan lahan. Sebaran pasir darat terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas dan Kota Batam.

g) Zircon Andesit, Diorit, Granulite, Rijang, Hornfels, Feldspar, Kaolin dan Batu Setengah Permata.

Penyebaran zircon erat kaitannya dengan keberadaan mineral timah (sebagai mineral pengikut) yang terbentuk pada lingkungan pengendapan alluvial, yang mengalami proses erosi dan tertransportasi jauh dari batuan induk (plutonik asam atau basa). Mineral ini dapat dijumpai pada bekas penambangan timah di darat seperti di daerah Dabo Singkep, Karimun dan Kundur. Batuan andesit, diorit dan granulite digunakan sebagai bahan pondasi bangunan. Daerah penyebarannya terdapat di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Rijang, hornfels, feldspar dan



batu setengah permata tersebar di Kabupaten Natuna dan Anambas (data jumlah cadangan belum tersedia).

6) Sektor Industri

Pada dasarnya pengelompokan industri pengolahan dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, adalah pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan ke dalam dua belas sub sektor klasifikasi industri. Kedua, adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja.

Pada Tahun 2018 jumlah industri di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.870 buah terbanyak di Kota Batam sebanyak 1.080 buah menyusul Kabupaten Bintan sebanyak 667 buah, Karimun sebanyak 441 buah, dan Natuna sebanyak 251 buah.

Secara keseluruhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB cukup tinggi. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri sebesar Rp. 34.272.837,19 dari total PDRB sebesar Rp. 71.177.223,76 atau sebesar (48,15 %). Bila di lihat menurut Kabupaten/Kota maka sumbangan tertinggi terdapat di Kota Batam sebesar 57,85 % menyusul Kabupaten Bintan sebesar 50,72 % dan Kota Tanjungpinang sebesar 23,65 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16
PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2016-2018

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,58	3,51	3,25
B	Pertambangan dan Penggalian	15,29	14,08	14,14
C	Industri Pengolahan	37,43	37,60	37,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	1,18	1,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12
F	Konstruksi	17,98	18,18	18,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,20	8,63	8,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,20	3,06



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,01	2,22	2,26
J	Informasi dan Komunikasi	1,84	1,79	1,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	2,75	2,73
L	Real Estat	1,45	1,49	1,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	2,60	2,58
P	Jasa Pendidikan	1,35	1,51	1,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,93	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,45	0,47	0,53
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Visi dan Misi

Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor

3 Tahun 2017 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah *"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim."*

Dalam Visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan. Adapun empat kata kunci tersebut terkandung pengertian dan pemahaman sebagai berikut :

- Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu menunjukkan bahwa Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau



akan menjadi Provinsi yang kembali akan *mentabalkan tamaddun/kejayaan Melayu* dalam masa kekinian dan berorientasi masa depan.

- b. Kepulauan Riau yang sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar pembangunan manusia.
- c. Kepulauan Riau yang berakhlak mulia adalah kondisi dimana Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya melayu memiliki sifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan.
- d. Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa.
- e. Kepulauan Riau yang Unggul di Bidang Maritim adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki wilayah perairan kepulauan dan dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektorsektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari. Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang**



Maritim”, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut :

Misi

Untuk dapat mengantisipasi kondisi yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan, dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan, maka dirumuskan misi guna mewujudkan visi diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup; dan
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung



dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Rumusan strategi untuk masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu

Strategi :

1. Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama bekerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan.
3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.

b) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota

Strategi :

1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
4. Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
5. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman.
6. Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.



c) Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi

Strategi :

1. Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu, Peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi baik level sarjana maupun diploma/ politeknik sesuai potensi kemaritiman.
2. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

d) Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Strategi :

1. Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan dan perbaikan manajemen rumah sakit.
3. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
4. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan dan fasilitasi akses modal usaha serta pengembangan BUMDesa.
5. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.



6. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, serta kerjasama dalam penanggulangan bencana

e) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

Strategi :

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal.
3. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan

2. Arah Kebijakan Daerah

1) Arah Kebijakan 2016

Pembangunan daerah pada Tahun 2016 diarahkan pada:
“Pengembangan Sektor Maritim, Energi, Air Dan Ketersediaan Pangan Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau”.

Prioritas pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,



peningkatan produktivitas sektor perindustrian, peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kinerja sektor pariwisata, peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA, dan peningkatan kinerja sektor Koperasi dan UKM.

- b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor Pertanian, dan peningkatan kinerja sektor Pangan.
- c. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat Agar Dapat Hidup Secara Layak, dan peningkatan pembangunan konektivitas.
- d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**, dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- e. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan dan Berbudaya**, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan budaya.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada: peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Arah Kebijakan 2017

Pembangunan daerah pada Tahun 2017 diarahkan pada ***“Peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”***.

Prioritas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dasar**, dengan fokus pada peningkatan **aksesibilitas** dan mutu pendidikan menengah atas; peningkatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.



- b. Peningkatan **infrastruktur dasar dan penghubung antar wilayah**, dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan.
- c. **Pengembangan kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; dan peningkatan pembangunan pariwisata bahari.
- d. **Peningkatan ekonomi produktif**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); dan pengembangan perdagangan.
- e. Revitalisasi **budaya melayu**, dengan fokus pada pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu, dan penciptaan icon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu.
- f. **Perbaikan tatakelola pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

3) Arah Kebijakan 2018

Pembangunan daerah pada Tahun 2018 diarahkan pada ***“Pengembangan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung Infrastruktur yang berkualitas.***

Prioritas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar).
- b. **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran** dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan



kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi.

- c. **Peningkatan kualitas pelayanan dasar** dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menengah atas; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas SDM, serta Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- d. **Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan**, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
- e. **Pengembangan budaya melayu**, dengan fokus pada pengembangan brand Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu.
- f. **Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

4) Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan daerah pada Tahun 2019 diarahkan pada ***“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”***.

Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan**, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.



- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan,** dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi; peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari.
- c. Pengembangan pusat kebudayaan melayu,** dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.
- d. Pengembangan infrastruktur wilayah,** dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,** dengan fokus pada Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

5) Arah Kebijakan 2020

Pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada ***“Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya”***.

Prioritas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,** dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.
- b. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif,** dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; peningkatan penegakan Perda Provinsi dan



Peraturan Gubernur mengenai ketenteraman, ketertiban, serta antisipasi potensi gangguan keamanan.

- c. **Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- d. **Peningkatan daya saing ekonomi**, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. **Pengembangan pusat kebudayaan melayu**, dengan fokus pada promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

6) Arah Kebijakan 2021

Tahun 2021 yang merupakan periode terakhir perencanaan Pembangunan daerah diarahkan pada ***“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”***.

Prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. **Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu**, dengan fokus pada optimalisasi pengembangan pusat kebudayaan melayu dan pelestarian adat dan seni budaya melayu; peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.
- b. **Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pemerataan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi



pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

- c. **Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas**, dengan fokus pada pemerataan pembangunan jalan provinsi; pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih; pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; dan Peningkatan ratio elektrifikasi rumah tangga; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau, dan Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. **Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dengan fokus pada:** optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. **Pemantapan tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

C. Prioritas Daerah

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yaitu **“Pengembangan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung Infrastruktur yang berkualitas.”**. Prioritas Pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar).



2. **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran** dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi.
3. **Peningkatan kualitas pelayanan dasar** dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menengah atas; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas SDM, serta Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
4. **Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan**, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
5. **Pengembangan budaya melayu**, dengan fokus pada pengembangan brand Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu.
6. **Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran beserta program dan target kinerja tahun 2019. Perincian Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status	
1	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan fokus: peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,15	9,81	95,34	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	86,00	92,12	104,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,00	72	102,86	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	76,50	77,3	101,05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,42	0,41	102,38	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	88,00	95,84	109,53	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	88,00	100	116,28	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	50	43	86,00	Tinggi	Dinas Pendidikan
				Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36	1:33	103,13	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	94,00	96,11	102,24	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
			Program Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	130	98	124,35	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	32	13	159,97	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan



				Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,80	11,9	129,41	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Cakupan Kabupaten/ Kota Sehat	%	57,00	100	175,44	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
			Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	165	316	191,71	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	82,00	87,7	106,89	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	94	91	102,69	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,31	0,1	157,24	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,00	87,9	95,50	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28,30	28,2	100,25	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
			Program pelayanan kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	57,14	100	175,01	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi	%	38,00	96,5	253,98	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	72,00	86,1	119,56	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjungpinang



				Tanjungpinang (Versi KARS)						
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
			Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	80,00	80,6	100,81	Sangat Tinggi	RSUD Provinsi Tanjungpinang
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	77,00	85,5	111,04	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
			Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	60,00	77	128,35	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	63,00	73,7	116,96	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	67,00	82,2	122,75	Sangat Tinggi	RSUD Prov Tanjungpinang
				Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	65,00	93,3	143,59	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.700	20.450	265,58	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi; peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari.		Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	700	5.656	808,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	145	4.365	3.010,34	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	104	493	474,04	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	86,00	82,34	95,74	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	82,00	92,88	113,27	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	55,80	39,93	71,56	Sedang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase KSP/USP sehat	%	30,60	38,19	124,80	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan koperasi	%	2,00	2,72	136,00	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,48	0,55	114,67	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	20,19	19,85	98,32	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kuantitas produksi industri	Program Pengembangan sentra-sentra	Jumlah Sentra Industri dilengkapi	Sentra	8	8	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



		pengolahan berbasis bahan baku lokal	industri potensial	Infrastruktur penunjang						
			Program Pengembangan Industri Unggulan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	37,50	37,57	100,19	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	133.060	133.060	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.400	2.400	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.969	1.969	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,10	12,10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.405,48	2727,48	194,06	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	9.100.000	7.793.311	85,64	Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	10.000	28.418	284,18	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	23	23	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,35	9,07	108,62	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	<10	8,33	116,70	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	89,00	163	183,15	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



		Meningkatnya produksi pertanian	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,70	101,41	102,75	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,2*	99,17	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Program Peningkatan produksi pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.020	1.167,8	114,49	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.679	19.482,46	153,66	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	43.239	72.654,90	168,03	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	31.796	33.946,80	106,76	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,00	5,32	106,40	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	91,00	99,19	109,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10	9,26	107,40	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	88,00	89,1	101,25	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya produksi perikanan dan	Program Pengembangan dan Pengelolaan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.239,05	309.287,15	101,33	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan



	olahan hasil perikanan	Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,08	117,42	106,66	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.784,95	33.003,11	97,69	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)		107,99	126,77	117,39	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.326,23	1.803,55	135,99	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.786.051	33.994.231,2	106,95	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata - rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,10	1,96	93,33	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,45	2,46	100,41	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,30	2,8648	124,56	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,57	4,227	269,24	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
			Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	13.409	19.625	146,36	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	51,00	50,87	99,75	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
	Angka kemiskinan menurun	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	48,64	64,48	132,57	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	45	108	240,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,00	0,81	81,34	Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,16	0,39	250,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	39,64	38,09	96,09	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,28	0,29	102,31	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	7,94	7,02	88,44	Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	%	26,97	25,86	95,85	Sangat Tinggi	Dinas Sosial



				sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)							
				Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,75	1,57	89,56	Tinggi	Dinas Sosial	
				Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37	15,88	20,26	Sangat Rendah	Dinas Sosial	
				Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	57,30	49,73	86,79	Tinggi	Dinas Sosial	
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,00	79,74	166,13	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
				Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	43,00	40,53	94,26	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
				Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	87,00	70	80,46	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
				Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	orang	16,00	40	250,00	Sangat Tinggi		



				bidang kemaritiman						
			Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	60,00	60,69	101,15	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,05	64,76	96,58	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,88	6,91	99,56	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Pengembangan pusat kebudayaan melayu, dengan fokus pada: penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33	14,32	44,29	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan
				Persentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	32,78	40,46	123,43	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
			Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	20,98	22,03	105,01	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
			Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	43,48	94,2	216,65	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
				Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	35,62	66,02	185,35	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	50,00	50	100,00	Sangat Tinggi	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Pengembangan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada: pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	24,99	25,96	103,88	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
				panjang jalan yang	km	38,47	45,80	119,05	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan



akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.			ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi						Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	85,71	71,43	83,33	Tinggi	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	88,89	88,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis	%	76,92	76,92	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Persentase pelayanan penyeberangan terkelola dengan baik	%	90,91	90,91	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	91,67	91,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	50,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	88,89	88,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	82,35	82,35	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Transportasi Laut	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	77,78	55,56	71,43	Sedang	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	77,78	55,56	71,43	Sedang	Dinas Perhubungan
			Persentase pelayanan laut terkelola dengan baik	%	91,67	91,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Program Peningkatan Pemenuhan	Cakupan pelayanan Sanitasi :						Dinas Perumahan Dan



			Akses Sanitasi	Air Limbah	%	92,72	87,06	93,90	Sangat Tinggi	Kawasan Permukiman
				Persampahan	%	61,00	59,99	98,34	Sangat Tinggi	
				Drainase	%	42,40	37,26	87,88	Tinggi	
		Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum	Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	96,79	92,47	95,54	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Berkurangnya kawasan kumuh	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	549,53	476,85	115,24	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya rasio elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	91,50	92,59	101,19	Sangat Tinggi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
				Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	95,45	89,9	94,19	Sangat Tinggi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,90	66,5	96,52	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	81,82	100	122,22	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	71,43	71,43	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	20,60	20,3	98,54	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase kabupaten/k	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan



				ota yang memenuhi standar nominasi Adipura						Hidup Dan Kehutanan
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	30	39	130,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Luas kawasan mangrove yang ter rehabilitasi	ha	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,01	33,33	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Luas lahan kritis ter rehabilitasi	ha	225	400	177,78	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	60,00	58,02	96,70	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III



dengan fokus pada: Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.				Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	82,00	93,80	114,39	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaiaa Dan Pengemban an Sumber Daya Manusia
				Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	12	12	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaiaa Dan Pengemban an Sumber Daya Manusia
				Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	93,00	100	107,53	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaiaa Dan Pengemban an Sumber Daya Manusia
				Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B (70)	B (77,70)	111,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaiaa Dan Pengemban an Sumber Daya Manusia
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	25,21	31,20	123,76	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaiaa Dan Pengemban an Sumber Daya Manusia
			Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	65,00	43,24	66,52	Sedang	Dinas Komunikas Dan Informatika
			Program e-government	Nilai e-government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,30	2,4	104,35	Sangat Tinggi	Dinas Komunikas Dan Informatika
				Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatka n	%	45,00	68,08	151,29	Sangat Tinggi	Dinas Komunikas Dan Informatika
			Program pembentukan penyelengga raan pemerintah an yang	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	70,00	65,83	94,04	Sangat Tinggi	Biro Organisasi dan Korpri



			baik dan bersih (2018-2021) / Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Sebagai Upaya Pencegahan KKN (2017)								
			Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaaa , Penelitian dan Pengemban an	
				Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	85,00	85	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaaa , Penelitian dan Pengemban an	
				Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaaa , Penelitian dan Pengemban an	
				Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	81,00	81	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaaa , Penelitian dan Pengemban an	
				Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>33,00	33	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaaa , Penelitian dan Pengemban an	
			Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan yang akuntabel	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,330	1.303	97,97	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
					Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	37,76	33,16	87,82	Tinggi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
					Persentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih	%	18,00	12,75	70,83	Sedang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
				Program Peningkatan dan	Persentase Perangkat Daerah yang	%	93,55	100	106,90	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan



			Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat							dan Aset Daerah
				Persentase kepuasan pelayanan	%	90,00	97	107,78	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	74,07	70	94,51	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok, papan nama)	%	71,11	70	98,44	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah	
				Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektora daerah	
				Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00	71,43	71,43	Sedang	Inspektorat daerah	
			Program Peningkatan	Opini BPK atas LKPD	Status	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah	



			Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Pemprov Kepri						
				Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
				Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Hijau	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
		Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	6,00	11,24	187,33	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	31,49	30,52	103,08	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	57,14	100	175,01	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	3,80	3,09	118,68	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	200	235	85,11	Tinggi	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
				Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	36	23	63,89	Rendah	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan	Persentase demo yang berjalan aman	%	94,00	100	106,38	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran



			Tindak Kriminal							
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	Pileg:73,50;Pilpres:64,75	Pileg:82,00;Pilpres:82,00	Pilpres:111,56;Pilpres:126,64	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	82,35	158,80	192,84	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterangan:

Sangat Tinggi (ST) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan lebih dari/atau sama dengan 91%
Tinggi (T) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 76% hingga kurang dari 90%
Sedang (S) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 66% hingga kurang dari 75%
Rendah (R) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 51% hingga kurang dari 65%
Sangat Rendah (SR) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan kurang dari/atau sama dengan 50%

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

Urusan wajib yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 6 (Enam) program dengan 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan. Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2019 semula Rp 2.768.708.810,00 dan setelah APBDP mengalami kenaikan menjadi Rp 11.702.798.473,00 sedangkan Realisasi keuangan sebesar Rp 11.702.798.473,00 atau 91.85% dan realisasi fisik sebesar 90.77%.

Program urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan total anggaran Rp 6.352.877.060,00 dalam rangka mendukung operasional dan rutinitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Anggaran Rp 479.050.000,00 Realisasi Rp 431.757.910,00 atau 90,13% dan Realisasi Fisik 100%.

2) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

Anggaran Rp 2.439.658.810,00 Realisasi Rp 2.227.237.398,00 atau 91,29% dan Realisasi Fisik 95,15%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Anggaran Rp 450.000.000,00 Realisasi Rp 413.000.000,00 atau 91,78% dan Realisasi Fisik 100%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama tahun 2020 adalah berupa kegiatan Penyusunan SAKIP

1) Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Rp 25.000.000 realisasi Rp.23.807.280 atau 95.23% dan realisasi fisik 100%.

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program total anggaran sebesar Rp 2.079.130.000,00 selama tahun 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Anggaran Rp 130.000.000,00 Realisasi Rp 105.530.354,00 atau 81,18% dan Realisasi Fisik 100%.

2) Peningkatan Peran FKUB

Anggaran Rp 170.000,000,00 Realisasi Rp 124.053.600,00 atau 72,97% dan Realisasi Fisik 96,94%.

3) Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri

Anggaran Rp 170.000.000,00 Realisasi Rp 148.860.607,00 atau 87.57% dan Realisasi Fisik 100%.

4) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri.

Anggaran Rp 80.000.000,00 Realisasi Rp 55.839.070,00 atau 69,80% dan Realisasi Fisik 100%.

5) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau

Anggaran Rp 400.000.000,00 Realisasi 323.336.917,00 atau 80,83% dan Realisasi Fisik 100%.



- 6) Pertemuan Forum Kesbangpol se Provinsi Kepulauan Riau
Anggaran Rp 205.000.000,00 Realisasi 181.722.456,00 atau 88,65% dan Realisasi Fisik 100%.
- 7) Fasilitas Pengawasam Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Anggaran Rp 98.000.000,00 Realisasi Rp. 94.968.908,00 atau 96,91% dan Realisasi Fisik 100%.
- 8) Perkemahan Wawasan Kebangsaan
Anggaran Rp 320.000.000,00 Realisasi Rp 253.051.400,00 atau 79,08% dan Realisasi Fisik 100%.
- 9) Dialog Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau
Anggaran Rp 150.000.000,00 Realisasi Rp 147.728.100,00 atau 98,49% dan Realisasi Fisik 100%.
- 10) Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Anggaran Rp 60.000.000,00 Realisasi Realisasi 44.830.300,00 atau 74,72% dan Realisasi Fisik 100%.
- 11) Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
Anggaran Rp 80.000.000,00 Realisasi Rp 71.738.676,00 atau 89,67% dan Realisasi Fisik 100%.
- 12) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kepulauan Riau
Anggaran Rp 80.000.000,00 Realisasi Rp 71.255.600,00 atau 89,07% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik Dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepulauan Riau
Anggaran Rp 136.130.000,00 Realisasi Rp 118.000.000,00 atau 86,77% dan Realisasi Fisik 100%.

e. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program total anggaran sebesar Rp 860.730.000,00 selama tahun 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Monitoring Ormas/LSM penerima Bansos dan Update Data Base Ormas/LSM
Anggaran Rp 58.730.000,00 Realisasi Rp 54.525.280,00 atau 92,84% dan Realisasi Fisik 100%.
- 2) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepri



Anggaran Rp 50.000.000,00 Realisasi Rp 38.694.600,00 atau 77,00% dan Realisasi Fisik 100%.

3) Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol

Anggaran Rp 72.000.000,00 Realisasi Rp 50.475.889,00 atau 70.11% dan Realisasi Fisik 100%.

4) Sosialisasi Sistem Manajemen ORMAS

Anggaran Rp 110.000.000,00 Realisasi Rp98.194.682,00 atau 89,27% dan Realisasi Fisik 100%.

5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pelajar dan Siswa Terhadap Produk Dalam Negeri di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Anggaran Rp 140.00000,00 Realisasi Rp 135.700.758,00 atau 96,93% dan Realisasi Fisik 100%.

6) Pemantauan Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau

Anggaran Rp 430.000.000,00 Realisasi Rp 385.900.500,00 atau 89,74% dan Realisasi Fisik 100%.



BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

1. Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019 yaitu: “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis (pendekatan top Down/teknokratik), Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Janji kepala daerah (pendekatan Politik) dan hasil Konsultasi publik (Pendekatan Bottom Up).

Pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2019 diukur menggunakan sebanyak 174 indikator sasaran. Dari sejumlah indikator sasaran tersebut, sebanyak 151 indikator (86,78%) memiliki status kinerja sangat tinggi, sebanyak 12 indikator (6,90%) memiliki status kinerja tinggi, sebanyak 6 indikator (3,45%) memiliki status kinerja sedang, sebanyak 1 indikator (0,57%) memiliki status kinerja rendah, sebanyak 4 indikator (2,30%) memiliki status kinerja sangat rendah. Secara lengkap capaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 3B.1
Status Realisasi Indikator Sasaran
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
1	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan fokus: peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,15	9,81	95,34	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	86,00	92,12	104,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,00	72	102,86	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	76,50	77,3	101,05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
	penyakit menular dan tidak menular.			Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,42	0,41	102,38	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	88,00	95,84	109,53	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	88,00	100	116,28	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
				Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	50	43	86,00	Tinggi	Dinas Pendidikan
				Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36	1:33	103,13	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	94,00	96,11	102,24	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	130	98	124,35	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	32	13	159,97	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,80	11,9	129,41	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	57,00	100	175,44	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Program pencegahan dan pengendalian penyakit		Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	165	316	191,71	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	82,00	87,7	106,89	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
				Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	94	91	102,69	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,31	0,1	157,24	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,00	87,9	95,50	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28,30	28,2	100,25	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
			Program pelayanan kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	57,14	100	175,01	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi	%	38,00	96,5	253,98	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	72,00	86,1	119,56	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjungpinang
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
			Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	80,00	80,6	100,81	Sangat Tinggi	RSUD Provinsi Tanjungpinang
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	77,00	85,5	111,04	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
			Program pengembangan	Persentase Puskesmas yang minimal	%	60,00	77	128,35	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
			pemberdayaan SDM kesehatan	memiliki 5 jenis tenaga kesehatan						
				Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	63,00	73,7	116,96	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	67,00	82,2	122,75	Sangat Tinggi	RSUD Prov Tanjungpinang
				Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	65,00	93,3	143,59	Sangat Tinggi	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
2	Pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada: pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi; peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	7.700	20.450	265,58	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	700	5.656	808,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	145	4.365	3.010,34	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	104	493	474,04	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	86,00	82,34	95,74	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	82,00	92,88	113,27	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penguatan	Persentase Koperasi Aktif	%	55,80	39,93	71,56	Sedang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
	an pariwisata bahari.		Kelembagaan Koperasi	Persentase KSP/USP sehat	%	30,60	38,19	124,80	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan koperasi	%	2,00	2,72	136,00	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,48	0,55	114,67	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	20,19	19,85	98,32	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal		Program Pengembangan sentra-industri potensial	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	8	8	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
				Program Pengembangan an Industri Unggulan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	37,50	37,57	100,19	Sangat Tinggi
			Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas		orang	133.060	133.060	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
			Program Pengembangan an Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	2.400	2.400	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
				Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.969	1.969	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
				Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,10	12,10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
			Meningkatnya kinerja sektor perdagangan		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	uta US \$	1.405,48	2727,48	194,06
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$				9.100.000	7.793.311	85,64	Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA				10.000	28.418	284,18	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian Da Perdagangan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
				Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	23	23	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,35	9,07	108,62	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	<10	8,33	116,70	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	89,00	163	183,15	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya produksi pertanian	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,70	101,41	102,75	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,2*	99,17	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.020	1.167,8	114,49	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.679	19.482,46	153,66	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	43.239	72.654,90	168,03	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
				Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	31.796	33.946,80	106,76	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,00	5,32	106,40	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Program Peningkatan Ketersediaan , Akses dan Distribusi Pangan,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	91,00	99,19	109,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10	9,26	107,40	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
		Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	88,00	89,1	101,25	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.239,05	309.287,15	101,33	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,08	117,42	106,66	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.784,95	33.003,11	97,69	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)		107,99	126,77	117,39	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.326,23	1.803,55	135,99	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.786.051	33.994.231,2	106,95	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,10	1,96	93,33	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Industri Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,45	2,46	100,41	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,30	2,8648	124,56	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,57	4,227	269,24	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
				Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	13.409	19.625	146,36	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel	%	51,00	50,87	99,75	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
			Kelembagaan Pariwisata	di Kepulauan Riau						
		Angka kemiskinan menurun	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	48,64	64,48	132,57	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	45	108	240,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,00	0,81	81,34	Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,16	0,39	250,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	39,64	38,09	96,09	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,28	0,29	102,31	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	7,94	7,02	88,44	Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase PMKS penyandang disabilitas	%	26,97	25,86	95,85	Sangat Tinggi	Dinas Sosial



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
				yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)						
				Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,75	1,57	89,56	Tinggi	Dinas Sosial
				Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37	15,88	20,26	Sangat Rendah	Dinas Sosial
				Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	57,30	49,73	86,79	Tinggi	Dinas Sosial
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,00	79,74	166,13	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	43,00	40,53	94,26	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	87,00	70	80,46	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	16,00	40	250,00	Sangat Tinggi	



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
			Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	60,00	60,69	101,15	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,05	64,76	96,58	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,88	6,91	99,56	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Pengembangan pusat kebudayaan melayu, dengan fokus pada: penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Program Pembangunan an Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33	14,32	44,29	Sangat Rendah	Dinas Kebudayaan
				Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	32,78	40,46	123,43	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
			Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	20,98	22,03	105,01	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
			Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	43,48	94,2	216,65	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
				Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	35,62	66,02	185,35	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Program Pengembangan an Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Biro Kesejahtera Rakyat
				Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	50,00	50	100,00	Sangat Tinggi	Biro Kesejahtera Rakyat
4	Pengembangan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada: pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	24,99	25,96	103,88	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
				panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	38,47	45,80	119,05	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
		Meningkatnya ketersediaan	Program Peningkatan	Persentase ketersediaan	%	85,71	71,43	83,33	Tinggi	Dinas Perhubungan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
	sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/ke rusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.	prasarana dan sarana transportasi	Pelayanan Angkutan Darat	Pelabuhan Penyeberangan (roro)						
				Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	88,89	88,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
				Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	76,92	76,92	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
				Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	90,91	90,91	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	91,67	91,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
				Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	50,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
				Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	88,89	88,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	82,35	82,35	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
			Program Pembangunan Transportasi Laut	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	77,78	55,56	71,43	Sedang	Dinas Perhubungan
				Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	77,78	55,56	71,43	Sedang	Dinas Perhubungan
				Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	91,67	91,67	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi :						Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Air Limbah	%	92,72	87,06	93,90	Sangat Tinggi	
				Persampahan	%	61,00	59,99	98,34	Sangat Tinggi	
				Drainase	%	42,40	37,26	87,88	Tinggi	



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
		Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	96,79	92,47	95,54	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Berkurangnya kawasan kumuh	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	549,53	476,85	115,24	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya rasio elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	91,50	92,59	101,19	Sangat Tinggi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
				Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	95,45	89,9	94,19	Sangat Tinggi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,90	66,5	96,52	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	81,82	100	122,22	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	71,43	71,43	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	20,60	20,3	98,54	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
				Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan	Sekolah	30	39	130,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	atau tingkat Nasional						
				Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkunga Hidup Dan Kehutanan
				Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkunga Hidup Dan Kehutanan
				Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,01	33,33	Sangat Rendah	Dinas Lingkunga Hidup Dan Kehutanan
				Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	225	400	177,78	Sangat Tinggi	Dinas Lingkunga Hidup dan Kehutanan
				Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	66,67	100	149,99	Sangat Tinggi	Dinas Lingkunga Hidup dan Kehutanan
				Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	85,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkunga Hidup dan Kehutanan
5	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dengan fokus pada: Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	60,00	58,02	96,70	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Da Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	82,00	93,80	114,39	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Da Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat	Kasus	12	12	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Da Pengembangan Sumber Daya Manusia



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
	kekayaan Daerah.			Sedang dan Berat						
				Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	93,00	100	107,53	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B (70)	B (77,70)	111,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	25,21	31,20	123,76	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	65,00	43,24	66,52	Sedang	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Program e-government	Nilai e-government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,30	2,4	104,35	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan	%	45,00	68,08	151,29	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (2018-2021) / Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Sebagai Upaya Pencegahan KKN (2017)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	70,00	65,83	94,04	Sangat Tinggi	Biro Organisasi dan Korpri
			Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	85,00	85	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
				Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	81,00	81	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>33,00	33	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,330	1.303	97,97	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
				Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	37,76	33,16	87,82	Tinggi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
				Persentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih	%	18,00	12,75	70,83	Sedang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	93,55	100	106,90	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase kepuasan pelayanan	%	90,00	97	107,78	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	74,07	70	94,51	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan	%	71,11	70	98,44	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
				(pagar,patok,papan nama)						
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
				Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
				Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00	71,43	71,43	Sedang	Inspektorat daerah
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
				Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
				Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Hijau	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat daerah
		Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	6,00	11,24	187,33	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	31,49	30,52	103,08	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Persentase Kab/Kota	%	57,14	100	175,01	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2019				Perangkat Daerah
						Target	Realisasi	Persentase alisasi Kinerja	Status	
			Program Perlindungan Anak	yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama						Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	3,80	3,09	118,68	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	200	235	85,11	Tinggi	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
				Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	36	23	63,89	Rendah	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase demo yang berjalan aman	%	94,00	100	106,38	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
				Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Polit
			Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	Pileg:73,50;Pilpres:64,75	Pileg:82,00;Pilpres:82,00	Pilpres:111,56;Pilpres:126,64	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Polit
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	82,35	158,80	192,84	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Polit

Keterangan:

Sangat Tinggi (ST) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan lebih dari/atau sama dengan 91%
 Tinggi (T) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 76% hingga kurang dari 90%
 Sedang (S) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 66% hingga kurang dari 75%
 Rendah (R) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 51% hingga kurang dari 65%
 Sangat Rendah (SR) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan kurang dari/atau sama dengan 50%

2. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Bab IX terdapat 5 (lima) indikator. Sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 2 indikator kinerja yang capaiannya belum tersedia yaitu Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena belum dirilis oleh BPS sehingga



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

sementara menggunakan data tahun 2018. Dari sebanyak 5 indikator makro pembangunan, sebanyak 5 indikator (100%) memiliki status kinerja sangat tinggi. Secara lengkap capaian indikator aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 3B.2
Status Realisasi Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2018

No	Program & Indikator Kinerja RPJMD	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,02	5,03	2,01	4,58	4±1	4,89	163,00	ST
2.	Laju Inflasi	%	4,40	3,53	4,02	3,47	3,50±1	2,03	118,80	ST
3.	Indeks Gini	%	0,36	0,35	0,359	0,339	0,35±0,01	0,339*	100,29	ST
4.	Persentase penduduk miskin	%	5,78	5,84	6,13	5,83	5,98	5,90	101,34	ST
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,75	73,99	74,55	74,84	74,71	74,84*	100,17	ST

Keterangan:

***) Data Tahun 2018**

Sangat Tinggi (ST) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan lebih dari/atau sama dengan 91%

Tinggi (T) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 76% hingga kurang dari 90%

Sedang (S) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 66% hingga kurang dari 75%

Rendah (R) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan antara 51% hingga kurang dari 65%

Sangat Rendah (SR) : Persentase realisasi indikator kinerja pembangunan kurang dari/atau sama dengan 50%

3. Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah

1) Urusan Pendidikan

Pada urusan Pendidikan terdapat sebanyak 4 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pembangunan USB SMAN 5 Karimun; Pengadaan Alat Praktek Teknik Elektronika Industri untuk SMKN di Provinsi Kepulauan Riau; Pembangunan USB SMAN di Singkep Selatan; dan Pengadaan Laptop Penunjang Kegiatan Media Pendidikan Untuk SMAN di Kepri. 4 proyek startegis daerah pada urusan pendidikan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 28.131.500.000,-. Secara rinci progress proyek startegis daerah pada urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.3
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pembangunan USB SMAN 5 Karimun	4.163.000.000	26 Desember 2019	79,10	
2.	Pengadaan Alat Praktek Teknik Elektronika Industri	1.468.000.000	Oktober 2019	100	



	untuk SMKN di Provinsi Kepulauan Riau				
3.	Pembangunan USB SMAN di Singkep Selatan	500.000	26 Desember 2019	96,63	Penambahan Hari kerja & denda
4.	Pengadaan Laptop Penunjang Kegiatan Media Pendidikan Untuk SMAN di Kepri	22.500.000.000	Desember 2019	100	

2) Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan terdapat sebanyak 7 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pengadaan Alat kesehatan evakuasi RSUD Palmatak, RSUD Jemaja, RSUD Tarempa, RSUD Dabo dan RSUD Encik Mariyam; Pembangunan Sarana RSAL Dr. Midiyanto S; Pembangunan Labkesda Kota Tanjungpinang; Pembangunan Gedung Penunjang (IPSRs, Gudang Obat dan Penunjang Lainnya); Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (DAK); Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (DAK); dan Pengadaan Alat kedokteran Gawat Darurat (DAK). 7 proyek strategis daerah pada urusan kesehatan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.22.920.207.520,-. Secara rinci progress proyek strategis daerah pada urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.4
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Kesehatan Tahun 2019

No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
	Dinas Kesehatan				
1.	Peralatan dan Mesin (dihibahkan) - Pengadaan Alat kesehatan evakuasi RSUD Palmatak, RSUD Jemaja, RSUD Tarempa, RSUD Dabo dan RSUD Encik Mariyam	1.294.960.000	1 Juli s/d 28 September 2019	100	
2.	Gedung dan bangunan (dihibahkan) - Pembangunan Sarana RSAL Dr. Midiyanto S	1.000.000.000	15 Desember 2019	100	
3.	Gedung dan bangunan (dihibahkan) - Pembangunan Labkesda Kota Tanjungpinang	1.000.000.000	7 Desember 2019	100	
	RSUD Raja Ahmad Thabib				
4.	Pembangunan Gedung Penunjang (IPSRs, Gudang Obat dan Penunjang Lainnya)				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.182.000.000	23 Desember 2019	100	
5.	Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (DAK)				



	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.081.000.000	15 November 2019	100	
	RSUD Engku Haji Daud				
6.	Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi (DAK) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.410.515.000		100	E- KATALOG
	Mobile X-Ray (1 unit)	699.999.500	1 Agustus 2019		
	LCD X-Ray Viewer (5 Unit)	100.000.000	3 Juli 2019		
	Dental X-Ray (1 Unit)	610.515.500	12 Juli 2019		
	CT Scan (1 Unit)	7.000.000.000	2 Agustus 2019		
7.	Pengadaan Alat kedokteran Gawat Darurat (DAK) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	951.732.520		100	E- KATALOG
	Bed Patient (1 Unit)	24.000.000	5 Juni 2019		
	Bed Side Monitor (2 unit)	226.000.000	4 Juli 2019		
	ECG (1Unit)	61.500.000	17 Juni 2019		
	Laryngoscope Set (3 Set)	118.829.598	4 Juli 2019		
	Defibrilator (1Unit)	460.000.000	16 Juni 2019		
	Resuscitation Set (2 Set)	13.402.922	4 Mei 2019		
	Emergency Trolley (2 Unit)	48.000.000	3 Juli 2019		

3) Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat sebanyak 20 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pembangunan Jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan (Lanjutan); Peningkatan Jalan Simp. Frangky - Simp. BNI Kota Batam (Lanjutan); Peningkatan Jalan Simp. BNI - Simp. Underpass Pelita (Jln. Laksamana Pelita) Kota Batam (Lanjutan); Peningkatan Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun (Lanjutan); Peningkatan Jalan Pulau Buru Kabupaten Karimun (Lanjutan); Peningkatan Jalan Sp. Budus-Pelabuhan Roro Penarik Kabupaten Lingga; Pembangunan Jembatan Sungai Tengah 3 Ruas Jalan Bukit Leman-Trans Batubi di Kabupaten Natuna; Peningkatan Jalan pada Kawasan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak (Lanjutan); Pembangunan Jalan Baru Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang (Lanjutan); Penataan Pintu Masuk (Pelantar/ tempat parkir) dan Pendestrian (Jalur Pejalan Kaki pada Ruas Jalan Simp. Ramayana menuju Jembatan I Pulau Dompak (Lanjutan); Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang; Peningkatan Jalan Letung-Bandara Letung Kabupaten; Peningkatan Jalan Musai-Sp. Kerandin Kabupaten Lingga; Peningkatan Jalan Padang Angus-Cemaga Kabupaten Natuna; Peningkatan Jalan Tg. Balai-Sei Bati Kabupaten Karimun; Peningkatan Jalan Sp. Kerandin - Belungkur Kabupaten Lingga; Pembangunan Jalan Desa Pulau Tiga Menuju Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Kab. Natuna; Peningkatan Jalan pada



Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok (Jalan Akses menuju ke Mesid Raya Dompok Kota Tanjungpinang (Lanjutan); Pembangunan Tanggul dan Pintu Air Jalan Parit 9 Kec. Buru Kab. Karimun; Pembangunan Jembatan Pulau Parit-Pulau Lumut di Kabupaten Karimun (lanjutan). 20 proyek startegis daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.259.349.942.000,-. Secara rinci progress proyek startegis daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.5
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pembangunan Jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan (Lanjutan)	4.650.000.000	19 Oktober 2019	100	
2.	Peningkatan Jalan Simp. Frangky - Simp. BNI Kota Batam, Lanjutan	3.920.000.000	22 September 2019	100	
3.	Peningkatan Jalan Simp. BNI - Simp. Underpass Pelita (Jln. Laksamana Pelita) Kota Batam, Lanjutan	8.795.000.000	1 November 2019	100	
4.	Peningkatan Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun, Lanjutan	4.436.000.000	29 November 2019	100	
5.	Peningkatan Jalan Pulau Buru Kabupaten Karimun, Lanjutan	950.000.000	6 November 2019	100	
6.	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik Kabupaten Lingga	2.380.000.000	12 Agustus 2019	100	
7.	Pembangunan Jembatan Sungai Tengah 3 Ruas Jalan Bukit Leman - Trans Batubi di Kabupaten Natuna	1.750.000.000	8 Desember 2019	100	
8.	Peningkatan Jalan pada Kawasan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, Lanjutan	2.650.000.000	18 November 2019	100	
9.	Pembangunan Jalan Baru Pulau Dompok di Kota Tanjungpinang , Lanjutan	3.000.000.000	16 November 2019	100	
10.	Penataan Pintu Masuk (Pelantar/ tempat parkir) dan Pendestrian (Jalur Pejalan Kaki pada Ruas Jalan Simp. Ramayana menuju Jembatan I Pulau Dompok, Lanjutan	3.500.000.000	16 November 2019	100	
11.	Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang	167.200.000.000	31 Desember 2020	100	
12.	Peningkatan Jalan Letung - Bandara Letung Kabupaten	9.902.227.000	5 Oktober 2019	100	
13.	Peningkatan Jalan Musai - Sp. Kerandin Kabupaten Lingga	16.188.410.000	18 November 2019	100	
14.	Peningkatan Jalan Padang Angus - Cemaga Kabupaten Natuna	8.900.000.000	19 Desember 2019	100	



No	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
15.	Peningkatan Jalan Tg. Balai - Sei Bati Kabupaten Karimun	9.500.000.000	22 November 2019	100	
16.	Peningkatan Jalan Sp. Kerandin - Belungkur Kabupaten Lingga	5.578.305.000	5 September 2019	100	
17.	Pembangunan Jalan Desa Pulau Tiga Menuju Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Kab. Natuna	2.350.000.000	27 Desember 2019	100	
18.	Peningkatan Jalan pada Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak (Jalan Akses menuju ke Mesid Raya Dompak Kota Tanjungpinang , Lanjutan	1.000.000.000	30 November 2019	100	
19.	Pembangunan Tanggul dan Pintu Air Jalan Parit 9 Kec. Buru Kab. Karimun	850.000.000	9 November 2019	100	
20.	Pembangunan Jembatan Pulau Parit - Pulau Lumut di Kabupaten Karimun (lanjutan)	1.850.000.000	25 Desember 2019	93,89	Denda keterlambatan

4) Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan dan kawasan permukiman terdapat sebanyak 9 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pembangunan Astaka Provinsi Kepri di Kabupaten Bintan; Penataan Kawasan Teluk Keriting; Pembangunan GOR Dabo Singkep (Lanjutan); Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kolam Renang di Kabupaten Lingga; Penataan Kawasan Permukiman Kp.Kolam Tahap I; Pembangunan Mesjid At Taqwa Penuba Kabupaten Lingga; Pembangunan Mesjid Baiturahman Kab. Karimun; Penataan dan Renovasi Rumah Kawasan Pulau Pecung, Belakang Padang Kota Batam; Pembangunan gedung samsat karimun (Lanjutan). 9 proyek startegis daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.12.903.900.000,-. Secara rinci progress proyek startegis daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.6
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pembangunan Astaka Provinsi Kepri di Kabupaten Bintan	255.000.000	25 April 2019	100	



No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
2.	Penataan Kawasan Teluk Keriting	2.287.100.000	27 Desember 2019	100	
3.	Pembangunan GOR Dabo Singkep, Lanjutan	880.000.000	12 Desember 2019	100	
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kolam Renang di Kabupaten Lingga	844.800.000	12 Desember 2019	100	
5.	Penataan Kawasan Permukiman Kp. Kolam Tahap I	3.496.000.000	27 Desember 2019	100	
6.	Pembangunan Mesjid At Taqwa Penuba, Lingga	850.000.000	Desember 2019	100	
7.	Pembangunan Mesjid Baiturahman Kab. Karimun	1.275.000.000	27 Desember 2019	100	
8.	Penataan dan Renovasi Rumah Kawasan Pulau Pecung, Belakang Padang Kota Batam	1.216.000.000	31 Desember 2019	100	
9.	pembangunan gedung samsat karimun lanjutan	1.800.000.000	27 Desember 2019	100	

5) Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan terdapat sebanyak 10 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pembangunan Ruang Tunggu Penumpang di Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara; Pembangunan fasilitas pelabuhan multifungsi bongkar muat Tanjung Uban; Pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat Belakang Padang Tahap II; Pengembangan dan peningkatan pelabuhan parit rempak; Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian; Pembangunan Ponton Pelabuhan Kampung Asam Desa Teluk Radang; Pembangunan Pelantar Rakyat Tanjung Siambang Dompok; Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kab. Bintan; Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Sungai Tenam Lingga; dan Pembangunan Pelabuhan Nyit Nyit Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna. 10 proyek strategis daerah pada urusan perhubungan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.50.680.698.333,-. Secara rinci progress proyek strategis daerah pada urusan perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.7
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Perhubungan Tahun 2019



No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pembangunan Ruang Tunggu Penumpang di Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara	675.000.000	20 Desember 2019	100	
2.	Pembangunan fasilitas pelabuhan multifungsi bongkar muat Tanjung Uban	32.116.000.000	23 Desember 2019	100	
3.	Pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat Belakang Padang Tahap II	1.446.878.333	26 Agustus 2019	100	
4.	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan parit rempak	3.405.698.000	8 Desember 2019	100	
5.	Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian	2.672.622.000	8 Desember 2019	100	
6.	Pembangunan Ponton Pelabuhan Kampung Asam Desa Teluk Radang	2.100.000.000	15 November 2019	100	
7.	Pembangunan Pelantar Rakyat Tanjung Siambang Dompok	810.000.000	31 Desember 2019	100	
8.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kab. Bintan	2.034.000.000	30 Desember 2019	100	
9.	Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Sungai Tenam Lingga	2.639.500.000	11 Desember 2019	100	
10.	Pembangunan Pelabuhan Nyit Nyit Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna	2.781.000.000	26 Desember 2019	100	

6) Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Pada urusan kepemudaan dan olahraga terdapat sebanyak 2 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompok; dan Pembangunan Sport Hall Pulau Dompok. 2 proyek strategis daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.31.713.750.000,-. Secara rinci progress proyek strategis daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.8
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompok	26.863.750.000	28 Desember 2019	98,2	Perpanjangan kontrak dan denda
2.	Pembangunan Sport Hall Pulau Dompok	4.850.000.000	16 Desember 2019	100	

7) Urusan Kelautan dan Perikanan



Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat sebanyak 6 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Pengadaan Sampan Fiber dengan Mesin Ketinting; Pengadaan alat penangkap ikan; Pembangunan Tambatan Perahu di Kabupaten Natuna, Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan; Pengadaan Kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dana DAK TA. 2019); Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-Peralatan dan Mesin dihibahkan; dan Pembangunan Kapal 5GT dan 3GT beserta Kelengkapan Alat Tangkap-Pengembangan Kapal Perikanan. 6 proyek strategis daerah pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.12.259.050.000,-. Secara rinci progress proyek strategis daerah pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.9
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progres Proyek	Keterangan
1.	Peralatan dan Mesin (dihibahkan) - Pembangunan Sampan Fiber dengan Mesin Ketinting	5.200.000.000	2 September 2019	100	
2.	Pengadaan alat tangkap perikanan - Pengadaan alat penangkap ikan	2.078.050.000	2 September 2019	100	
3.	Pembangunan Tambatan Perahu di Kab. Natuna - Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	911.000.000	18 Desember 2019	100	
4.	Pengadaan Kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dana DAK TA. 2019)	2.300.000.000	18 November 2019	100	
5.	Konversi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Peralatan dan Mesin dihibahkan	950.000.000	18 Desember 2019	100	
6.	Pembangunan Kapal 5GT dan 3GT beserta Kelengkapan Alat Tangkap - Pengembangan Kapal Perikanan	820.000.000	18 Desember 2019	100	

8) Urusan Pertanian

Pada urusan pertanian terdapat sebanyak 6 pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah, yaitu Belanja modal pembangunan rumah ibadah (mushola); Belanja modal pembangunan rumah kaca; Pengadaan waduk air bersih (pembangunan embung dan pembangunan sumur dalam/deep well); Belanja modal pembangunan jalan lingkungan



(Lanjutan); Belanja modal pembangunan pagar keliling lahan UPT Balai benih induk pertanian (Lanjutan); dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan-Peralatan dan Mesin (dihibahkan). 6 proyek startegis daerah pada urusan pertanian sampai dengan akhir tahun 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.5.897.900.000,-. Secara rinci progress proyek startegis daerah pada urusan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3B.10
Progress Proyek Strategis Daerah
Urusan Pertanian Tahun 2019

No.	Proyek Strategis	Pagu Anggaran	Waktu Penyelesaian Proyek	Progress Proyek	Keterangan
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Balai Benih Induk (DAK) - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gudang				
	Belanja modal pembangunan rumah ibadah (mushola)	500.000.000	15 November 2019	100	
	Belanja modal pembangunan rumah kaca	400.000.000	13 November 2019	100	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Balai Benih Induk (DAK) – Pengadaan waduk air bersih (pembangunan embung dan pembangunan sumur dalam/deep weel)	1.000.000.000	14 November 2019	100	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Balai Benih Induk (DAK) - Belanja Modal Jalan irigasi dan jaringan- pengadaan jalan khusus				
	Belanja modal pembangunan jalan lingkungan (lanjutan)	1.512.000.000	14 November 2019	100	
	Belanja modal pembangunan pagar keliling lahan UPT Balai benih induk pertanian , lanjutan	1.200.000.000	13 November 2019	100	
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan - Peralatan dan Mesin (dihibahkan)	1.285.900.000	November 2019	100	



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Tugas Pembantuan (TP) yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 ada 5 DIPA, yaitu dapat kami jabarkan sebagai berikut :

(a) Dasar Hukum Tugas Pembantuan (TP)

Adapun yang menjadi dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- 1) SP DIPA-018.04.4.320088/2019
- 2) SP DIPA-018.05.4.329079/2019
- 3) SP DIPA-018.06.4.329080/2019
- 4) SP DIPA-018.08.4.329082/2019
- 5) SP DIPA-018.03.4.329077/2019

(b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP)

Program dan Kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun rincian berdasarkan sumbernya DIPA tersebut, yaitu :

- 1) DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.320088/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.



- 2) DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.329079/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 3) DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 4) DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 5) DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

(c) Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dapat kami uraikan sebagai berikut :

- 1) DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.320088/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. DIPA ini mempunyai 4 (empat) kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultira, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- 2) DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.329079/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. DIPA ini mempunyai 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan



- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
- 3) DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program dalam DIPA ini mempunyai 6 (enam) kegiatan yaitu :
- Peningkatan Produksi Pakan Ternak
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
 - Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk hewan yang ASUH (aman, sehat , utuh dan Halal)
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
 - Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
- 4) DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dalam DIPA ini mempunyai 6 (enam) kegiatan yaitu :
- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
 - Pengelolaan Sistem Penyedia & Pengawasan alat Mesin Pertanian.
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Fasilitasi Pupuk dan Pesticida
 - Fasilitasi pembiayaan pertanian
- 5) DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) Ditjen Tanaman Pangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program dalam DIPA ini mempunyai 5 (lima) kegiatan yaitu :



- Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Ubi
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

(d) Realisasi Keuangan dan Fisik

Dari seluruh DIPA APBN yang merupakan Tugas Perbantuan (TP) yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh total pagu awal adalah RP. 14.674.445.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 secara keuangan terealisasi Rp. 12.509.378.840,- atau secara persentase keuangan 85,23% dan realisasi secara fisik kegiatan 94,60%. Realisasi keuangan dan Fisik DIPA Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) DIPA Nomor : DIPA-018.04.4.320088/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. Program ini mempunyai pagu awal anggaran sebesar Rp. 4.928.000.000,- Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2019 Rp. 4.572.518.272,- atau secara persentase keuangan sebesar 92,79%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :
 - a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 2.525.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 2.508.723.750,- atau secara persentase keuangan sebesar 99,36%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - b) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 240.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi



- Rp. 178.636.700,- atau secara persentase keuangan sebesar 74,43%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- c) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.603.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 1.370.213.900,- atau secara persentase keuangan sebesar 85,48%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - d) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 560.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 514.943.922,- atau secara persentase keuangan sebesar 91,95%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- 2) DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4.329079/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. Program ini mempunyai pagu awal anggaran Rp. 2.240.119.000,- Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2019 Rp. 1.871.295.860,- atau secara persentase keuangan sebesar 83,54%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :
- a) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.048.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 981.919.300,- atau secara persentase keuangan sebesar 93,69%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - b) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 21.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 20.500.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 97,62%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 130.000.000,- Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi



Rp. 94.215.500,- atau secara persentase keuangan sebesar 72,47%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

- d) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.041.119.000,- Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 774.661.060,- atau secara persentase keuangan sebesar 74,41%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

- 3) DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program ini mempunyai pagu awal anggaran sebesar Rp. 1.585.378.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2019 Rp. 1.383.264.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 87,25%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 98 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :

- a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 50.840.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 47.307.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 94,61%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.090.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 0,- atau secara persentase keuangan sebesar 0,00%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 0,00%.
- c) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 744.540.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 602.971.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 80,99%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- d) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan Halal). Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 154.500.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019



teralisasi Rp. 153.186.500,- atau secara persentase keuangan sebesar 99,15%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.

- e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 520.448.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 473.700.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 91,02%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - f) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 112,800,000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 106,099,500,- atau secara persentase keuangan sebesar 94,06%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.
- 4) DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program ini mempunyai pagu anggaran Rp. 3.827.950.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.014.192.295,- atau secara persentase keuangan sebesar 72,74%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100 %. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu:
- a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 240.000.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 100%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - b) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 150.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 99.998.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 66,66%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - c) Pengelolaan Sistem Penyedia & Pengawasan Alat Mesin Pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp.



- 1.521.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 1.253.660.595,- atau secara persentase keuangan sebesar 82,42%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 1.181.700.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi 947.581.300,- atau secara persentase keuangan sebesar 80,15%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - e) Fasilitas Pupuk dan Pestisida. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 499.800.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 371.567.000,- atau secara persentase keuangan sebesar 74,34%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
 - f) Fasilitas pembiayaan pertanian. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 235.450.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 101.387.200,- atau secara persentase keuangan sebesar 43,06%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- 5) DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2019 merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 2.093.008.000,-. Realisasi keuangan sampai akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.665.108.213,- atau secara persentase keuangan sebesar 79,56%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 89%. Realisasi jika dirinci menurut kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini yaitu :
- a) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 420.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 408.258.400,- atau



secara persentase keuangan sebesar 97,20%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100,00%.

- b) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran Rp. 324.790.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 169.820.794,- atau secara persentase keuangan sebesar 52,29%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 58,30%.
- c) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Ubi. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 580.000.000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 496.547.346,- atau secara persentase keuangan sebesar 80,96%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- d) Pengolahan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 226,908,000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 166,614,400,- atau secara persentase keuangan sebesar 73,43%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 100%.
- e) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 541,310,000,-. Sampai akhir tahun anggaran 2019 terealisasi Rp. 450,867,273,- atau secara persentase keuangan sebesar 83,29%. Dilihat fisik pekerjaannya terealisasi sebesar 85%.

(e) Satuan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau (yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan).

(f) Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung yang ada dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau seperti komputer/pc, laptop/notebook, printer, meja kerja, kursi kerja,



lemari arsip, sarana laboratorium, obat-obatan dan sarana pendukung lainnya.

(g) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas, dalam hal pengembangan budidaya pertanian yang mengakibatkan tingkat produktivitas masih rendah.
- 2) Pemanfaatan lahan pertanian belum optimal, yang disebabkan oleh tingginya biaya operasional dalam pengolahan lahan dan diikuti oleh terbatasnya sarana dan prasarana pertanian yang dimiliki oleh petani.
- 3) Keadaan iklim yang tidak menentu dan sulit diprediksi, sehingga mempengaruhi terhadap pengaturan pola tanam dan kalender tanam.
- 4) Pendampingan yang diberikan baik itu dari pihak kabupaten/kota maupun yang dilakukan oleh petugas di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau kepada petani/kelompok tani/peternak belum optimal. Hal ini juga disebabkan minimnya anggaran pelatihan bagi petugas penyuluh dan tim teknis dinas.
- 5) Satuan biaya pada anggaran disamakan dengan wilayah daratan sehingga pada sebagian kegiatan terkendala kegiatan tersebut.

Solusi :

- 1) Pemberian pelatihan-pelatihan dan demplot untuk menambah kemampuan petani dibidang budidaya pertanian.
- 2) Pengadaan dan penyediaan alat pengolah lahan bagi petani, agar dapat digunakan secara maksimal didalam pengolahan lahan pertanian.
- 3) Pelatihan sekolah lapangan iklim terhadap petani dan penyuluh lapang dalam penentuan pola tanam dan kalender tanam.
- 4) Bimtek atau diklat kepada petugas penyuluh dan tim teknis dinas perlu dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan pertanian/peternakan.
- 5) Diharapkan perhatian pusat dalam pengalokasian anggaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah kepulauan.



(h) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan, diantara permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Permasalahan koordinasi antar kabupaten/kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dilakukan.
- 2) Kurangnya jumlah armada transportasi udara dan transportasi laut sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi tersebut.

2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Tahun 2019 dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 8.629.201,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sedangkan realisasi keuangan Rp 8.329.139,- (96,52%) dan realisasi fisik 100% dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

(a) Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Tugas Pembantuan yaitu DIPA Nomor : DIPA- DIPA-033.04.4.329039/2019 tanggal 05 Desember 2018.

(b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP)

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tahun 2019 bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

(c) Program, Kegiatan dan Realisasi

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- a) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional meliputi :



1. Preservasi KM 16 (Sp. Gesek) –(SP. Gesek) Tanjung Uban Kab. Bintan Target Kuantitas 46.3 (46.3) Km, pagu anggaran Rp 2.595.682.000,- sampai dengan Desember 2019 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 2.515.233.000,- (96,90%).
 2. Preservasi Jalan KM 16 (Sp Gesek) – Tanjung Uban Taret Kuantitas 46,3 Km pagu anggaran Rp 2.595.082.000,- sampai dengan Desember 2019 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 2.515.233.000,- (96,90%)
- b) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan meliputi :
1. Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) – Tanjung Uban Target Kuantitas 2.4 (2.4) Km pagu anggaran Rp 5.311.488.000,- sampai dengan Desember 2019 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 5.094.615.000,- (99,92%).
 2. Preservasi Rehabilitasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) – Tanjung Uban Target Kuantitas 2.4 (2.4) Km pagu anggaran Rp 5.297.288.000,- sampai dengan Desember 2019 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 5.5.080.415,- (95,91%).
- c) Kegiatan Dukungan Administrasi Satker.
- Layanan Dukungan Administrasi Satker Target Kuantitas 12 (2) Bulan Layanan pagu anggaran Rp 722.031.000,- sampai dengan Desember 2019 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 719.291.000,- (99,62%).
- d) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan bidang Pemeliharaan jalan dan Jembatan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

(d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Terdapat sisa anggaran kegiatan yang cukup besar berupa sisa kontrak dan perjalanan dinas, dikarenakan kurang memperhatikan situasi lapangan.



- 2) Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena peruntukannya tidak sesuai dengan jenis penyakit hewan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Solusi :

- 1) Dalam penganggaran kedepan agar memperhatikan situasi lapangan sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang terlalu besar.
- 2) Meningkatkan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, terkait kegiatan yang sesuai dengan kondisi di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencakup peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga, pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

A. Kerjasama Antar Daerah

Realisasi kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kerjasama Sosek Malindo

Pertemuan / Mesyuarat Tim Teknis Ke – 18 KK / JKK SOSEK

MALINDO Tingkat Provinsi KEPRI / Riau – Peringkat Negeri Johor / Melaka



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

telah diadakan dari 1 hingga 5 September 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Pertemuan / Mesyuarat ini diketuai oleh Ketua / Pengerusi Bersama KK / JKK SOSEK MALINDO Provinsi KEPRI, Provinsi Riau, Negeri Johor, Melaka, yaitu Yang Terhormat Drs. Haji Naharuddin, M.TP, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi KEPRI, Yang Terhormat Bapak Mohd Firdaus Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Riau mewakili Ketua Delegasi Provinsi Riau, Y.Brs. Tuan Dr. Haji Badrul Hisham bin Kassim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Pengurusan), Y.Bhg. DCP Datuk Salhah binti Salleh Timbalan Setiausaha (Pembangunan) Kerajaan Negeri Melaka.

a) Kertas Kerja 1 : Kerjasama Bidang Sosial dan Kebudayaan

Kertas Kerja ini bertujuan untuk melaporkan hasil keputusan Pertemuan Tim Teknik ke-18 JKK/KK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Johor/Melaka – Tingkat Provinsi Riau/Kepri kerjasama Bidang Sosial dan Kebudayaan serta usulan pelaksanaan kesepakatan yang lalu serta kemajuan – kemajuan yang telah dicapai.

1) Kesehatan

Poin 1 : Pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau melanjutkan / meneruskan kembali usulan program standar bersama dan sertifikasi tenaga kesehatan dalam melaksanakan AFTA 2015 dan meminta keempat-empat belah pihak melakukan pertemuan lanjutan/khusus dalam rangka membahas standar kerjasama dimaksud.

Keempat-empat belah pihak bersepakat / bersetuju untuk menunda usulan / usul ini dan akan diinformasi/dimaklumkan lebih lanjut / kemudian.

Poin 2 : Pihak Riau meneruskan / melanjutkan kembali usulan program pertukaran petugas kesehatan / kesihatan dan meminta keempat-empat belah pihak melakukan pertemuan lanjutan / khusus dalam rangka membahas / membincangkan tentang / berhubung rencana / perancangan kerjasama tersebut.



Keempat-empat belah pihak bersepakat / bersetuju untuk menunda usulan / usul ini dan akan diinformasi / dimaklumkan lebih lanjut / kemudian.

Poin 3 : Pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau mengusulkan supaya Pemerintah kedua negara untuk menyusun prosedur tertulis bersama dalam rangka mempermudah dan mempersingkat proses pemulangan jenazah yang meninggal di negara masing-masing.

Pihak Johor / Melaka akan menginformasikan / memaklumkan tata cara / prosedur pemulangan jenazah di Malaysia melalui *website*.

2) Pendidikan

Poin 1 : Pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau melanjutkan meneruskan kembali usulan program *Twin School* (Sekolah Kembar) dan meminta keempat-empat belah pihak melakukan pertemuan lanjutan / khusus dalam rangka membahas skema / mekanisme kerjasama dan mempersiapkan pedoman teknis / garis panduan.

Pihak Johor / Melaka memohon agar proposal / kertas kerja yang telah disiapkan oleh pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau dapat diteruskan / dipanjangkan kepada pihak Johor / Melaka untuk dipelajari / semakin lanjut. Setelah disetujui / dipersetujui oleh keempat belah pihak, proposal / kertas kerja tersebut akan diteruskan / dipanjangkan ke Sosek Malindo Tingkat Nasional / Peringkat Pusat sebagai usulan / usul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pihak Riau mohon supaya masa / tempoh berlaku / sah visa dilanjutkan dari 1 (satu) bulan menjadi 3 (tiga) bulan bagi pelaksanaan program magang / praktikal pada Program *Twin School* dan Program Magang / Praktikal Umum.

Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan agar usulan / usul ini diteruskan / dipanjangkan ke Sosek Malindo Tingkat Nasional / Peringkat Pusat.

Poin 2 : Pihak Riau mengusulkan adanya kerjasama antara sekolah vokasi (kejuruan) / Kolej vokasional dengan mitra / rakan



sejawat di Malaysia dalam hal pemagangan pelajar / pelajar praktikal.

Pihak Johor / Melaka memohon agar proposal / kertas kerja yang telah disiapkan oleh pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau dapat diteruskan / dipanjangkan kepada pihak Johor / Melaka untuk dipelajari / semakin lanjut. Setelah disetujui / dipersetujui oleh keempat-empat belah pihak, proposal / kertas kerja tersebut akan diteruskan / dipanjangkan ke Sosek Malindo Tingkat Nasional/Peringkat Pusat sebagai usulan/usul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

3) Kesenian dan Kebudayaan

- Poin 1** : Keempat-empat belah pihak akan membuat daftar / menyenaraikan kegiatan / aktiviti kesenian dan kebudayaan yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 melalui laman web resmi/rasmi berkaitan KK/JKK SOSEK MALINDO yang telah diwujudkan seperti berikut:
- <https://www.losekmalindo.johor.gov.my/>
 - <http://www.melaka.gov.my/ms/kerajaan/lain-lain/losek-malindo>
 - www.losekmalindo.riau.go.id

4) Pemuda dan Olahraga / Belia dan Sukan

- Poin 1** : Pihak Kepulauan Riau mengusulkan / mencadangkan beberapa kegiatan / aktiviti Pertukaran Pemuda / Belia Provinsi Kepulauan Riau / Riau – Johor / Melaka.
- Poin 2** : Pihak Johor / Melaka memohon kepada pihak Kepulauan Riau untuk mengundang / menjemput pihak Riau dan Johor / Melaka untuk turut serta.

b) Kertas Kerja 2: Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan

Kertas Kerja ini bertujuan untuk melaporkan Keputusan Pertemuan Tim Teknik ke-18 JKK/KK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Johor/Melaka – Tingkat Provinsi Riau/Kepri Bidang Ekonomi,



Perdagangan dan Perhubungan serta usulan pelaksanaan kesepakatan yang lalu serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

1) Industri dan Perdagangan

Poin 1 : Provinsi Kepulauan Riau / Riau mengusulkan untuk mengadakan SOSEK MALINDO EXPO / pameran secara *back to back* dengan pertemuan tim teknik dan persidangan / mesyuarat.

Pihak Johor/Melaka mengusulkan pihak penganjur / tuan rumah untuk menjemput / mengundang *industry players* / pelaku usaha dari setiap provinsi / negeri menyertai / mengikuti SOSEK MALINDO EXPO / pameran.

Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju untuk mengadakan SOSEK MALINDO EXPO secara *back to back* dengan pertemuan tim teknik dan persidangan / mesyuarat serta mengundang pelaku usaha / *industry players* dari setiap provinsi / negeri mengikuti / menyertai SOSEK MALINDO EXPO

Poin 2 : Pihak Kepulauan Riau mengusulkan untuk melakukan kegiatan / mengadakan *business matching* pada saat dilakukan / diadakan SOSEK MALINDO EXPO di Melaka pada tahun 2020 dan mengusulkan adanya *cost sharing* untuk pelaksanaan *business matching* kepada pihak Melaka selaku tuan rumah.

Pihak Johor / Melaka setuju / bersetuju supaya setiap Provinsi / Negeri jika merencanakan pelaksanaan / penganjuran *business matching* yang melibatkan pembiayaan bersama / perkongsian peruntukan (*cost sharing*) perlu memfinalisasi / memuktamadkan perincian yang berkaitan, seperti bidang usaha / sektor yang menjadi fokus *business matching* sekurang-kurangnya satu tahun sebelum dilaksanakan.

Poin 3 : Pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau mengusulkan satu *database* / pangkalan data investor/ usahawan diwujudkan dalam *website* SOSEK MALINDO bagi menyukseskan / menjayakan *business matching*.

Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju menginformasikan / memaklumkan bahwa *database* /



pangkalan data *investor* / usahawan boleh didapatkan / dapat diakses melalui *website* SOSEK MALINDO.

Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju untuk / supaya setiap provinsi / negeri saling tukar informasi / terus berkongsi maklumat *contact person* provinsi / negeri (nama, alamat, emel, no. telefon) untuk / bagi memudahkan komunikasi yang lebih baik

Poin 4 : Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan program *Sister City* (Kota Kembar) antara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan Batu Pahat Negeri Johor untuk beberapa bidang tertentu.

Pihak Negeri Johor dapat menerima usulan ini dengan menginformasikan / memaklumkan kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan diskusi / perbincangan lebih lanjut antara kedua belah pihak, iaitu pihak Negeri Johor melalui Bahagian Kerajaan Tempatan dan Majlis Perbandaran Batu Pahat.

Pihak Melaka menginformasikan / memaklumkan perdagangan *barter trade* di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Melaka di Kuala Linggi, Masjid Tanah Melaka, Malaysia dapat / boleh dikembangkan mengingat / diperluaskan lagi memandangkan kompleks tersebut menerima komoditi import seperti ikan, udang, kayu arang, sayuran, kulit kayu manis, buah manggis, betik, dan damar dari / pada Dumai, Bengkalis, Pulau Rupert, Tanjung Medang dan Sinaboi dengan nilai import berjumlah RM36 juta pada tahun 2018.

Pihak Melaka mengundang / menjemput pihak Provinsi Kepulauan Riau / Riau untuk mengembangkan / memperluaskan perdagangan *barter trade* di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Melaka di Kuala Linggi, Masjid Tanah Melaka, Malaysia.

Pihak Provinsi Riau / Kepulauan Riau memerlukan informasi / maklumat yang lebih terperinci seperti peraturan / polisi perundang-undangan terkait / undang – undang di kerajaan / negara Malaysia untuk meyakinkan usahawan dan para *investor* / pelabur.



Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju untuk / supaya setiap provinsi / negeri terus berkongsi maklumat / saling tukar informasi *contact person* provinsi / negeri (nama, alamat, emel, no. telefon) bagi memudahkan komunikasi yang lebih baik.

2) Pertanian dan Peternakan

Poin 1 : Pihak Johor / Melaka menginformasikan / memaklumkan tentang pelaksanaan program kesedaran di pelabuhan penumpang / jeti dan lapangan terbang terkait / berkaitan semua buah-buahan seperti mangga, salak, ambacang / bacang dan tumbuh – tumbuhan yang ingin dibawa masuk ke Malaysia sama ada, baik melalui kargo, bagasi, mel atau ekspedisi / kurier perlu disertakan dengan izin import / permit dan sertifikat / sijil fitosanitasi.

Pihak Johor / Melaka menginformasikan / memaklumkan tentang keharusan / penguatkuasaan penggunaan jaring dalam pembungkusan kelapa tua biji (kelapa yang belum dikupas) bagi tujuan diimport ke Malaysia.

3) Pelaburan dan Industri/Investasi

Poin 1 : Pihak Johor / Melaka memohon tanggapan / maklum balas dan pandangan daripada Provinsi Kepulauan Riau / Riau sejauh mana peraturan pengenaan *Income Tax* / Cukai Pendapatan yang dikeluarkan oleh negara / kerajaan Indonesia pada 5 September 2018 terhadap pelaku usaha / entiti perniagaan yang mengimport 1,147 jenis produk konsumen seperti kereta, barang elektronik, makanan dan minuman, bahan pembinaan dan produk komoditi yang berdampak / memberi kesan terhadap pengusaha Provinsi Kepulauan Riau / Riau.

Provinsi Kepulauan Riau / Riau menginformasikan / memaklumkan akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari / pada kementerian terkait / berkenaan dan akan memberikan tanggapan / maklum balas melalui email / emel.

4) Pelancongan/Pariwisata

Poin 1 : Pihak Johor / Melaka menyampaikan / memaklumkan cadangan mewujudkan paket wisata / pakej pelancongan baru di antara Melaka/Johor - Riau/KEPRI.



Pihak Johor / Melaka mengusulkan cadangan rencana / perbincangan pembahasan berlandaskan / berkaitan *health tourism* / tempat-tempat makan yang menarik disamping tempat-tempat bersejarah.

Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju untuk menginformasikan / memaklumkan *event-event* ke dalam *website* Sosek Malindo.

c) Kertas Kerja 3 : Bidang Keselamatan dan Pengurusan Perbatasan/Sempadan

Kertas Kerja ini bertujuan untuk melaporkan Keputusan Pertemuan Tim Teknik ke-18 JKK/KK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Johor/Melaka – Tingkat Provinsi Riau/Kepri Bidang Keselamatan dan Pengurusan Perbatasan/Sempadan serta usulan pelaksanaan kesepakatan yang lalu serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

1) Keselamatan dan Pengurusan Sempadan

Poin 1 : Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan supaya pihak Kepulauan Riau / Riau boleh mendapatkan maklumat segera senarai penceramah agama yang disenarai hitam melalui Konsulat Jeneral Indonesia di Johor Bahru termasuk berkongsi maklumat mengenai “Foreign Terrorist Fighter” dari merebak di rantau ini setelah permohonan maklumat tersebut diedarkan lebih awal ke PDRM, Bukit Aman, Kuala Lumpur dan POLRI, JAKARTA.

Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan pertukaran informasi / maklumat antara instansi / agensi keselamatan Johor / Melaka dengan POLDA Kepulauan Riau / Riau terkait kasus / kes-kes Penyeludupan Narkoba / Dadah, Senjata Api, Rokok dan Minuman Keras.

Pihak Kepulauan Riau / Riau akan menginformasikan / memaklumkan bahawa perlu dilakukan komunikasi lebih



lanjut antara jawatan / Bahagian Narkotik Malaysia dengan Direktur Narkoba POLDA Kepulauan Riau / Riau dan BNN Kepulauan Riau / Riau.

Poin 2 : Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan pencegahan perdagangan orang / pemerdagangan manusia dengan cara Pertukaran informasi / maklumat antara instansi berwenang / agensi penguatkuasaan negara terlibat, Patroli / Rondaan bersama dengan lebih sering / kelebihan kekerapan dan hukuman tegas / keras kepada pelaku sindikat / ahli sindiket terlibat / terbabit.

Pihak Kepulauan Riau / Riau mengusulkan pembentukan / mengadakan forum pencegahan tindak pidana perdagangan orang / anti pemerdagangan manusia. Perlunya kerjasama antara Negeri Johor / Melaka dengan Provinsi Kepulauan Riau / Riau.

Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan supaya isu-isu penyeludupan dan pemerdagangan manusia diangkat ke peringkat yang lebih tinggi untuk penyelesaian yang lebih berkesan. Pihak Johor / Melaka perlu mengangkat perkara ini ke Putrajaya manakala pihak Kepulauan Riau / Riau mengangkat ke Jakarta. Antara pendekatan yang boleh dicadangkan adalah penggunaan teknologi tinggi seperti radar dan satelit yang lebih canggih dan juga penggunaan bot-bot penguatkuasaan yang lebih laju.

Pihak Johor / Melaka memaklumkan bahawa Jawatan kuasa Perisikan Kebangsaan Zon Selatan dan Unit Risikan Sempadan PDRM telah diwujudkan bagi tujuan pembanterasan jenayah rentas sempadan dengan lebih berkesan

2) Imigresen / Imigrasi dan Kastam / Bea & Cukai



Poin 1 : Pihak Johor / Melaka mengusulkan / mencadangkan agar pihak Kepulauan Riau / Riau memberikan kesadaran kepada rakyat agar menggunakan jalur / laluan dan dokumen yang sah serta menggunakan identitas asli / identiti asal untuk tujuan keselamatan.

Pihak Kepulauan Riau / Riau menginformasikan / memaklumkan bahawa imigrasi/imigresen sudah memberlakukan pengecekan dokumen identitas / melakukansemakan identiti asal calon pemohon pengurusan dokumen Passport dengan *berbasis single data* kependudukan pada e-ktp/ ID Card/kad pengenalan.

2. Kerjasama Pembangunan se-Wilayah Sumatera

Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera dimulai sejak tahun 2000, di Lagoi Bintan Utara, Provinsi Riau. Forum ini merupakan pertemuan para Gubernur se Sumatera untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah Sumatera dan pembangunan lintas provinsi yang berguna untuk kemajuan pembangunan di pulau Sumatera dan Sekitarnya. Pertemuan tersebut diselenggarakan setiap tahun dan lokasinya ditentukan setiap tahun di salah satu provinsi se wilayah Sumatera.

a) Rapat Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat

Rapat puncak Forum Gubernur Se-Sumatera dilaksanakan pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019 bertempat di Ballroom Grage Hotel Bengkulu.

I. Pemaparan dari Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Rohidin Mershyah dengan menitik beratkan :

- a. Pulau Sumatera yang terdiri 10 Provinsi dapat saling mendorong perekonomian dengan meningkatkan konektivitas dan komoditas.



- b. Mendorong Ketersambungan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Jembatan Selat Sunda untuk mengendalikan inflasi.
- c. Konektivitas perlu dibangun dan perlu terkoneksi baik Tol Timur, Tol Barat dan wilayah tengah agar benar-benar terbentuk penguatan dan keseimbangan perekonomian Sumatera.
- d. Selain pembangunan konektivitas laut perlu pembangunan konektivitas udara dengan mendorong seluruh Bandara di Sumatera menjadi Bandara Internasional dan dikelola oleh PT Angkasa Pura.
- e. Pengusulan KEK agar dilakukan secara serentak sehingga pembahasan dapat dilakukan bersama agar dapat saling mendukung baik data konektivitas dan dukungan data lainnya.
- f. Untuk komoditas perlu adanya sharing unggulan komoditas, dan untuk mayoritas komoditas perlu dibangun dan adanya kerjasama sebagai komoditas Nasional misalnya Kopi dengan adanya pergudangan tersentralisasi dimana perlu dikonektivitaskan pemasarannya serta perlu juga mendorong nilai tambah komoditas tersebut.
- g. Komitmen bersama untuk menjaga kelestarian kawasan lindung karena Sumber Daya Alam tersebut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera.

II. Pemaparan dari Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bapak Oktorialdi yang menyampaikan :

- 1) Asumsi Makro 2020-2024 adalah Nilai Tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor.



- 2) Sumatera berpotensi menjadi the new growth engine of Indonesia melalui tema hilirisasi industri berbasis komoditas.
- 3) Pengembangan Ekonomi Sumatera tidak hanya berdampak lokal tapi juga akan memicu pertumbuhan Nasional.
- 4) Pengembangan Industri Hilir berbasis komoditas menjadi kunci pertumbuhan di Sumatera.
- 5) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024 yakni memantapkan perannya dalam perekonomian Nasional sebagai Sentra Produksi Komoditas dan Industri Pengolahan berbasis Sumber Daya Alam serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung nasional.

III. Paparan Pakar Hukum dan Tata

- 1) membandingkan wilayah barat dan wilayah timur dimana secara umum wilayah barat sudah maju dan wilayah timur tidak. Berdasarkan realitas pelaksanaan belum tentu barat itu maju semua sehingga bukan menjadi ukuran kemajuan suatu wilayah, seharusnya keseimbangan antara wilayah dan kabupaten/kota.

JJJ. Saatnya Sumatera bersatu melakukan pengembangan ekonomi dan kebudayaannya. Hal ini karena Sumatera unggul dengan pulau yang Negara Bapak Jimly Assidqi :

- 1) Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera belum terpadu dan belum terintegrasi sehingga perlu adanya Kebijakan Pembangunan yang terintegrasi dan terpadu.
- 2) Sejak reformasi, muncul ide dengan terbanyak provinsinya.
- 3) Diharapkan setelah pertemuan ini dengan adanya piagam rafflesia yang mengisyaratkan regional ekonomi (pembangunan wilayah



terpadu) maka perlu adanya lanjutan dengan ratas yang dihadiri oleh Presiden.

IV. Penyerahan Bendera Petaka Rapat Koordinasi Gubernur dari Gubernur Bengkulu kepada Gubernur Riau yang akan menjadi tuan rumah penyelenggara Rapat Koordinasi Gubernur Se - Sumatera Tahun 2020.

V. Diskusi Gubernur se-Sumatera dipimpin oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah.

1. Bengkulu

Poin Utama yakni konektivitas dan Komoditas Sumatera.

Pengelolaan Komoditas Unggulan Sumatera. Unggulan Sumatera yaitu Kopi dimana 70 % produk kopi berasal dari Sumatera namun masih dalam bentuk kopi mentah dan belum dalam bentuk produk. Untuk itu perlu diadakan *Sumatera Coffee Trading House* yaitu dengan menge-blend masing-masing kopi yang menjadi produk masing-masing provinsi di Pulau Sumatera

3) Sumatera Trading House akan dibahas lebih dalam di

Pertemuan Bappeda Se-Sumatera terkait mapping komoditas masing-masing provinsi.

Aceh bersepakat dengan Momenandum Of Rafflesia namun menggarisbawahi dengan hal-hal yang bersifat mikro dengan coba melakukan pressure terhadap pemerintah bahwa indikator pemilu dan pemilu presiden.
2. Aceh

Adanya kerjasama regional IMTGT dan jika diselaraskan dengan tema hari ini maka orientasinya harus ekspor bukan lagi internal di Sumatera. Negara terdekat yang dapat menjadi tujuan ekspor adalah Malaysia dan Thailand. Fakta nya 80 % manfaat IMTGT dinikmati oleh Malaysia dan untuk pulau Sumatera yang paling menerima manfaat adalah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

3) Pilih komoditas yang dapat dijual di IMTGT.
- 2 Sumatera Utara
Edy Rahmayadi
diwakili oleh
Asisten
Jumsadi Damanik

Untuk Konektivitas maka perlu memperhatikan kesiapan/kemampuan daerah tersebut agar jangan menjadi boomerang di daerah sendiri dimana penduduk daerah yang keluar bukan orang luar ke daerah sehingga perekonomian bukan meningkat namun menurun.

2) Perlu adanya kerjasama komoditas untuk diekspor.
- 3 Riau

1) Pulau Sumatera menjadi salah satu penghasil devisa yang besar melalui migas, mineral, kelapa, karet, kopi, perikanan dan pariwisata.



- 2) Mendukung Lampung menjadi Alternatif Ibukota Negara
- 3) Sepakat dengan Lampung tidak hanya jalan Tol Laut namun juga melalui darat khususnya dari hutan hulu Kabupaten Rokan Hulu ke Pasaman (Sumatera Barat), dan Padang lawas (Sumatera Utara) agar ditingkatkan menjadi jalan nasional.
- 4) Mohon dukungan Provinsi Jambi untuk pembangunan jalan tol Riau-Jambi.
- 5) Mohon dukungan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendorong Kementerian Perhubungan merealisasikan Proyek Kereta Api yang masih dipending dan memohon ke Bappenas agar jangan dipending karena merupakan program Presiden Jokowi.
- 6) Hilirisasi Sawit menjadi B50 dan B100 sehingga menjadi salah satu alternatif energi BBM dapat membuat peningkatan harga sawit dan karet yang menjadi produk
- 7) unggulan provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini melalui pembatasan ekspor CPO
- 8) Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga perlu mendapat perhatian dan mohon kepada Bappenas agar dapat dimasukkan ke RPJMN.
- 9) Perikanan juga merupakan potensi besar di Sumatera maka perlu bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat agar potensi laut diberdayakan agar pendapatan para nelayan dapat meningkat.
- 10) Pulau rupa ada pasir putih 24 km agar masuk ke Kawasan ekonomi khusus.

4 Sumatera Selatan

- Sumsel bersedia menjadi Sekretariat Forum
- 1) Gubernur Se- Sumatera
 - 2) Dengan 11 Komoditas yang menjadi unggulan Sumatera maka perlu adanya penugasan di masing-masing Provinsi punya agar Sumatera Commodities Trading House ini tercapai dengan maksimal.
 - 3) Hilirasi (produksi B50-B100) perlu ditunjang dengan Regulasi karena BBM dikuasai oleh Pertamina dan belum menjadi kewenangan daerah.
 - 4) Perlu peningkatan kualitas SDM karena masih kurangnya balai latihan kerja yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai.
 - 5) Kontribusi PDB Sumatera 21,58 sementara Jawa 58,48 lebih besar dan ini dikarenakan perbedaan fokus Sumatera dan Jawa. Penyampaian terhadap fokus-fokus pendanaan



desa yang telah diberikan pemerintah pusat untuk masing-masing pulau harus disesuaikan, misal antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa menjadi hal yang berbeda terhadap pembangunan desanya.

- 6) Untuk Pembangunan Sumatera Terpadu diperlukan : Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah (PSN), Hilirisasi Komoditas, Pengembangan SDM.

5 Bangka Belitung

- 1) Bangka Belitung bersedia menjadi tuan rumah pertemuan Bappeda se-Sumatera untuk perumusan rencana aksi dari Momerandum Of Rafflesia.
- Kepala Bappeda se-Sumatera untuk
- 2) merumuskan konsep PPA.
- Pembangunan Jembatan antara Babel dan
- 3) Sumsel.
- Perlu adanya penekanan terkait jenis KEK apa
- 4) yang diusulkan.
- 5) Perlu juga Konektivitas Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan.
- 6) Sumatera Commodities Trading House harus dengan professional dengan pengawasan pemerintah, jangan dikelola sepenuhnya oleh Sumatera.
- 7) Sektor pertambangan juga harus diperhatikan sebagai salah satu komoditas Sumatera.
- 8) Perlu adanya pembagian Vokasi sesuai dengan potensi daerah.

6 Jambi

Provinsi Jambi bersedia menjadi Pusat Logistik nasional terkait bencana se-Sumatera.

7 Sumatera Barat

Menambahkan lokasi pelabuhan di setiap provinsi saat pertemuan lanjutan pembahasan rencana aksi di Provinsi Bangka Belitung.

Agar bersama membahas dengan Kementerian/Dinas LHK untuk Kawasan hutan yang akan diretas untuk menjadi jalan-jalan penghubung seperti jalan tol.

Perlu adanya penambahan poin yakni pengawasan Bersama terkait Illegal Fishing dan Narkoba pada Momerandum Of Rafflesia.

Perlu adanya aktualisasi terhadap hasil rapat.

Dari Riau sudah dibangun dan Rokan Hulu belum namun jika untuk menjadi nasional belum bisa memenuhi syarat karena jalannya masih tanah, untuk itu diharapkan dibangun dulu baru diusulkan menjadi jalan nasional.

Mengusulkan Lampung sebagai daerah alternative lokasi ibukota negara.

9 Lampung



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

- 2) Peningkatan jalan nasional non tol.
 - 3) Kopi Robusta di Sumatera jangan diblend karena punya citra rasa tersendiri
 - 4) Menambahkan Point dalam Momerandum Of Rafflesia mendukung provinsi lampung sebagai ibukota negara.
 - 5) Meminta Pemerintah Pusat untuk membagi DBH untuk produk Sawit, karet dan hortikultura.
 - 6) Membuat nilai tambah masig-masing komoditas untuk mendukung sebagai bahan logistic nasional.
 - 7) Mendorong pembangunan rendah karbon.
 - 8) Diberi kesempatan untuk melakukan rehabilitasi Kawasan Konservasi.
- 11 Bappenas
- Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan Bapak Okto
- 1) Bappenas akan ada road show rancangan awal RPJMN dimana untuk sumatera tujuannya adalah SUMUT.
 - 2) Sumatera Commodities Trading House sangat bagus dimana diharapkan masing-masing Provinsi memiliki saham dalam membentuk ini dimana akan ada share profit.

VI. Hasil Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera tertuang dalam Piagam Momerandum Of Rafflesia dengan poin sebagai berikut :

1. Mendorong konektivitas Pulau Sumatera melalui peningkatan pembangunan ruas jalan jalur lintas barat dan lintas timur Pulau Sumatera yang terkoneksi antara Selat Malaka dan Samudera Hindia;
2. Mendukung pelaksanaan program tol laut melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Pulau Sumatera dan penguatan posisi Pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain Selat Malaka (Pulau Sumatera-Pulau Jawa, Pulau Sumatera-Pulau Kalimantan);
3. Mendukung percepatan penetapan dan pengembangan KEK Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu, KEK Karimun dan Batam Provinsi Kepulauan Riau, KEK Pariwisata Sungai Iiat dan KEK Pariwisata Tanjung Gunung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera serta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya di Pulau Sumatera yaitu KEK Pelabuhan Tanjung Buton, KEK Kuala Enok dan KEK Pulau Rupert Provinsi Riau serta KEK Pariwisata Mandeh dan KEK Pariwisata Siberut Mentawai Provinsi Sumatera Barat;
4. Meningkatkan konektivitas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui percepatan realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.



5. Mendukung pembangunan provinsi kepulauan di Pulau Sumatera melalui percepatan realisasi pembangunan Jembatan Selat Bangka yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan serta Jembatan Batam–Bintan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan;
6. Membangun Sumatera Commodities Trading House yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta berorientasi ekspor;
7. Mendorong peningkatan peran Pulau Sumatera sebagai pendukung logistik komoditas pangan untuk Pulau Jawa;
8. Mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternative untuk dikaji menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional;
9. Dalam upaya mempersiapkan masa depan anak bangsa dan upaya perlindungan perempuan dan anak perlu dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat desa melalui APBDes yang dikoordinir oleh Gubernur;
10. Bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran narkoba, *human trafficking* dan *illegal fishing*.

3. Kerjasama Provinsi Kepulauan Melalui Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan

a) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Ambon tanggal 10 Agustus 2005 di Kota Ambon, dengan anggota terdiri dari 8 (delapan) Provinsi Kepulauan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi yang bergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terdiridari 8 (delapan) Provinsi Kepulauan yaitu:

- 1) Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Provinsi Maluku
- 3) Provinsi Maluku Utara
- 4) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur



- 6) Provinsi Sulawesi Utara
- 7) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 8) Provinsi Sulawesi Tenggara

Dasar Pelaksanaan Kegiatan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018;
- 3) Surat Keputusan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Gubernur Kepri sebagai Ketua BKS periode 2013-2018; dan
- 4) Anggaran Dasar Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Tahunan BKS ini dalam rangka:

- 1) Memfasilitasi Pertemuan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.
- 2) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Provinsi Kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan.
- 3) Mewujudkan program dan usaha bersama diberbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan.
- 4) Berusaha mendorong Pemerintah untuk mempercepat terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang pada pasal 27 s/d 30.

Rapat teknis dilaksanakan di Jakarta dan Ambon, membahas berbagai program/kegiatan Badan Kerjasama yang disusun secara bersama sesuai dengan isu utama tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan. Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan telah mendapatkan pengakuan dan perlakuan khusus dari pemerintah dan usaha bersama antar Provinsi Kepulauan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 28, 29 dan Pasal 30. Oleh karena itu pada Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan ini mendorong agar Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri RI dan



Menteri Keuangan segera menindaklanjuti Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menegaskan kembali prinsip perjuangan Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Kepulauan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) untuk tetap memperjuangkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020 untuk menjadi Undang-Undang.
- 3) Terpilihnya Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan periode 2019-2024 yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. Ali Mazi, SH.

4. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang

a) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: 100/430/DP3AP2KB/X/2017 dan 120.23/245/033.4/2017 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2017. Perjanjian Kerjasama ini diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Kerjama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kepulauan Riau di wilayah Provinsi Jawa Timur dan warga Provinsi Jawa Timur di Wilayah



Provinsi Kepulauan Riau. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber pendanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Hasil dari kerjasama ini adalah terjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang di wilayah masing-masing pemerintah Provinsi, selain itu hasil dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh kedua-dua provinsi di wilayah masing-masing.

b) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah adanya hambatan dalam proses pemulangan perempuan dan anak korban RSUD kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang ke daerah asal karena alamat yang tidak jelas. Solusi yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi di Provinsi Jawa Timur untuk menelusuri alamat dan identitas korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat dipulangkan ke daerah asal.

5. Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Perjanjian Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: 060.1/216/BPPPA/X/2016 dan 359/Kep.75/IIB/PKHPP/2016 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2016. Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Lampung dituangkan dalam naskah kesepakatan dengan Nomor: 060.1/215/BPPPA/X/2016 dan 800/3221-BPPMD/2016 yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2016. Perjanjian Kerjasama ini diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.



Kerjasama ini dalam bentuk Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan orang, antara lain Penanganan Pengaduan; Pertukaran Informasi; Perlindungan Sementara; Pelayanan Pemulihan Kesehatan; Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial; Bantuan Hukum; dan Pemulangan ke Daerah Asal.

Dari Perjanjian Kerjasama tersebut didapatkan hasil bahwa penanganan korban dikembalikan ke daerah asal. Secara keseluruhan korban yang ditangani oleh P2TP2A sebanyak 143 orang dengan rincian daerah asal, sebagai berikut:

- Provinsi Jawa Tengah: 5 orang
- Provinsi Jawa Timur : 2 orang
- Provinsi Jawa Barat : 5 orang
- Provinsi Sumatera Utara: 2 orang
- Provinsi Banten: 1 orang
- Provinsi Sulawesi Tenggara: 2 orang
- Provinsi Lampung: 1 orang
- Provinsi DKI Jakarta : 1 orang
- Provinsi Kepri: 126 orang

6. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dituang didalam Kesepakatan Bersama Nomor : 01/PKS-KDH/KEPRI/II/2019 dan Nomor : 120-001/PKS/GSB-2019 tanggal 20 Februari 2019. Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wasitawan.

Dari hasil kerjasama ini diharapkan terciptanya kemajuan daerah bidang pariwisata dan lainnya sesuai dengan kebutuhan para pihak sehingga jika dalam pelaksanaan kerjasama ini pada saat suatu wilayah atau daerah baik di Provinsi Kepulauan Riau atau Provinsi Sumatera Barat mengalami kekurangan dan kelebihan dalam suatu bidang kerjasama maka daerah tersebut dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pihak tersebut.



7. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dituang didalam Kesepakatan Bersama Nomor : 37/Kdh.KKA/MoU/X dan Nomor : 32/MOU-KDH/KEPRI/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Kerjasama ini dengan maksud sebagai dasar melaksanakan kerjasama tentang penyediaan anggaran pembangunan jembatan selayang pandang (SP) II di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari hasil kerjasama ini diharapkan membantu pembangunan Jembatan Selayang Pandang (SP) II di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas.

8. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Ombudsman Republik Indonesia

Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Ombudsman Republik Indonesia ini dituang didalam Kesepakatan Bersama Nomor : 34/ORI-MOU/IV/2019 dan Nomor : 26/MoU-KDH/KEPRI/IV/2019 tanggal 26 April 2019. Kerjasama ini dengan maksud sebagai pedoman untuk mensinergikan potensi dalam melaksanakan kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

9. Kerjasama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kerjasama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini dituang didalam Nota Kesepahaman Nomor : Oks.2/PHPL/JASLING/HPL.2/5/2019 dan Nomor : 27/MoU-KDH/KEPRI/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. Kerjasama ini dengan maksud untuk bekerjasama dan bersinergi mengembangkan potensi wisata alam pada kawasan Hutan Produksi di Provinsi Kepulauan Riau.



10. Kerjasama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau

Kerjasama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau ini dituang didalam Nota Kesepahaman Nomor : 1261/HK.010/J.10/2019 dan Nomor : 120/2237/DP3AP2KB/SET tanggal 26 November 2019. Kerjasama ini dengan maksud untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas.

Dari kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dan mendorong terwujudnya sinergitas paradigm pembangunan berwawasan kependudukan dalam pembangunan.

11. Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata Provinsi Kepulauan Riau

Sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dan nilai ekonomis tinggi. Potensi yang ada perlu dikelola dan ditangani secara arif dan bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat menjadi modal dasar yang akan mendukung kebutuhan kelangsungan pembangunan. Agar dapat berjalan lancar dan diharapkan akan dicapai hasil-hasil yang lebih maksimal, dilakukan pengelompokan wilayah pembangunan dengan mengkoordinasikan, mensinkronkan program pembangunan antar pemerintah daerah ke dalam beberapa kawasan sesuai dengan keberadaan lokasi agar diperoleh sinergitas pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu kawasan pengembangan dan pembangunan tersebut diantaranya adalah Kawasan Selat Karimata.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut maka Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu diantara empat provinsi yang berada di dalam Kawasan Selat Karimata yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau sendiri, sehingga Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya ikut melibatkan diri di dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan Selat Karimata.



Kegiatan akan dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk dari berbagai unsur Kementerian dan instansi yaitu :

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kementerian Perhubungan;
- Kementerian Pariwisata;
- Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
- Kementerian Pertahanan;
- Kementerian/lembaga terkait Lainnya;
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Pemerintah Provinsi Jambi;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Pesisir Selat Karimata;
- Event Organizer dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:

(1) Pelaksanaan Rapat Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata.

Rapat Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 November 2019 di Ruang Rapat Hotel Pelangi Tanjungpinang dipimpin dan dibuka oleh Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan, hasil pembahasan sebagai berikut :

No.	Pembahasan
-----	------------



1.	- Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Tanjungpinang dengan sasaran pembahasan terhadap perjanjian kerjasama kawasan selat karimata dengan outline pembahasan yang terdiri dari Arah Kebijakan Pemerintah, Perkembangan Kerjasama Selat Karimata, Makna Kerjasama dan Harapan ke depan. Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama terkait rencana aksi dan implementasi, permasalahan dan dampak yang dihasilkan dalam kerjasama, Perjanjian kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Terpadu Selat Karimata dengan objek dan ruanglingkup sebagai berikut : ➤ Objek Kerjasama - Pengawasan, pengendalian, pengamanan; - Penelitian dan pengembangan; - Pemanfaatan dan pelestarian; - Pengembangan kerjasama ekonomi regional dan/atau internasional ➤ Ruang Lingkup - Kelautan dan Perikanan; - Lingkungan Hidup; - Pariwisata
2.	- Permasalahan dalam kerjasama sering disebabkan oleh karena ketidak jelasan aspek apakah yang hendak dikerjakan. Dalam kaitan ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi alat mempersatu dalam proses kerjasama, Kerjasama yang dibangun adalah semata untuk pelayanan publik (infrastruktur services), ataukah dalam rangka pengembangan potensi, Bila pengembangan potensi, apakah sudah ada “common branding” (cluster branding), adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : - Kerjasama belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. - Koordinasi antar provinsi dan provinsi dengan kabupaten/kota belum berjalan optimal terutama dalam mengimplementasikan program/kegiatan yang tertuangdalam lampiran PKS - Kelembagaan kerjasama belum berjalan “optimal” - Belum jelas “bentuk kerjasama” yang disepakati “Obyek kerjasama” dan “Lingkup Kerjasama” terlalu luas, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak “fokus”
3.	- Harapan kedepan : - Perlu disusun bersama “Common Branding/Cluster Branding” Pengelolaan Bersama Selat Karimata sebagai titik awal pelaksanaan kerjasama antar daerah di Selat Karimata



	b. Perlu direview “Masterplan Selat Karimata” secara bersama-sama dan disusun bersama “obyek kerjasama” yang akan dilakukan sehingga kerjasama yang dilakukan lebih fokus c. Menerapkan perhitungan 3 R (Role=Berbagi Peran, Risk=Berbagi Resiko, Revenue=Berbagi Pendapatan) dalam Perjanjian kerja sama pengelolaan Selat Karimata, sehingga kerjasama yang disepakati dapat implementatif d. Dalam Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata tidak harus melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota namun tergantung obyek kerjasama yang akan dikerjasamakan; e. Perlu dipikirkan bentuk kelembagaan kerjasama pengelolaan Selat Karimata yang mampu mensinergikan program/kegiatan pengelolaan kawasan Selat Karimata (berfungsi sebagai “clearing house”)
--	---

(2) Kesimpulan dan Saran Pelaksanaan

Kerjasama pengelolaan Selat Karimata yang tertuang dalam lampiran dari kesepakatan empat Gubernur tentang pengelolaan Selat Karimata, belum teroptimalkan dalam implementasinya, yang dapat diimplementasikan saat ini adalah kerjasama dengan sasaran pengembangan pariwisata dengan dilaksanakannya Sail Selat Karimata sebagai Sail Indonesia. Kesepakatan pengawasan memerlukan koordinir Kementerian dalam penerapannya di 4 provinsi yang bekerjasama agar kesepakatan ini dapat di wujudkan dikarenakan adanya benturan regulasi dan kepentingan dari masing-masing provinsi dalam hal penetapan zonasi perairan provinsi. Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan di Kawasan Selat Karimata memerlukan peran kementerian untuk dalam implementasinya dengan perencanaan titik tangkapan dan distribusi serta pemasaran hasil sumber daya kelautan di 4 provinsi dengan konsep kerjasama dimana titik penangkapan, budidaya, distribusi dan pemasarannya serta kemungkinan konsep yang dapat diterapkan dengan menghasilkan manfaat bagi 4 provinsi.

Oleh karena itu diperlukan masterplan pengelolaan perairan selat karimata agar dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melakukan pengelolaan agar teridentifikasi potensi dan peluang sumber daya yang dapat dikerjasamakan, agar dapat disusun rencana



aksi yang terukur dan terarah terhadap objek kesepakatan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan Selat Karimata.

Dalam pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a. Konsep kerjasama harus perlu adanya *Masterplan* pengelolaan Selat Karimata
- b. Penyusunan Rencana Aksi untuk mengimplementasi objek kesepakatan agar lebih fokus dalam pemenuhan
- c. Perlu dilakukan review terhadap objek kesepakatan yang mana masih dapat dilakukandan yang harus diperbarui atau di hilangkan
- d. Perlunya peran Kementerian untuk mengkoordinir implementasi dari kesepakatan 4 provinsi.
- e. Memperhatikan faktor keunggulan dari masing-masing Provinsi dan berdampak pada manfaat bagi setiap provinsi yang bekerjasama

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1) Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Pihak Ketiga

Perjanjian kerjasama antar daerah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan beberapa daerah terkait pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Nomor 186/MOU-DINKES/XI/2018 tanggal 21 November 2018
- b) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 01/MOU-DINKES/II/2019 tanggal 2 Januari 2019



- c) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 192/MoU-DINKES/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018
- d) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Awal Bros Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 185/Mou-Dinkes/XI/2019 tanggal 21 November 2019
- e) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 02/Mou-Dinkes/I/2019 tanggal 2 Januari 2019
- f) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 191/Mou-Dinkes/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018
- g) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Nomor 06/Mou-Dinkes/I/2019 tanggal 2 Januari 2019
- h) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018. Nomor 10/MoU-DINKES/I/2019 tanggal 2 Januari 2019
- i) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 03/MOU-DINKES/I/2019 tanggal 2 Januari 2019



- j) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 011/Mou-DINKES//2019 tanggal 2 Januari 2019
- k) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 08/MOU-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- l) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Nomor 05/MoU-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- m) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Graha Hermine Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 014/Mou-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- n) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 04/Mou-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- o) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2018. Nomor 190/Mou-DINKES/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018
- p) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 09/Mou-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- q) Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Kanker “Dharmais” dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan



Riau Tahun Anggaran 2019. Nomor 013/MoU-DINKES//2019 tanggal 23 Januari 2019

- r) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 12/Mou-Dinkes//2019 tanggal 2 Januari 2019
- s) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Kepulauan Riau. Nomor 196/Mou-Dinkes/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018
- t) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Nomor 07/MOU-DINKES//2019 tanggal 2 Januari 2019

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan perjanjian kerjasama dengan Global Fund melalui Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Malaria dan Tuberculosis. Global Fund merupakan sebuah lembaga pendanaan internasional untuk kesehatan. Institusi pengelola utama Global Fund terletak di Jenewa, Swiss. Perjanjian kerjasama dengan pihak Global Fund dirincikan sebagai berikut :

- a) Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sebagai Principal Recipient GF-ATM Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Sub Recipient GF-ATM Dinkes Provinsi Kepulauan Riau Komponen AIDS dalam pelaksanaan proyek "*Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*" nomor HK.03.01/3/0025.05/2018 (berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020)
- b) Perjanjian kerjasama antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan Republik



Indonesia selaku *Authorized Principle Recipient* Malaria dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku Kepala *Sub Recipient* nomor HK.03.01/1/1148/2018 (berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020)

- c) Perjanjian kerjasama antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung selaku *Authorized Principle Recipient* Hibah Global Fund AIDS-TB dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku *Sub Recipient* GF ATM Komponen Tuberkulosis Nomor HK.05.01/1/33.9/2018 (berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2020)

Hasil (output) dari kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan Prevalensi HIV/AIDS, meningkatkan penyembuhan Kasus TB Paru BTA+ dan pengendalian kasus malaria di Provinsi Kepulauan Riau.

2) Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Tanjung Uban dengan Pihak Ketiga

a) Kerjasama Antar Instansi

Kerjasama antar instansi di daerah RSUD ENGKU HAJI DAUD Tahun 2019 sebagai berikut :

1) BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang

BPJS adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah ENGKU HAJI DAUD dengan BPJS yang tertulis pada MOU Nomor 204/KTR/II-9/2018 dan Nomor 26/RSUD/MOU/XII/2018 tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan. Ruang lingkup Ruang lingkup dan prosedur meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat



lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Jangka waktu perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2019.

Perjanjian kerjasama antara BPJS KESEHATAN CABANG TANJUNGPINANG dengan RSUD Tanjunguban yang tertulis pada MOU Nomor 35/KTR/II-9/0519 dan Nomor 15/PKS/RSUD/IV/2019. Ruang lingkup dan prosedur meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Jangka waktu perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 APRIL 2019.

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban dengan BPJS kesehatan regional II yang tertulis pada MOU Nomor 05/KTR/II-9/0218 dan Nomor 05/MOU/RSUD/II/2018 tentang penerapan bridging system antara SIMRS dengan Vurtual Claim. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini pengembangan simRS, pemberian hak akses simrs, pengujian simrs, dan melakukan user acceptance test. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban dengan BPJS berlaku untuk jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal 1 maret 2018 sampai dengan tanggal 31 desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama antara BPJS KESEHATAN CABANG TANJUNGPINANG dengan APOTEK RSUD Tanjunguban yang tertulis pada MOU Nomor 214/KTR/II-9/1217 dan Nomor 24/MOU/RSUD/XII/2017. Tentang pelayanan obat penyakit kronis dan obat kemoterapi bagi peserta jaminan kesehatan. Ruang lingkup dan prosedur meliputi pemberian pelayanan kefarmasian pelayanan obat penyakit kronis dan obat kemoterapi sesuai ketentuan yang berlaku. yaitu Jangka waktu perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2018.

2) BPJS Ketanagakerjaan



Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan BPJS ketenagakerjaan yang tertulis pada MOU Nomor: PKS/79/122018 dan Nomor 24 /RSUD/MOU/XII/2018 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS ketenagakerjaan. Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi peserta program JKK di rumah sakit umum daerah kepri tannjung uban. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi: prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta, biaya dan tatacara pembayaran pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban, administrasi, dan sanksi. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku sampai 31-12-2020 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

3) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terdiri dari 3 pelayanan yaitu : pelayanan kesehatan rujukan rawat inap kelas III bagi masyarakat kabupaten bintan TA 2017. Tertuang dalam MOU: 134.4/dinkes/1/044/2017 dan 1/mou/rsud/I/2019. Jangka waktu perjanjian selama tahun anggaran 2019.

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tentang Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan dinas kesehatan kabupaten bintan tentang Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan rujukan rawat inap kelas III bagi masyarakat kabupaten bintan tahun 2018 yang tertulis dalam Nomor: 1/RSUD/MOU/I/2018. ditandatangani pada hari selasa, tanggal 2 Januari 2017.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 januari 2017 s/d 31 desember 2017. Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kedua belah pihak sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat



pemberitahuan dari pihak pertama untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tentang bantuan pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan serta rawat inap bagi usia lanjut (USILA) Tahun 2015 yang tertulis pada MOU Nomor 03/MOU/RSUD/I/2015 dan Nomor : 1634.4/DINKES/I/045/2015, ditandatangani pada hari Jumat tanggal 02 (dua) bulan Januari Tahun 2015. Ruang lingkup kerjasama pelayanan kesehatan bagi usila adalah usila, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik rujukan, pelayanan operasi, penggunaan obat – obatan, penggunaan peralatan penunjang diagnostik. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai di tandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 desember 2019 serta berlaku bagi usila yang telah di rawat sebelumnya, jika dikehendaki oleh kedua pihak perjanjian kerjasama ini dapat dilanjutkan.

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tentang pengelolaan limbah medis yang tertulis pada MOU Nomor 02/MOU/RSUD/I/2015 dan Nomor : 134.4/kes/012, ditandatangani pada hari senin tanggal 15 januari 2018. Ruang lingkup akan mengirimkan limbah medis kepada pihak kedua untuk dilakukan pengelolaan limbah medis dan transportasi untuk pengiriman limbah medis tidak termasuk dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 31 desember 2018 dan dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan perjanjian tertulis bersama kedua belah pihak maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu kurang dari 1 bulan sebelum keputusan perjanjian tersebut.

4) Koperasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Koperasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban tentang Surat



Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2011. Jaminan dalam perjanjian ini adalah digunakan sebagai lahan pembangunan gedung kantin Koperasi Bakti Husada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban.

Perjanjian Sewa Menyewa tanah ini berlaku selama 25 (Dua Puluh Lima) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2036.

5) Rumah ATM

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Rumah ATM Mandiri tentang Perjanjian Sewa Ruangan ATM Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019. Peranjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Tanjung Uban Kepulauan Riau dengan Rumah ATM Mandiri berlaku 2 Tahun.

6) Badan Narkotika Nasional

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Narkotika Nasional yang tertulis dalam MOU Nomor: PKS/01a/II/2019/BNNP-KEPRI dan Nomor: 40/PKS/RSUD/II/2019 ditandatangani pada hari rabu, tanggal 13 bulan mei tahun 2015. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi komponen instansi pemerintah melalui pemberian penguatan dorongan dan fasilitas layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 31 DESEMBER 2019.

7) Ikatan Mubaligh Kecamatan Seri Kuala Lobam

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Ikatan Mubaligh Kecamatan Seri Kuala Lobam yang tertulis dalam MOU Nomor: 10/RSUD/MOU/III/2015 tentang Pelayanan Rohani Bagi Pasien RSUD



Tanjung Uban. ditandatangani pada hari rabu, tanggal 2 bulan Maret tahun 2015. Ruang lingkup perjanjian memberikan bantuan kepada pasien dan atau keluarga bila membutuhkan pendampingan rohaniawan pelayanan rohani dalam menghubungi rohaniawan, menyiapkan kebutuhan dalam acara spiritual sesuai kepercayaan agama pasien, memfasilitasi waktu dan tempat bila diperlukan. Jangka waktu kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku apabila kedua belah pihak tidak ada yang keberatan.

8) UNIT TRANFUSI DARAH PMI

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan UNIT TRANFUSI DARAH PMI tertuang dalam MOU 25/PKS/RSUD/I/2019, 01/PKS/UTD/KOTA TPI/IX/2019 Tentang pelayanan darah. Dengan jangka waktu perjanjian 2 tahun sejak ditandatangani.

9) RSUD RAJA AHMAD TABIB

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan RSUD RAJA AHMAD TABIB tertuang dalam MOU 13/PKS/RSUD/i/2019, 015//mou-rsud/i/2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan jangka waktu perjanjian 2 tahun sejak ditandatangani.

10) RS RUMKITAL DR MIDYATO SURATANI TANJUNGPINANG

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan RS RUMKITAL DR MIDYATO SURATANI TANJUNGPINANG tertuang dalam MOU 8/pks/rsud/i/2019, dan PKS/01/i/2019 Tentang pelayanan dokter mitra. Dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 31 Desember 2019.

11) Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Jaminan Kesehatan



Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam MOU 3/MOU-DINKES/II/2019, dan 5/PKS/RSUD/II/2019 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Kepulauan Riau. Dengan jangka waktu 12 Bulan.

12) KLINIK ERNEST

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan KLINIK ERNEST tertuang dalam: MOU 12//RSUD/MOU/III/2017, Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dengan jangka waktu 3 tahun.

13) JAMPERSAL

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan JAMPERSAL tertuang dalam: MOU 134.4/KES/03/2019, Tentang Pemberian Pelayanan Program Jaminan Persalinan Tahun 2019. Dengan jangka waktu 1 tahun.

14) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tertuang dalam: MOU 3/pks/rsud/rsud/i/2019, Tentang Pemberian Pelayanan Program Jaminan Persalinan Tahun 2019. Dengan jangka waktu 1 tahun.

15) Rohaniawan

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan ROHANIAWAN tertuang dalam: MOU 19/rsud/MOU/III/2019, Tentang PELAYANAN KEROHANIAWAN.

16) Pengelolaan Limbah Medis

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan KLINIK TIARA MEDIKA



tentang Pengelolaan Limbah Medis tertuang dalam MOU nomor : 32/PKS/RSUD/VII/2019, nomor : 27-tks/peb/vii/2019 ruang lingkup limbah medis kepada pihak kesatu untuk dilakukan pengelolaan limbah medis dan transportasi untuk pengiriman limbah medis tidak termasuk dalam perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian berlaku 2 tahun sampai tanggal 31 juli 2020.

b) Kerjasama Dengan Perusahaan

1) PT Bintang Resort Cakrawala

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Bintang Resort Cakrawala tentang Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan yang tertulis dalam MOU Nomor: 066/BRC/HRD/II/2017 dan Nomor: 13/RSUD-UM/II/2017 ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 13 MARET 2017. Pokok perjanjian ini memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan profesional bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan dijamin meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi, anatomi, elektromedik) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pemberian resep obat-obatan dan termasuk semua jasa yang umumnya diberikan Rumah Sakit.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai Pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi mengenai kerja sama ini pada setiap akhir tahun.

2) PT Total Bangun Persada Tbk

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Total Bangun Persada Tbk tentang Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan yang tertulis dalam MOU Nomor: 01/X/2010 ditandatangani pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010. Pokok perjanjian ini memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan profesional bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan dijaminakan meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang



diagnostik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi, anatomi, elektromedik) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pemberian resep obat-obatan dan termasuk semua jasa yang umumnya diberikan Rumah Sakit.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai Pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi mengenai kerja sama ini pada setiap akhir tahun.

3) PT Pertamina

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Pertamina (PERSERO) Unit Pemasaran 1 tentang Pemborongan Pekerjaan Layanan Jasa Kesehatan yang tertulis dalam MOU Nomor: 587/koo154/viii/2018-s8 dan 14/mou/rsud/v/2018. Hak dan kewajiban dalam perjanjian ini Memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pekerja, keluarga pekerja dan pensiunan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Prosedur pelayanan kesehatan bagi pihak pasien, apabila tidak membawa surat pengantar atau kartu berobat PISA dan Pensiun maka seluruh akibat dari kewajiban – kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan dan diberlakukan sebagai pasien umum.

Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Pertamina selama 3 tahun sejak tanggal 1 mei 2018 sampai dengan tanggal 30 april 2021 dan dapat diperpanjang otomatis selama 2 tahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4) PT Bintan Hotels (Banyan Tree, Angsana, Tropical Ametyhst, Management Banyan tree Resorts & SPA)

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Bintan Hotels tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan yang tertulis dalam MOU



Nomor: 07/V/2009 pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009. Pokok perjanjian ini memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan profesional bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan dijaminakan meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi, anatomi, elektromedik) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pemberian resep obat-obatan dan termasuk semua jasa yang umumnya diberikan Rumah Sakit.

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban dengan PT Bintang Hotels berlaku sampai dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Pengakhiran Perjanjian ini dan kesepakatan untuk melakukan evaluasi mengenai kerja sama ini pada setiap akhir tahun.

5) PT. Singatac Bintang

Perjanjian Kerjasama pelayanan kesehatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Singatac Bintang yang tertulis dalam MOU Nomor: 7/ RSUD/MOU/II/2019 dan Nomor: 111/PTSB/ADMIN/RSUD/II/2019. Pokok perjanjian ini memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan profesional bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan dijaminakan dan selanjutnya pasien meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi, anatomi, elektromedik, dll) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pemberian resep obat-obatan dan termasuk jasa yang umumnya diberikan Rumah Sakit.

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Singatac Bintang berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai pengakhiran perjanjian ini.

6) PT. Buana Megawisatama

Perjanjian Kerjasama pelayanan kesehatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Buana Megawisatama yang tertulis dalam MOU Nomor: 505/RSUD/MOU/III/2013. Pokok perjanjian ini memberikan pelayanan



kesehatan secara menyeluruh dan profesional bagi pihak-pihak yang ditunjuk dan dijamin dan selanjutnya pasien meliputi pengobatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, patologi, anatomi, elektromedik, dll) rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pemberian resep obat-obatan dan termasuk jasa yang umumnya diberikan Rumah Sakit, memberikan fasilitas penjemputan dengan menggunakan ambulance untuk indikasi pasien Emergency tanpa dikenakan biaya ambulance.

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Buana Megawisatama berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Pengakhiran Perjanjian ini dan kesepakatan untuk melakukan evaluasi mengenai kerja sama ini pada setiap akhir tahun.

7) PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal 25 April 2016 nomor: 125/Aji/KOP-PKU/KTR/1016, 25/RSUD/MOU/x/2016, lingkup pelayanan kesehatan meliputi : rawat inap, persalinan, rawat jalan dokter umum dan rawat jalan dokter spesialis dan rawat jalan dokter gigi. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak ditandatangani jangka waktu 2 tahun.

8) PT Taspen

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Taspen tentang perawatan peserta jaminan kecelakaan kerja yang tertulis dalam MOU Nomor: 27/RSUD/MOU/XII/2018 dan nomor: NOV-16/dir/2018.

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi: penanganan dan perawatan pasien, pemberian surat jaminan, penyelesaian pembayaran perawatan. Masa berlaku perjanjian ini selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 NOVEMBER 2018 S/D 1 NOVEMBER 2020.



9) PT Asuransi Jiwa Inhelath Indonesia

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Asuransi Jiwa Inhelath Indonesia tentang perawatan peserta jaminan kecelakaan kerja yang tertulis dalam MOU Nomor: 22/mou/rsud/v/2017 dan nomor: 20/ajii/kop-pku/ktr/add/0417 tentang pelayanan kesehatan dan pelayanan obat bagi peserta PT asuransi jiwa inhealth Indonesia. Jangka waktu perjanjian sejak tanggal 1 Mei 2017 s/d tanggal 30 April 2020.

10) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau tentang penanganan dan penyelesaian santunan korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan. yang tertulis dalam MOU Nomor: 09/mou/rsud/i/2018 dan nomor: p/02/sp/2018. Jangka waktu perjanjian 5 tahun terhitung mulai ditandatangani dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

11) Yayasan komunitas peduli AIDS kepulauan Riau (kompak)

Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Yayasan komunitas peduli AIDS kepulauan Riau (kompak) tentang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang tertulis dalam MOU Nomor: 18/rsud/mou/viii/2017 dan nomor: 036/kompak/spk/viii/2018. Jangka waktu perjanjian jika salah satu pihak tidak menginginkan melanjutkan kerjasama ini karena ada salah satu hal maka yang bersangkutan harus bermusyawarah terlebih dahulu dan akan diadakan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak secara baik dan jujur.

3) Kerjasama Antara RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib dengan Pihak Ketiga

a) Jaminan Kabupaten/Kota

Untuk Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kota / Jamkesda telah terjalin sejak berdirinya RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan



Riau. Namun, untuk tahun 2019, dari 5 Kabupaten dan 2 Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang tetap menjalin kerjasama JAMKESDA dan JAMPERSAL serta Kabupaten Lingga untuk Kerjasama JAMPERSAL.

Di bawah ini terinci jaminan kesehatan yang mejalin kerjasama dengan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, adapun sebagai berikut :

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Nomor: 732/MOU-RSUD/XII/2018 (01 Januari 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Jamkesda.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Nomor: 011/MOU-RSUD/I/2019 (01 Januari 2019 – 31 Desember 2020) tentang Pelayanan Kesehatan untuk Pasien TB-RO.
- (3) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Nomor: 023/MOU-RSUD/I/2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Jampersal.
- (4) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Nomor: 018/MOU-RSUD/I/2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Jamkesda.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Nomor: 021/MOU-RSUD/I/2019 (11 Februari 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Jampersal.
- (6) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Nomor: 1421/MOU-RSUD/V/2019 (20 Mei 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin.
- (7) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Nomor: 008/MOU-RSUD/I/2019 (2 Januari 2019 – 31 Desember 2019) tentang Pelayanan Jampersal.
- (8) RSUD Kab Bintan Nomor : 491/MoU-RSUD/I/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan (8 Januari 2019 – 31 Desember 2019).
- (9) RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri, Nomor: 015/MOU-RSUD/I/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan (2 Januari 2019 – 31 Desember 2020



- (10) UTD. Transfusi Darah Kota Tanjungpinang tentang Pelayanan Darah Nomor : 022/MoU-RSUD/2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2021).
- (11) Kemenag Prov. Kepri tentang Layanan Kerohanian Nomor : 07/MoU-RSUD//2019 (2 Januari 2019 – 31 Desember 2019).
- (12) Unit Transfusi Darah PMI Kota Tanjungpinang tentang Pelayanan Darah tentang Pelayanan Darah Nomor 02/MoU-RSUD/2019 (2 Januari 2019 – 31 Desember 2021)

b) Jaminan Asuransi/BUMN dan Perusahaan

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor : 731/MoU-RSUD/XII/2018 (1 Januari 2019 - 31 Desember 2019).
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program JKK bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 825/MoU-RSUD/2019 (01 Januari 2019 – 31 Desember 2020).
- (3) CV. Sahabat Servis tentang Perawatan dan Perbaikan serta Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional RSUD Raja Ahmad Tabib Nomor : 006/RSUD//2019 (2 Januari 2019 - 31 Desember 2019).
- (4) PT. Meitech Eka Bintang tentang Pelayanan MCU bagi Karyawan PT. Meitech Nomor : 013/MoU-RSUD//2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2020).
- (5) PT. Meitech Eka Bintang tentang Pelayanan Kesehatan Nomor : 014/MoU-RSUD//2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2020).
- (6) PT. Prodoa Widyahusada tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 05/MoU-RSUD//2019 (02 Januari 2019 – 31 Desember 2019).
- (7) PT. Bank Riau Kepri tentang Sewa Menyewa Ruang ATM Nomor : 257 (3 Januari 2019 – 3 Januari 2021).
- (8) PT. Bank Riau Kepri tentang Sewa Menyewa Kantor Kas Nomor : 256 (3 Januari 2019 – 3 Januari 2021).



- (9) Bintang Resort Cakrawala (BRC) tentang Pelayanan Kesehatan Nomor: 671/MoU-RSUD/II/2019 (1 Februari 2019 – 30 Januari 2021).
- (10) PT. Bank Riau Kepri tentang Layanan OPD Online Transaksi Non Tunai Nomor : 748/PKS/2019 (27 Februari 2019 – 27 Februari 2022).
- (11) PT. Solnet Indonesia tentang Berlangganan Dedicated Internet Nomor : 631/ MoU-RSUD/II/2019 (1 Februari 2019 – 31 Januari 2020).
- (12) PT. Singatac Bintang tentang Pelayanan Kesehatan nomor : 1221/MoU-RSUD/V/2019 (7 Mei 2019 – 6 Mei 2021).
- (13) PT. Sinar Roda Utama tentang Addendum Perpanjangan Periode Kerjasama Nomor: 1661/MoU-RSUD/VI/2019.
- (14) PT. Angkasa Pura II tentang Pelayanan Kesehatan Nomor : 2363/MoU-RSUD/VIII/2019 (01 Agustus 2019 – 31 Juli 2021).
- (15) Air Nav Indonesia tentang Pelayanan Kesehatan Nomor : 2441/MoU-RSUD/VIII/2019 (26 Juni 2019 – 25 Juni 2021).

4) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Pihak Ketiga

- a) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan IBI Provinsi Kepri yaitu terkait dengan Pelayanan Akseptor KB.
- b) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) yaitu terkait dengan Data-data UPPKS.
- c) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan PKBI yaitu terkait dengan penyediaan data-data KB.
- d) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan KPU yaitu terkait dengan Capacity Building Politik Perempuan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kapasitas perempuan bidang politik.
- e) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji yaitu terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.



- f) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan PKK Provinsi Kepri yaitu terkait Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- g) Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Dharma Wanita Persatuan Kepri yaitu terkait Pemenuhan hak dan perlindungan anak.

5) Kerjasama Antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pihak Ketiga

- a) Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan CV. Abadi Sentosa terkait Jasa Teknologi Informasi Pengelolaan dan Peremajaan Data PNS (SIMPEG dan SAPK). Hasil dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian menyangkut penyediaan data dan informasi setiap PNS secara Update dan akurat sesuai dengan dokumen administrasi kepegawaian yang telah divalidasi kebenarannya. Permasalahan yang ada yaitu: 1. BKPSDM belum memiliki server sendiri; 2. Jaringan internet BKPSDM dan OPD lainnya masih kurang mendukung sehingga lambat dalam pelaksanaan peremajaan data PNS tsb. Solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu: (1) Sebaiknya disediakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, serta jaringan internet khusus bandwidth dibesarkan agar lebih cepat dalam proses kerja aplikasi SIMPEG; (2) Mengirim tim simpeg untuk rekonsiliasi data PNS dari SIMPIGE dengan DUK masing-masing OPD;
- b) Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan CV Rytech Indonesia terkait:
 - (1) Pengelolaan E-Disiplin dengan output berupa Sistem Aplikasi. Permasalahan yang masih dihadapi yaitu: (1) Masih ada beberapa UPT yang belum ada jaringan internet; (2) Belum semua OPD memiliki mesin absen finger khusus apel maupun upacara hari besar. Solusi yang perlu dilakukan yaitu: (1) UPT yang blm ada jaringan akses internet akan menggunakan daftar kehadiran manual; (2) BKPSDM telah mengirim pemberitahuan agar OPD mengadakan mesin absen finger khusus apel maupun upacara hari besar.
 - (2) Pembangunan Sistem E-Kinerja dengan output berupa Prototipe Sistem Aplikasi Kinerja. Permasalahan yang dihadapi yaitu: Alur kerja



Prototipe aplikasi ini belum dapat menggambarkan secara maksimal penilaian kinerja.

- c) Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan PT. Sampatiena Persada terkait: penyediaan Peralatan Medis dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dengan output berupa Peralatan Tes Urine.

6) Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Kepulauan Riau dengan Universitas Negeri Padang

Kerjasama dengan Nomor : 03/PKS-KDH/KEPRI/II/2019 dan Nomor : 932/UN35/KS/2019 bertujuan untuk menunjang program pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan para pihak dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan kompetensi pendidik, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019.

7) Kerjasama Antara Dinas Pemuda dan Olah Raga Kepulauan Riau dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

Kerjasama dengan Nomor : 02/PKS-KDH/KEPRI/II/2019 dan Nomor : 931/UN35/KS/2019 bertujuan untuk menunjang program pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan para pihak dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan kompetensi pendidik, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Kegiatan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Orang Asing



Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kepri Tahun 2019 dengan Keynote Speech oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau. Materi sosialisasi adalah:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan ORMAS Asing di Daerah; dan
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.

Instansi vertikal yang terlibat dalam rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kepri Tahun 2019 yaitu :

- a) Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau
- b) Kepala BINDA Kepri
- c) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam
- d) Direktur Intelkam Polda Provinsi Kepulauan Riau
- e) Kasi Intel Korem 033/Wira Pratama
- f) Asintel Lantamal IV Tanjungpinang
- g) Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau
- h) Kepala Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Keluaran dari pertemuan Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kepri Tahun 2019 adalah terkoordinasinya Pemantauan Orang Asing, ORMAS Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau

a) Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.

Perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan berbagai tantangan berupa konflik dalam berbagai bentuk. Konflik ini harus dikelola dengan baik, untuk



mewujudkan masyarakat yang damai dan demokratis, dan terhindar dari perpecahan yang diwarnai aksi kekerasan.

Beberapa upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan terhadap setiap konflik, yaitu Pencegahan Konflik, Penanganan Konflik, penghentian konflik serta pemulihan pasca konflik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa bentuk-bentuk upaya penanganan konflik adalah memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.

Dalam rangka penanganan konflik di daerah, maka pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau sangat dibutuhkan mengingat kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau penuh dengan keanekaragaman baik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maupun tingkat perekonomian dan kehidupan berpolitik masyarakat yang semakin berkembang.

b) Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendorong pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau maupun pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

- Tujuan

Tujuan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di Provinsi Kepulauan Riau.

c) Lokasi Kegiatan

- Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilaksanakan di Kota Batam
- Rapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode Target Pelaporan B.04, B.08, B.12 dilaksanakan di ruang rapat Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Pulau Dompak.



d) Ruang Lingkup

- Keluaran yang dihasilkan

Tercapainya target Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode target pelaporan B.04, B.08, B.12.

- Keanggotaan

Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1. Gubernur Kepulauan Riau : Ketua
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau : Wakil Ketua I
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau : Wakil Ketua II
4. Komandan Korem 033/Wira Pratama : Wakil Ketua III
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau : Wakil Ketua IV
6. Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau : Wakil Ketua V
7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau : Sekretaris
8. Kepala Biro Ops. Polda Kepulauan Riau : Wakil Sekretaris I
9. Kepala Staf Korem 033/Wira Pratama : Wakil Sekretaris II
10. Asintel Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau : Wakil Sekretaris III
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
12. Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Kepulauan Riau : Anggota
13. Asops Lantamal IV Raja Haji Fisabilillah : Anggota
14. Kadisops Lanud Tanjungpinang : Anggota
15. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
16. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau : Anggota



19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
20. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
24. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
26. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
27. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
28. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
29. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kepulauan Riau : Anggota
30. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum : Anggota

Dalam menjalankan tugasnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau : Koordinator
2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau : Anggota



3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai : Anggota Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Sub Bidang Organisasi : Anggota Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi : Anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
7. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggota Provinsi Kepulauan Riau
8. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggota Provinsi Kepulauan Riau
9. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggota Provinsi Kepulauan Riau
10. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggota Provinsi Kepulauan Riau
11. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggota Provinsi Kepulauan Riau

1) Kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat koordinasi Pokja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 meliputi:

- a) Sosialisasi dan Informasi tentang hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Saran dan masukan kepada pimpinan mengenai penyempurnaan metodologi, indikator yang digunakan, serta strategi pemanfaatan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau, untuk



selanjutnya sebagai bahan masukan bagi Tim Ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat;

- c) Pengawasan terhadap proses pengumpulan dan kualitas data yang dihasilkan oleh instansi yang berwenang melakukan Pendataan (BPS Provinsi Kepulauan Riau); dan
- d) Pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik di tingkat Provinsi.

Instansi vertikal yang terlibat dalam rapat koordinasi Pokja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, yaitu:

- a) Kapolda Kepulauan Riau;
- b) Komandan Korem 033/ Wira Pratama;
- c) Kepala BPS Prov.Kepri;
- d) Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pro.Kepri;
- e) Ketua Kepri Research Centre.

Hasil dari pertemuan rapat koordinasi Pokja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah tersosialisasikannya hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau untuk dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi bagi pemerintah daerah.

2) Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Pembahasan dalam koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019, adalah:

- a) Penerimaan berkas permohonan bantuan keuangan Partai Politik;
- b) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, serta penyerahan penggunaan anggaran kegiatan bantuan Keuangan Partai Politik;
- c) Penyampaian usulan bantuan keuangan Partai Politik kepada Kepala Daerah.

Instansi vertikal yang terlibat dalam rapat koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019, yaitu:

- a) Sekretaris KPUD Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;



- c) Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d) Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau.

Keluaran dari kegiatan rapat koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 yaitu mengetahui usulan pemanfaatan Bantuan Keuangan Partai Politik.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah. Untuk mendukung ini, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daerah yang berbatasan. Oleh sebab itu penetapan dan penegasan batas daerah pun menjadi suatu aktivitas yang penting dan bernilai strategis. Pekerjaan penetapan dan penegasan batas daerah di darat dan di laut secara prinsipil tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaannya lebih disebabkan oleh perbedaan karakteristik lingkungan daratan dan lautan yang menuntut strategi dan mekanisme penetapan dan penegasan batas yang sesuai.

Pada tahun 2018 telah dilakukan pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan melalui kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Progress dan Tahapan penyelesaian sengketa batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi tetangga dan antar Kabupaten/Kota, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Kegiatan survei dan Pemetaan batas daerah antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 -2011.
- 2) Persoalan status Kampung Sungai Nyirih sudah diputuskan oleh Gubernur Kepulauan Riau melalui Surat Nomor 0288/KdhKepri.100/05.09 tanggal 19 Mei 2009 perihal Penentuan Status Keberadaan Kampung Sungai Nyirih yang



masuk kedalam wilayah Kota Tanjungpinang. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pertemuan, peninjauan lapangan dan pengumpulan data melalui Tim PBD Provinsi.

- 3) Kedua pihak sudah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 01/BA-BATAS/IV/2013 pada tanggal 19 April 2013 bertempat di Ruang Rapat Hotel Pelangi Tanjungpinang. Point ke-2 Dalam Berita Acara tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyepakati kegiatan survei dan pemetaan batas daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan terpasang 40 titik pilar batas (P.1 - P.40) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kepri.
- 4) Pada tanggal 14 Mei dan 4 Juni Tahun 2013 melalui dana dekonsentrasi Ditjen PUM Kemendagri, Untuk Batas didaerah Kampung Sungai Nyirih telah dilaksanakan sinkronisasi kelapangan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintahan Kota Tanjungpinang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepri, (Batas antara Kelurahan Kampung Bugis dengan Desa Tembeling dan Kelurahan Kampung Bugis dengan Desa Toapaya Asri Kabupaten Bintan).
- 5) Pada Tanggal 20 Desember 2013 Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan Kembali menyepakati: Penambahan 3 (tiga) titik koordinat kartometris dibagian selatan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor 02/BA-BATAS/XII/2013.
- 6) Pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di hotel Allium Batam, Tim PBD Pusat sudah menyerahkan Draft Peta Batas dan Hardcopy Rancangan/Draft Awal Kemendagri kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan, serta akan melakukan pengecekan/perbaikan/Penyempurnaan Penarikan Garis Batas antar pilar secara keseluruhan sesuai dengan kaidah teknis pemetaan berdasarkan hasil overlay citra satelit dan Peta RBI melalui pengecekan kartometrik dan atau pengecekan lapangan. (Berita Acara No.03/BAD I/XII/2015).
- 7) Pada tahun ini juga sudah dilaksanakan kembali pelacakan dan sinkronisasi kelapangan terhadap ke- 40 titik koordinat batas dikedua daerah.



- 8) Pada tahun 2016 bertempat di ruang rapat Bappeda Kota Tanjungpinang dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian informasi pemanfaatan ruang an. Yunita dan Supandi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kabupaten Bintan dan dihadiri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 9) Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan disepakati bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari Kota Tanjungpinang, merujuk survei lokasi, surat Kepala Bappeda Kabupaten Bintan dan Surat Kesepakatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 -2030 dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2010 -2030 yang ditandatangani tanggal 30 September 2010 oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang (sekarang Bappeda) dan Kepala Bappeda Kabupaten Bintan.
- 10) Surat Walikota Tanjungpinang kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor 590/1080/1.1.01/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal bantuan Fasilitas Penegasan Batas Wilayah.
- 11) Tim PBD Provinsi Telah melakukan pelacakan bersama kedua daerah terhadap permasalahan di titik P.7 sampai P.15.
- 12) Pada Tanggal 26 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Riau dilakukan rapat koordinasi antara kedua daerah dan telah disepakati titik P.7 s.d P.11 (Berita Acara Nomor 01/BA-BATAS/V/2017
- 13) Pada Tanggal 2 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kantor Gubernur Kepulauan Riau dilakukan rapat koordinasi kembali dengan mengundang kedua daerah, namun Pemerintah Kabupaten Bintan berhalangan hadir untuk itu Tim PBD Provinsi Kepri hanya menerima masukan dari Tim Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang salah satunya mengusulkan agar Perumahan Grand Pesona seluruhnya masuk kedalam administrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan kompensasi ada sebagian wilayah antara titik P.10 dan P.11 dimasukkan ke wilayah Kabupaten Bintan.
- 14) Pada Tanggal 16 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekda Lt.3 Kantor Gubernur Kepulauan Riau telah dilakukan rapat koordinasi kembali dengan dihadiri Direktur Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Tim PBD



Provinsi dan Tim PBD Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan sesuai Berita Acara Nomor : 01/BAD I/X/2018. Salah satu hasil pada rapat tersebut yaitu perlu dilakukan pelacakan bersama terkait sub segmen antara PBU 10 s.d PBU 11 (Sekitar Perumahan Grand Pesona) yaitu pola penarikan garis batas antar titik koordinat yang sudah disepakati.

- 15) Pada Tanggal 25 Oktober 2018, Tim PBD Provinsi bersama Kedua Tim PBD berbatasan melakukan pelacakan lapangan terhadap titik PBU 10 s.d P.11 dan tetap belum mencapai kesepakatan.
- 16) Sesuai point 4 dalam Berita Acara Nomor: 01/BAD I/X/2018 tersebut, jika tidak terdapat kesepakatan sampai tanggal 6 November 2018, Poses penyelesaian batas kedua daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau dengan luas wilayah lautan 96% dan luas daratan sebesar 4%. Kondisi wilayah seperti ini mempengaruhi jenis dan karakteristik potensi dan kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau dengan luas wilayah lautan 96% dan luas daratan sebesar 4%. Kondisi wilayah seperti ini mempengaruhi jenis dan karakteristik potensi dan kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Data bencana yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di bawah ini menunjukkan total 579 kejadian bencana. Pada umumnya masih didominasi oleh kejadian bencana KEBAKARAN, diikuti bencana PUTTING BELIUNG / ANGIN KENCANG, BANJIR, LONGSOR, GELOMBANG TINGGI/ PASANG dan KABUT ASAP. Korban meninggal dunia akibat bencana sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 3 (Tiga) orang.

Tabel 6.1

**TABEL KEJADIAN BENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019**

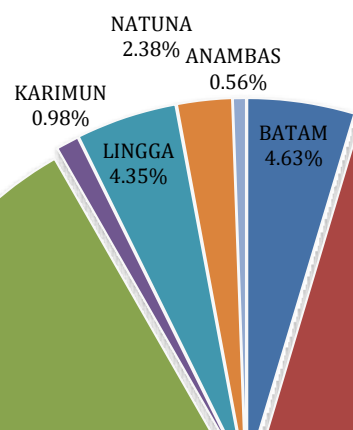
NO	KAB / KOTA	JENIS BENCANA	PRO- SENTASE	KETERAN GAN
----	------------	---------------	-----------------	----------------



		BANJIR	LONGSOR	KEBAKARAN	PUTING BELIUNG / ANGIN KENCANG	GELOMBANG TINGGI/ PASANG	PETIR	ABRASI	HURU- HARA	KABUT ASAP	SUMUR BERACUN	ORANG HILANG	HANYUT/TENGCELAM	RUMAH ROBOH	KEKERINGAN	POHON TUMBAH	REPTIL/ EVAKUASI DUGONG	SARANG LEBAH	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	BATAM	3	3	25	1	0	0	0	0	0						1			33	4.63%	-
2	TPI	9	3	177	2	0	0	0	0	1	1	2	1	1	52	18	30	3	250	35.06%	An. Putra Budiman (9 th) siswa sekolah dasar akibat banjir
3	BINTAN	5	3	353	6	1	0	0	0	1			1					1	371	52.03%	Korban An. La Samudi 31 tahun
4	KARIMUN	0	0	4	2	0	0	0	0	1									7	0.98%	-
5	LINGGA	0	0	17	7	3	0	0	0	0						7			31	4.35%	
6	NATUNA	1	1	7	2	3	0	0	0	1									17	2.38%	'Alex Sandra (19) merupakan warga Kecamatan Pulau Laut meninggal dunia akibat terseret arus gelombang pasang.
7	ANAMBAS	0	0	1	1	1	0	0	0	0					1				4	0.56%	
TOTAL		18	10	584	21	8	0	0	0	4	1	2	2	1	53	23	30	4	713	100.00 %	Korban Jiwa Meninggal Dunia Terdata Tahun 2019 : 3 Orang

Sumber data : BPBD Provinsi Kepri 2019

GRAFIK KEJADIAN BENCANA DI PROVINSI KEPRI TAHUN 2019



Upaya Penanggulangan Bencana pada tahun anggaran 2019 yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran sebagai berikut:

- (1) Bimbingan Teknis Sekolah/ Madrasah Tangguh Bencana Kab/Kota.
- (2) Publikasi BPBD.
- (3) Pembentukan Desa Tangguh Bencana Se-Provinsi Kepri.
- (4) Siaga Darurat Bencana.
- (5) Pengadaan Logistic dan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab/Kota.
- (6) Penyusunan DED Wilayah Pasca Bencana.
- (7) Bimbingan Teknis JITUPASNA (Kajian kebutuhan pasca bencana).
- (8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- (9) Penyediaan jasa tenaga pendukung.
- (10) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran
- (11) Pembangunan Tempat Parkir Gedung Kantor.
- (12) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiat Realisasi Kinerja OPD.
- (13) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- (14) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPBD Provinsi Kepri.



- (15) Peningkatan Kapasitas SDM BPBD.
- (16) Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota.
- (17) Rakor Penanggulangan Bencana BPBD se Provinsi Kepri.
- (18) Partisipasi dalam Rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

a) Status Bencana

Status bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau selama kurang waktu tahun 2019 bersifat lokal.

b) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran di Tahun 2019 yang berasal dari dana APBD Provinsi sebesar Rp. 4.919.116.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 89.88 % sedangkan realisasi fisik 100%.

c) Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Untuk mengantisipasi kejadian bencana, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, sebagai perpanjangan tangan pusat dan provinsi. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

d) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Riau.

e) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.2
Kondisi Kepegawaian
BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN				PANGKAT / GOLONGAN
		L	P	SMA	D.3	S.I	S.2	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
A.	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL	18	5	1	4	15	3	
1	H. MURAMIS	√				√		Pembina Utama Madya/IV.d
2	BUDIHARTO, S.Sos, M.A.P	√					√	Pembina Tk. I/IV.a
3	NAHARI, S.Sos	√				√		Pembina Tk. I/IV.a
4	TENGKU MURSAL	√				√		Pembina Tk. I/IV.b
5	YETRIANI.S.Sn		√			√		Pembina Tk. I/IV.b
6	ARNIDA WARNIS, AMK		√		√			Penata Tk.I/III.d
7	DEWI SARTIKA EFFENDHY, S.Sos		√			√		Penata Tk.I/III.d
8	LIDIA PASARIBU, S.Kom		√			√		Penata /III.c
9	MARDIAH, S.Sos		√			√		Pembina/IV.a
10	FAHMY YANDRA BASRY, S.Pi	√				√		Penata Tk.I /III.d
11	HARDIN NAFII, S.Gz	√				√		Penata /III.c
12	AGUS SISWANTO, ST	√				√		Penata Tk.I/III.d
13	M. FIRDAUS, S.E	√				√		Penata Muda Tk.I/III.c
14	ERWAN, S.E	√				√		Penata Tk.I /III.d
15	MURYONO	√		√				Penata Tk.I /III.d
16	TRISNA MUZAHAR, SE.MM		√				√	Penata III.c
17	IRMAN FAUZI, SE	√				√		Penata/ III.c
18	SUMARLIN,SE	√				√		Penata /III.c
19	NURFITRIANI, S.AP		√			√		Penata /III.c
20	HETI BARKUN, A.Md		√		√			Penata Muda / III.a
21	ROHMAN SYAFRUDIN,A.Md	√			√			Pengatur Tk.I/ II.d

f) Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk penanggulangan bencana secara cepat dan tepat terutama dalam masa tanggap darurat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 709 Tahun 2017. TRC mempunyai tugas melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi kejadian bencana.

g) Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

Adapun potensi kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- 1) Putting Beliung;
- 2) Cuaca Ekstrim/ Angin Kencang;
- 3) Banjir/gelombang pasang;
- 4) Kekeringan;
- 5) Kebakaran (Hutan, Lahan & Permukiman);
- 6) Abrasi pantai;
- 7) Sambaran Kilatan Petir;



- 8) Kabut asap kiriman;
- 9) Kegagalan Teknologi;
- 10) Zoonosis, (Epidemi, Endemi);
- 11) Konflik Sosial;
- 12) Sumur Beracun;
- 13) Orang Hilang;
- 14) Tenggelam;
- 15) Pohon Tumbang;
- 16) Serengan Lebah;
- 17) Evakuasi Reptil/ dugon;
- 18) Pencemaran Lingkungan (tumpahan minyak di Lintas Perairan).

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Pengelolaan Kawasan Khusus yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Kawasan Khusus

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, kesehatan dan farmasi, dan bidang-bidang lainnya. Fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun meliputi:

- 1) Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
- 2) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya

2. Status Kepemilikan Kawasan

Dasar Hukum :



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775).

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 dan diperpanjang kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sedangkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 dan diperpanjang kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun melalui :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6128);



- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6129);

3. Sumber Anggaran

a) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik seluruhnya didukung oleh dana APBN melalui Bagian Anggaran 999 (Belanja Lain-Lain) pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan untuk biaya personil (honorarium) bersumber dari APBD Kabupaten Bintan melalui anggaran kegiatan pada SKPD BPMPD Kabupaten Bintan.

b) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjungpinang

Anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik seluruhnya didukung oleh dana APBN melalui Bagian Anggaran 999 (Belanja Lain-Lain) pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sedangkan untuk biaya personil (honorarium) bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang berupa dana hibah.

c) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik seluruhnya didukung oleh dana APBN melalui Bagian Anggaran 999 (Belanja Lain-Lain) pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4. Permasalahan yang Dihadapi

a) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

1. Kejelasan status kelembagaan
2. Minimnya lahan
3. Peruntukan lahan yang belum jelas

b) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjungpinang



1. Status kelembagaan Badan Pengusahaan Tanjungpinang yang belum terealisasi hingga saat ini sehingga menghambat perkembangan Kawasan FTZ itu sendiri.
2. Wilayah FTZ yang tidak menyeluruh di dalam Kawasan FTZ Tanjungpinang. Apabila kawasan FTZ Tanjungpinang diberlakukan secara menyeluruh akan lebih dapat menguntungkan dan menambah nilai investasi di Tanjungpinang serta lebih mempermudah dalam hal keluar masuk barang dan hal mengeluarkan perizinan.

c) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

1. Kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun yang belum terbentuk hingga saat ini menghambat perkembangan FTZ Karimun karena beberapa keterbatasan yang diakibatkan belum terbentuknya kelembagaan tersebut.
2. Wilayah yang ditetapkan sebagai KPBPB Karimun (enclave) menjadi permasalahan dalam pengawasan arus keluar masuk barang dan tidak sebanding dengan minat dan potensi pengembangan investasi.
3. Terbatasnya dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dan belum adanya alokasi anggaran untuk gaji / upah pegawai BP.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus

Merupakan suatu Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau;
 Wakil Ketua I merangkap Anggota : Bupati Bintan;
 Wakil Ketua II merangkap Anggota : Walikota Tanjung Pinang.

Anggota:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;



- 2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 6) Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- 7) Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 8) Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 9) Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.

b) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Sedangkan pada Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau;

Wakil Ketua merangkap Anggota : Bupati Karimun;

Anggota:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 6) Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- 7) Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;
- 8) Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
- 9) Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Kawasan dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun.



Tabel 6.3
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sekretariat
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Tahun 2019

NO.	BIDANG	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5
1	Sekretaris	1	S3	Pembina Utama Madya/IV.d
2	Wakil Sekretaris I	1	S2	Pembina Utama Madya/IV.d
3	Wakil Sekretaris II	1	S2	Non PNS / IV
4	Divisi Administrasi dan Penyusunan Program	1	S1	Non PNS / III
5	Bagian Administrasi	1	D III	Non PNS / III
6	Bagian Penyusunan Program	1	S2	Pembina / IV.a
7	Divisi Promosi, Investasi dan Hubungan Masyarakat	1	S1	Pembina Tk.I /IV.b
8	Bagian Promosi Dan Investasi	1	S1	Non PNS / III
9	Bagian Hubungan Masyarakat	1	S1	Penata Muda/III.a
10	Divisi Keuangan Dan Verifikasi	1	S2	Pembina Tk.I /IV.b
11	Bagian Keuangan	1	S1	Penata Tk.I/III.d
12	Bagian Verifikasi	1	S1	Penata Muda Tk.I/III.b
13	Divisi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	1	S2	Pembina Utama Madya/IV.d
14	Bagian Monitoring Dan Evaluasi	1	S2	Penata/III.c
15	Bagian Pelaporan	1	S1	Non PNS / III
16	Staf Pelaksana	15	S1 dan D III	PNS dan Non PNS

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan berbagai tantangan berupa konflik dalam berbagai bentuk. Konflik ini harus dikelola dengan baik, untuk mewujudkan



masyarakat yang damai dan demokratis, dan terhindar dari perpecahan yang diwarnai aksi kekerasan.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial jo. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, bentuk-bentuk upaya penanganan konflik adalah: memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Dalam rangka mencegah, dan menyelesaikan konflik di daerah, telah dibentuk Tim Terpadu di tingkat pusat dan daerah yang bertujuan kerjasama tim dalam ruang koordinasi, memiliki target sasaran yang sama dan mendorong adanya proses pemecahan akar permasalahan melalui penunjukan pejabat-pejabat berwenang yang bertanggung jawab pada bidangnya, serta upaya mencegah terjadinya konflik.

Beberapa upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan terhadap setiap konflik yaitu: Pencegahan Konflik, Penanganan Konflik, penghentian konflik serta pemulihan pasca konflik. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Riau. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2018 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.189.335.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.323.219.134,00 (72,84%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 2) Pengawasan Orang Asing;
- 3) Peningkatan Peran FKUB;
- 4) Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau;
- 5) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepulri;
- 6) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Provinsi Kepulauan Riau;
- 7) Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau;



- 8) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau;
- 9) Pertemuan Forum Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Riau;
- 10) Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
- 11) Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri;
- 12) Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa;
- 13) Kewirausahaan Bagi Siswa dan Mahasiswa.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pada Satpol PP terlihat pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal pada tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 atau sebesar 100%; dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.00 atau sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Pengendalian pengawasan dan pengamanan Satpol PP Provinsi Kepri.
 - b. Peningkatan Operasional Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli (TURJAWALI).
 - c. Peningkatan pelaksanaan Deteksi Dini.
 - d. Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Provinsi Kepri.
- 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Pendataan dan Pembuatan Kartu Anggota Satlinmas.
 - b. Pelatihan Penanggulangan Deteksi Dini Dalam Bencana Bagi Anggota Satlinmas.



BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.



Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar; (iii) pen]rusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar,

Empat fokus tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada



Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

A. Urusan Pendidikan

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Pendidikan memiliki dua jenis layanan dasar yaitu :

1. Pendidikan Menengah ;
2. Pendidikan Khusus.

Dalam penerapan capaian SPM Urusan Pendidikan masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum di masukannya Penerapan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
SPM Urusan Pendidikan

NO	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1.	Pendidikan Menengah	Belum ada Target Pencapaian terhadap jenis layana Pendidikan Menengah di Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD 2016-2021 atau RKPD di Dinas Kesehatan	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan belum ada dalam dokumen perencanaan pembangunan	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM jenis Layanan Dasar yang disediakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan	Belum adanya Dukungan Personil dalam Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM,Urusan Kesehatan jenis pelayanan Dasar Pendidikan	Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan SPM : a) Belum adanya perencanaan



		Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.	daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Adapun capaian Pendidik Pada Jenjang Menengah yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik sebesar : 42,22 %	Riau khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.	Menengan khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	Penerapan SPM di dalam Dokumen Perencanaan Daerah. b) Masih minimnya ketersediaan anggaran yang digunakan untuk mendukung partisipasi Pendidikan Menengah c) Masih kurangnya personil yang mendukung capaian SPM. Solusi : Penerapan dan Pencapaian SPM akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
2.	Pendidikan Khusus	Belum ada Target Pencapaian terhadap jenis layanan Pendidikan Menengah di Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD atau RKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan belum ada dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Adapun capaian Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Khusus yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	Belum adanya Anggaran yang disediakan dalam Pelayanan Pendidikan Khusus pada Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar : Anggaran :	Belum adanya dukungan personil dalam Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Jenis Layanan dasar Pendidikan Khusus Di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan SPM : d) Belum adanya perencanaan Penerapan SPM di dalam Dokumen Perencanaan Daerah. e) Masih minimnya ketersediaan anggaran yang digunakan untuk mendukung partisipasi Pendidikan khusus



			tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebesar : 100 %			f) Masih kurangnya personil yang mendukung capaian SPM. Solusi : Akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah RKPDP Tahun 2020.
--	--	--	---	--	--	--

B. Urusan Kesehatan

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Kesehatan memiliki 2 (dua) jenis layanan dasar yaitu:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Dalam penerapan capaian SPM Urusan Kesehatan masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum di masukannya Penerapan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPDP Tahun 2019 khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
SPM Urusan Kesehatan

N O	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1.	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	Target capaian spm pada urusan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi	Walaupun belum ada target yang ditetapkan belum ada dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian	Belum adanya Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM untuk urusan kesehatan jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	Belum adanya Dukungan personil dalam pencapaian kinerja SPM, urusan kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan	Permasalahan terhadap capaian kinerja SPM urusan Kesehatan dengan jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana



		bencana provinsi. Belum ada karena belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2019. Khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	dengan Indikator SPM. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dengan capaian Kinerja sebesar : 100 %	bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan daerah Tahun 2019 khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan Daerah Tahun 2019 Khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah sebagai berikut: Permasalahan : Indikator SPM ini belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahun 2019 Solusi : Indikator SPM sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2020
2.	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Target capaian spm pada urusan kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Belum ada karena belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2019. Khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	Walaupun belum ada target yang ditetapkan belum ada dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan capaian Kinerja sebesar : 98%	Belum adanya Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM untuk urusan kesehatan jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan daerah Tahun 2019 khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	Belum adanya Dukungan personil dalam pencapaian kinerja SPM, urusan kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan Daerah Tahun 2019 Khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	Permasalahan terhadap capaian kinerja SPM urusan Kesehatan dengan jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. sebagai berikut: Permasalahan : Indikator SPM ini belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahun 2019 Solusi : Indikator SPM sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2020



C. Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Pekerjaan Umum memiliki 2 (dua) jenis layanan dasar yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Dalam penerapan capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum di masukannya Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum ke dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.3
Urusan Pekerjaan Umum

N O	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Belum ada nya Target capaian SPM urusan Pekerjaan jenis layanan dasar pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Karena merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi	Belum ada Realisasi capaian SPM karena Jenis Layanan dasar pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Belum ada nya Anggaran Penerapan Pencapaian SPM jenis Layanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota karena merupakan Urusan Perumahan dan permukiman di Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Dalam mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM ini belum terdapat dukungan personil karena jenis layanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.	Permasalahan : (a) Jenis layanan dasar pemenuhan Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.



		Kepulauan Riau				Solusi : Jenis layanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ direncanakan akan dimasukkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah 201 Provinsi Kepulauan Riau
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Belum ada nya Target capaian SPM urusan Pekerjaan jenis layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota karena merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman di Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.	Belum ada Realisasi capaian SPM karena Jenis Layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman di Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.	Belum ada nya Anggaran Penerapan Pencapaian SPM jenis Layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota karena merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.	Dalam mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM ini belum terdapat dukungan personil karena jenis layanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.	Permasalahan dan Solusi : - Penerapan SPM Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan Urusan Perumahan dan Permukiman dan akan dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. - Wilayah yang masuk dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau hanya antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, dimana pengelolaan air limbah domestik regional masih belum tersedia - Belum disusunnya rencana induk SPALD regional



						lintas kabupaten/kota - Minimnya pendanaan dalam dokumen perencanaan untuk mencapai target layanan tersebut - Belum dibentuknya BUMD Penyelenggara SPALD/UPT Penyelenggara SPALD/Badan Usaha SPALD Harus terpenuhinya syarat Cakupan pelayanan skala perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa sesuai Permen PUPR No.04 Tahun 2017
--	--	--	--	--	--	---

D. Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) jenis layanan dasar yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam penerapan capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum dimasukkannya Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.4
Urusan Perumahan Rakyat



NO	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Belum ada nya Target capaian SPM urusan Perumahan Rakyat jenis layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dikarenakan belum dimasukkannya Penerapan dan Capaian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.	Walaupun belum adanya Target dan Realisasi Capaian Kinerja Urusan perumahan dan Permukiman jenis layanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM yaitu : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan capaian Kinerja sebesar :	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat jenis layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	- Dalam mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM ini terdapat sejumlah personil antara lain: a. Konsultan Perencanaan Teknis Kegiatan Penataan Lingkungn Permukiman Berbasis Komunitas Di Batam oleh CV. PRESISI KOSULTAN; b. Konsultan Pengawasan Teknis Kegiatan Penataan Lingkungn Permukiman Berbasis Komunitas Di Batam oleh CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT c. PNS Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan sebanyak 3 orang Tenaga Honorer Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan sebanyak 2 orang	- Karena jenis layanan SPM tersebut bersifat kahar, maka data target pencapaian SPM tidak dapat dimasukkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, Renstra, RKPD untuk tahun bencana terjadi Kurangnya koordinasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dengan OPD terkait seperti BPBD
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Belum ada target Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Fasilitasi	Belum ada realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Fasilitasi	Belum ada penganggaran dalam Penerapan dan Pencapaian SPM untuk	Belum tersedianya dukungan personil dalam Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Fasilitasi penyediaan rumah	



terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, Renstra, RKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	jenis layanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	
---	--	--	--	---	--

E. Urusan Trantibumlinmas

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Trantibumlinmas memiliki 1 (satu) jenis layanan dasar yaitu: Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. Dalam penerapan capaian SPM Urusan Trantibumlinmas masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum di masukan nya Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.5
Urusan Trantibumlinmas

NO	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi .Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Belum ada nya Target capaian SPM urusan Trantibum jenis layanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-	Walaupun belum ada target yang ditetapkan belum ada dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun,	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas jenis layanan dasar Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.	Belum adanya Dukungan Personil terkait penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas jenis Pelayanan dasar Pelayanan ketenteraman	Permasalahan yang dihadapi; a) Penerapan dan Pencapaian SPM belum dimasukkan ke dalam dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



		2021 dan RKPD 2019 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.	terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni : 1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian Kinerja sebesar : 100 % 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian Kinerja Sebesar :100 % Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS : 4,1%		dan ketertiban umum provinsi.	b) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah belum memadai. c)Terbatasnya kemampuan APBD Provinsi Kepulauan Riau menyediakan anggaran dalam mendukung program pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah d) Komitmen dan reorientasi kerja pada Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah masih belum maksimal. Solusi; a) Akan dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. b) Menyelaraskan, Menjabarkan, mengembangkan, peraturan yangberhubungan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang memadai c). Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah
--	--	---	--	--	--------------------------------------	---



						d) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Se-Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi terkait Kota dan Kabupaten dalam bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah.
--	--	--	--	--	--	--

F. Urusan Sosial

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Sosial memiliki 5 (lima) jenis layanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Dalam penerapan capaian SPM Urusan Trantibumlinmas masih terdapat beberapa kendala. Adapun salah satu kendala tersebut adalah belum di masuknya Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas dalam Dokumen Perencanaan daerah, RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dimuat dalam LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM. Rincian SPM Urusan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.6
Urusan Sosial

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian SPM	Realisasi Penerapan SPM	Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan Solusi
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Belum ada target Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Rehabilitasi	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar	Belum adanya dukungan Personil terkait Penerapan dan pencapaian SPM Urusan	Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam



		Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni Persentase penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 557 orang penyandang disabilitas terlanter di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 557 orang Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	menyelenggarakan SPM : 1. Target pencapaian SPM belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Provinsi Kepri. 2. Minimnya anggaran 3. Keterbatasan personil 4. Tidak ada panti milik pemerintah Solusi : 1. Menetapkan target Pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan tahun 2020 2. Mengajukan penambahan personil Memfasilitasi panti swasta dengan anggaran yang terbatas, yang tentunya tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ideal.
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Belum ada target Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni Persentase Anak Terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 1.137 orang Anak Terlanter di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.137 orang Populasi Anak Terlanter di daerah provinsi yang membutuhkan	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	Belum adanya dukungan Personil terkait Penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	



			rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Belum ada target Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 250 orang Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 250 orang Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	Belum adanya dukungan Personil terkait Penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia Terlantar di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti	Belum ada target Penerapan dan Pencapaian SPM untuk jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum ada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 4.527	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD	Belum adanya dukungan Personil terkait Penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) di dalam Panti karena belum dimasukkan ke	



		Riau Tahun 2019 khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	orang tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dari 4.527 orang Populasi tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti. Data capaian tersebut terdiri atas : 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 15 orang dari 15 orang populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti 2. Jumlah WNIM-KPO yang direhabilitasi sosial dalam panti sebanyak 4.427 orang dari 4.427 orang populasi WNIM-KPO yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti 3. Jumlah korban trafficking yang direhabilitasi dalam panti sebanyak 55 orang dari 55 orang populasi korban trafficking yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	dalam Dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belum ada target Penerapan dan	Perihal capaian atau realisasi penerapan SPM, walaupun belum	Belum adanya Anggaran terkait Penerapan dan	Belum adanya dukungan Personil terkait	



	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Pencapaian SPM untuk jenis layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial di Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	ada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Prov Kepri tahun 2019 yang berkesesuaian dengan Indikator SPM, yakni Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 1.187 orang korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.187 orang Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi. Capaian tersebut terbagi atas 713 orang korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan 549 orang korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	Penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial karena belum dimasukkan ke dalam Dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	
--	---	--	--	---	---	--



BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH



Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh



masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.



III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI} \times 100\%}{\text{TARGET}}$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan penacapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI} \times 100\%}{\text{TARGET}}$$



Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8.1
CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	32,33	14,32	44,29
2	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik	71,49	73,64	102,97
3	Meningkatnya Ketersediaan	Persentase Ketersediaan	82,35	85,29	103,57



	Prasarana dan Sarana Transportasi	Pelabuhan Laut			
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman	96,79%	92,47%	95,53
5	Meningkatnya Rasio	Rasio Elektrifikasi	92,50%	92,59%	100,09
6	Elektrifikasi Meningkatkan Kualitas	Rata-rata Lama Sekolah	10,20	9.81	96,18
Pendidikan					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Meningkatnya Kualitas dan	Tingkat Pengangguran	7,23	6,91	104.63
	Profesionalisme Tenaga Kerja	Terbuka (TPT)			
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	16.8	11,86	129
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,83%	5,80%	100,51
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62	66.18	106,7
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	305.239,0	309.287,15	101,23
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5	2.300.000	2.864.795
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	7.700	20.450	265,58
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi	700	5.656	808
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,35	9,07	108



15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,68	16,27	152,34
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	75	65.10	86.80
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	100
		Nilai E- Government	2,3	2,4	104,35

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2019 yang ditetapkan pada bulan Maret kemudian Perjanjian Kinerja tersebut mengalami perubahan yang dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD 2016-2021 dan kemampuan keuangan daerah saat itu. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ditetapkan pada bulan Oktober 2019. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut:

SASARAN. 1

Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah



Indonesia kaya akan nilai-nilai budaya baik itu tangible maupun intangible Provinsi kepulauan riau dengan khazanah budaya yang memiliki nilai tinggi ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan pelestarian pemajuan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya tersebut. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi kepulauan Riau antara lain dalam bentuk pelestarian bangunan berciri khas kearifan lokal adalah adanya bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau. Bangunan berarsitektur melayu merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat melayu di kepulauan Riau yang telah di wariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi, sehingga perlu dipelihara, dilestarikan, dikembangkan dan pemanfaatannya digunakan secara luas oleh masyarakat.

Kepedulian pemerintah Indonesia dalam memajukan budaya nasional dapat dilihat dalam melestarikan budaya tradisional yang ada di tanah air baik dalam bentuk warisan warisan tak benda (WBTB) atau lebih dikenal dengan sebutan *Intangible Culture heritage* maupun

warisan benda. Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan pemajuan nilai budaya ini dituangkan oleh pemerintah pusat dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pada Pemerintah Daerah turunan dari Undang-Undang pemajuan kebudayaan yaitu adanya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah yang tertuang didalam dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

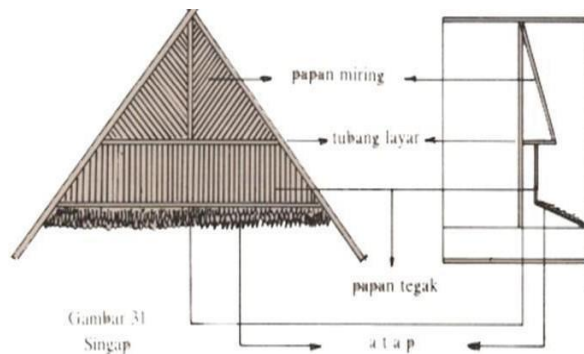
Dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang bangunan berciri khas melayu. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam memperkuat nilai-nilai karakter keperibadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau; melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi Melayu dalam pembangunan rumah berciri khas Melayu; meningkatkan pengelolaan Bangunan Berciri Khas Melayu yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; dan edukasi dan sosialisasi Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai identitas dan symbol budaya Melayu Kepulauan Riau.

Sebuah bangunan dikatakan berciri khas melayu apabila memiliki ciri-ciri bangunan sebagai berikut:

- II. Spesifik atap ataupun ornamen melayu, ini dapat dilihat dari bentuk Perabung Panjang/atap dan memiliki jumlah bandungan nya harus ganjil
- III. Bangunan wajib diberi tunjuk langit di depan atap bangunan
- IV. Menggunakan plang nama kantor/gedung bertulisan arab melayu pada posisi masuk dengan filosofi yang jelas



Gambar 8.1 Contoh Ornament bangunan Melayu



Gambar 8.2 Contoh Ornament bangunan Melayu



Gambar 3.3 Salah satu gedung dengan Ornament Melayu

Capaian kinerja meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu
sebagai Kekayaan Budaya Daerah
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	--------------

1	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	32,33	14,32	44,29
---	--	-------	-------	-------

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu. Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota.

Analisis terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu Tahun 2019 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 272 bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota yakni 1900 Bangunan Pemerintah dan Swasta dengan persentase 14,32 %.

Hasil Analisis bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 32,33% hanya dapat tercapai sebesar 14,32% sehingga capaian kinerja sebesar 44,29% atau dalam kategori ***kurang***.

Pada tahun 2019 masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam mencapai target indikator Persentase Bangunan Berciri Khas Melayu, tetapi Dinas Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota baik itu pemerintah dan swasta dalam mencapai target tersebut. Pada tahun 2019 telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Kepulauan Riau yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 di APBD-P Dinas Kebudayaan telah melakukan Sosialisasi Perda bangunan berciri khas melayu ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat menggesa agar Perda ini dapat dilaksanakan dengan cepat baik di lingkungan pemerintah dan swasta sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu memperkuat Identitas masyarakat Kepulauan Riau dengan membuat suatu *icon* dalam bentuk bangunan berciri khas melayu yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat melayu di Kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam penanaman nilai-nilai khazanah budaya lokal kepada masyarakat. Selain itu juga Dinas kebudayaan melakukan Inventarisasi dan Monitoring ke 7 Kabupaten/kota menyangkut jumlah bangunan berciri khas melayu. Hasil dari inventarisasi dan Monitoring ke kabupaten/kota Pada Tahun 2019 sudah bertambah Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 50 Bangunan Pemerintah dan swasta.

Berikut evaluasi capaian sasaran meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan Budaya Daerah dengan indikator persentase bangunan yang berciri khas melayu dapat dilihat Dari diagram berikut :

Pada tahun 2016 capaian pada kinerja ini sebesar 5,28 % atau 32 bangunan berbanding 606 bangunan milik pemerintah tetapi pada tahun 2017 terjadi perubahan



pada jumlah bangunan yaitu sebesar 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta sehingga adanya perubahan perhitungan pada tahun 2017 dapat digambarkan pada Grafik ini tahun 2017 realisasi sebesar 8,28 % atau 57 bangunan yang sudah berciri khas melayu berbanding 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta. Pada tahun 2018 dapat digambarkan pada Grafik realisasi sebesar 11,68 % atau 222 bangunan yang sudah berciri khas melayu berbanding 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 50 bangunan yang berciri khas melayu, sehingga sampai tahun 2019 jumlah bangunan berciri khas melayu sebanyak 272 bangunan atau 14,32%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penambahan jumlah bangunan yang berciri khas melayu pada Tahun 2019 paling banyak di Kabupaten Lingga dengan jumlah penambahan 18 bangunan dari 50 bangunan. Pada Tahun 2018 penambahan jumlah bangunan yang berciri khas melayu paling banyak di Kabupaten Anambas dengan jumlah penambahan 30 bangunan dan paling sedikit di Kabupaten Lingga sebanyak 3 bangunan dari 133 bangunan. Pada Tahun 2017 penambahan jumlah bangunan yang berciri khas melayu paling banyak di Kota Tanjungpinang dengan jumlah penambahan 20 bangunan dan paling sedikit di Kabupaten Natuna sebanyak 2 bangunan dari 57 bangunan. Pada Tahun 2016 belum semua Kabupaten/Kota yang melakukan inventarisir bangunan berciri khas melayu, namun dapat dilihat jumlah bangunan yang berciri khas melayu paling banyak di Kabupaten Lingga dengan jumlah 10 bangunan dari 32 bangunan.





Kendala yang di hadapi

- JJ. Masih belum optimalnya Sosialisasi Perda nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri khas Melayu yang baru di sahkan, sehingga masih banyak bangunan yang belum menyesuaikan Perda tersebut, khususnya pada pihak swasta yang belum memahami isi dari Perda tersebut.
- KK. Faktor Geografis Kepulauan Riau yang merupakan Pulau-pulau menjadi salah satu faktor kendala dalam mensurvey bangunan yang bercirikhas Melayu yang ada di kabupaten/kota yang berpisah dengan daratan dari Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penunjang database



Solusi

- Pada tahun 2019 dinas kebudayaan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu sehingga akan berdampak dalam mencapai target kedepannya.
- Dinas Kebudayaan melakukan kerjasama dengan *stakeholders* yang berkompeten dibidang arsitektur sehingga ke depan nanti nya ada keseragaman bentuk bangunan khusus bangunan milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau termasuk 7 Kabupaten/Kota
- Dinas Kebudayaan akan terus melakukan Inventarisasi agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- Untuk mencapai target langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan tahun 2021 ,Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau akan membuat kegiatan Pengadaan ornamen Melayu,dengan kegiatan ini Dinas

Kebudayaan optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangansuatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik maka ditetapkanlah indikator kinerja yaitu persentase jalan provinsi berkondisi baik. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.3
Capaian Kinerja Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	71,49	73,64	103,0



Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan.

Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi.

Analisis terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2019 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 660,17 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 73,64%.

Hasil analisis jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 71,49% dapat tercapai sebesar 73,64% sehingga capaian kinerja sebesar 103,01% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi berkondisi baik dari Tahun 2016-2019:

Tabel 8.4
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik dari Tahun 2016-2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019
1	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	66,21 %	67,30 %	70,31 %	73,64 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase jalan provinsi berkondisi baik dari Tahun 2016 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2016 realisasi persentase jalan Provinsi berkondisi baik sebesar 66,21%, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 67,30% dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 70,31%, lalu pada Tahun 2019 meningkat menjadi 73,64%.

Adapun jalan berkondisi baik pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.5
Evaluasi Jalan Berkondisi Baik Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jalan		Jalan	Jalan	Jalan		Jalan	Panjan g
		Berkon	Panjang	Berkon	Berkon	Berkon	Panjang	Berkon	
			Jalan				Jalan		Jalan
		disi Baik (KM)		disi Baik	disi Baik	disi Baik	(KM)	disi Baik	(KM)



(KM)

(KM)

(KM)

(KM)

(KM)



1	Tanjung pinang	47.15	70,23	49.15	70,23	50,10	70,23	51,56	70,23
2	Bintan	128.61	139,10	128.61	139,10	129,93	139,10	130,71	139,10
3	Batam	88.96	112,35	91.96	112,35	104,81	112,35	110,63	112,32
4	Karimun	104.34	143,72	105.35	143,72	109,03	143,72	112,31	143,72
5	Lingga	126.95	236,72	128.47	236,72	128,62	236,72	138,35	236,72
6	Natuna	72.97	143,33	75.18	143,33	82,26	143,33	87,86	143,33
7	Anambas	24.58	51	24.58	51	25,51	51	28,76	51,00
Total		593.54	896,45	603,32	896,45	630,26	896,45	660,17	896,45

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jalan berkondisi baik Tahun 2019 paling panjang adalah di Kabupaten Lingga yakni 138,35 KM dan yang paling sedikit Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 28,76 KM. Tahun 2018 paling panjang adalah di Kabupaten Bintan yakni 129,93 KM dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 25,51 KM. Lalu Tahun 2017 paling panjang adalah di Kabupaten Bintan yakni 128,61 KM dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 24,58 KM. Dan jalan berkondisi baik Tahun 2016 paling panjang adalah di Kabupaten Bintan yakni 128,61 KM dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 24,58 KM.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan

- KKK. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kinerja,
- LLL. Adanya upaya-upaya strategis dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja,
- MMM. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan.

Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi melalui Pembangunan pelabuhan laut yang secara bertahap dan disegerakan pembangunannya adalah sebagai upaya membuka dan memberi investasi jangka panjang terhadap potensi sumber daya alam perikanan, perkebunan dan pariwisata. Pemerintah Pusat juga mendukung secara penuh sebab Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada letak wilayah yang menjadi daerah perbatasan dan daerah transit

Adapun Persentase ketersediaan pelabuhan laut dan Persentase ketersediaan kapal angkutan laut dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 8.6
Capaian Kinerja Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi
Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	--------	-----------



				CAPAIAN
1	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	82,35	85,29	103,57

Pelabuhan laut yaitu tempat yang berdiri di atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusahaan dan tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan. Pelabuhan laut di kepri begitu banyak baik pelabuhan laut pelayaran internasional, pelabuhan laut bongkar muat maupun pelabuhan/dermaga rakyat yang sesuai dengan peruntukannya, namun sesuai hirarki pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan bahwa pelabuhan laut dibedakan menjadi 4 jenis yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan regional sesuai fungsi pelabuhan laut sebagai simpul jaringan, pintu gerbang kegiatan perekonomian, alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri /perdagangan, tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan dalam mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Persentase ketersediaan pelabuhan laut merupakan perbandingan dari jumlah pelabuhan laut yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pelabuhan laut.

Analisis terhadap ketersediaan pelabuhan laut Tahun 2019 dapat digambarkan jumlah pelabuhan laut yang tersedia sebanyak 29 pelabuhan dibagi dengan jumlah kebutuhan pelabuhan laut sebanyak 34 pelabuhan dengan persentase 85,29%.

Hasil analisis persentase ketersediaan pelabuhan laut dengan target sebesar 82,35% dapat tercapai sebesar 85,29 % sehingga capaian kinerja sebesar 103,57% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian sasaran meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi melalui ketersediaan pelabuhan laut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8.7
Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan
Pelabuhan Laut Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	jumlah pelabuhan laut yang	20	25	29



	tersedia			
2	jumlah kebutuhan pelabuhan laut	34	34	34
3	Persentase ketersediaan pelabuhan laut (%)	58,82	73,53	85,29

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja persentase ketersediaan pelabuhan laut dari Tahun 2017 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2017 realisasi persentase ketersediaan pelabuhan laut sebesar 58,82 %, pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,53 %, lalu pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 82,35% atau sebanyak 3 Pelabuhan laut yang selesai pengerjaannya namun realisasinya meningkat sebesar 4 pelabuhan laut atau 85,29%.

pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sudah melaksanakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebanyak 9 (Sembilan) pelabuhan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, dimana terdapat 4 (empat) pembangunan pelabuhan yang sudah dapat digunakan yaitu Pembangunan Ponton Pelabuhan Nyit Nyit Pulau Tiga yang berlokasi di Kabupaten Natuna, Pembangunan Pelabuhan Teluk Durian yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pembangunan Ponton Pelabuhan Kampung asam yang berlokasi di Kabupaten Karimun, serta Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Uban Kabupaten Bintan sehingga target tahun 2019 yaitu sebesar 82,35% untuk penambahan penyediaan pelabuhan laut tercapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan atau progres 103,57 persendari target Indikator Kinerja. Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) pembangunan/ pengembangan pelabuhan lagi adalah pengembangan pada 2 (dua) pelabuhan yaitu pengembangan pelabuhan/ pembangunan ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara, pembangunan ruang tunggu penumpang dan fasilitas parkir di Pelabuhan Sei Tenam Lingga yang pekerjaannya juga sudah selesai dilaksanakan, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) pelabuhan lagi adalah pengembangan dan peningkatan pelabuhan parit rempak, pembangunan Pelantar Rakyat Tanjung Siambang Dompok, Pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat Belakang Padang Batam, yang masih akan dilaksanakan pembangunan tahap berikutnya di tahun anggaran 2020.

Adapun jumlah pelabuhan laut pada setiap Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ialah sebagai berikut:



Tabel 8.8
Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan
Pelabuhan Laut Tahun 2018-
2019

No	Kab/ Kota	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Tanjungpinang	6	6
2	Bintan	1	2
3	Batam	4	4
4	Karimun	1	2
5	Lingga	4	4
6	Natuna	6	7
7	Anambas	3	4
Total		25	29

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pelabuhan laut meningkat dari Tahun 2018 ke 2019. Pada Tahun 2018 jumlah pelabuhan laut sebanyak 25 pelabuhan. Pada Tahun 2019 meningkat 4 pelabuhan sehingga berjumlah 29 pelabuhan.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya salah satu program kerja yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yakni Program Pembangunan Transportasi laut dan program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut yaitu meliputi pekerjaan pembangunan pelabuhan untuk mengurangi kesenjangan jarak/ meningkatkan konektivitas antar pulau, dimana Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari pulau pulau besar dan kecil, maka oleh karena itu setiap tahunnya pada Dinas Perhubungan selalu menargetkan pembangunan pelabuhan, baik pekerjaan dalam 1 tahun anggaran maupun pekerjaan bertahap. Guna mencapai salah satu tujuan dalam renstra Dinas Perhubungan yaitu meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi laut, pada tahun anggaran 2019 berdasarkan target kinerja tahun 2019 pada renstra Dinas Perhubungan membuat target pembangunan/ pengembangan pelabuhan sebanyak 2 unit, tetapi pada tahun 2019 Dinas Perhubungan dapat menyelesaikan pembangunan/ penambahan pelabuhan sebanyak 3 unit, dengan demikian capaian realisasi tujuan



meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi laut, Dinas Perhubungan telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses pelayanan air bersih ditetapkan indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman.

Evaluasi Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.9
Capaian Kinerja Meningkatnya Akses
Pelayanan Air Bersih

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman (%)	96,79%	92,47%	95,53%

Persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman merupakan perbandingan dari luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi luas wilayah. Kriteria Air bersih/ minum yang aman adalah air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.

Evaluasi terhadap pelayanan akses air bersih/ minum yang aman Tahun 2019 dapat digambarkan luas wilayah yang memperoleh akses air bersih 7584.13 km² dibagi luas wilayah 8201.72 km² dengan persentase 92.47%.

Hasil analisis persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman Tahun 2019 dengan target sebesar 96,79 %. dapat tercapai sebesar 92,47 %. sehingga capaian kinerja sebesar 95,53% atau dalam kategori **kinerja baik**.

Berikut evaluasi indikator kinerja persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman Tahun 2016-2019 :

Tabel 8.10
Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum
Yang Aman Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman (%)	72,01	89,44	92,15	92,47

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun



2019. Pada Tahun 2016 realisasi persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman sebesar 72,01% sedangkan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 89,44%. pada Tahun 2018 meningkat menjadi 92,15%. Dan pada Tahun 2019 meingkat menjadi 92,47%. Adapun pelayanan akses air bersih/minum yang aman pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.11
Evaluasi Pelayanan Akses Air Bersih/Minum Yang Aman Pada
Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri Tahun 2016 - 2019

Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Lu as wil aya h (k m ²)	Perse nta se Terlay ani air bersih (%)	Luas wila ya h yang terla ya ni (km ²)	Lua s wila ya h (km ²)	Perse nta se Terlay ani air bersih (%)	Luas wila ya h yang terla ya ni (km ²)	Lua s wila ya h (km ²)	Persent a se Terlaya ni air bersih (%)	Lua s wila ya h yan g terla ya ni (km ²)
Tanjung pina ng	144 .56	72.82 %	105. 27	144. 56	91.48 %	132. 24	144. 56	98.03%	141. 71
Bintan	131 8.2 1	59.04 %	778. 27	1318 .2 1	82.84 %	1092 .0 1	131 8.2 1	90.40%	1191 .6 6
Batam	960 .25	96.50 %	926. 64	960. 25	97.21 %	933. 46	960. 25	93.96%	902. 25
Karimun	912 .75	20.12 %	183. 65	912. 75	81.07 %	739. 97	912. 75	88.41%	806. 96
Lingga	226 6.7 7	72.09 %	1634 .1 1	2266 .7 7	81.74 %	1852 .8 6	226 6.7 7	81.66%	1851 .0 4
Natuna	200 9.0 4	55.86 %	1122 .2 5	2009 .0 4	87.19 %	1751 .6 8	200 9.0 4	96.58%	1940 .3 3
Anamba s	590 .14	67.07 %	395. 81	590. 14	62.38 %	368. 13	590. 14	61.78%	364. 59
Kepri	820 1.7 2	89.44 %	7335 .6 2	8201 .7 2	92.15 %	7557 .8 8	820 1.7 2	92.47%	7584 .1 3

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pelayanan akses air bersih/minum yang aman Tahun 2019 paling tinggi adalah di Kota Tanjungpinang yakni 98,03% dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 61,78%. Sedangkan pada Tahun 2018 pelayanan akses air bersih/minum yang aman paling



tinggi adalah sama di Kota Batam dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Kinerja pelayanan akses air bersih/ minum yang aman pada provinsi Kepulauan Riau diwujudkan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/ air minum.

Dewasa ini, listrik memegang peranan yang sangat dominan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan bangsa ini terhadap listrik sangat besar, sehingga ketidaktersediaan listrik akan menimbulkan masalah yang krusial, bahkan bisa mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian bangsa. Maka dari itu,

pemerintah harus meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk mencapai sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi dapat dilihat melalui indikator rasio elektrifikasi.

Elektrifikasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian atau penggantian dengan listrik (sebelumnya tidak digunakan listrik) atau pemasangan atau pemberian tenaga listrik (pada mesin-mesin kereta api dan sebagainya).

Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga total di suatu wilayah atau negara.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2019 :

Tabel 8.12
Capaian Kinerja Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Rasio Elektrifikasi	92,50%	92,59%	100,09

Analisis terhadap capaian rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 553.801 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 598.142 RT= 92,59%.

Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 92,50% dapat tercapai sebesar 92,59% sehingga capaian kinerja sebesar 100,09% atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.



Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Pembangkit Listrik 35.000 MW dan program melistriki daerah terluar, terpencil dan terbelakang serta merangkai pulau, dan adanya program penambahan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/ Kota Provinsi Kepri.

Berikut perkembangan rasio ketersediaan listrik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019 :

Tabel 8.13
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kep. Riau
Tahun 2016 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	464.107	523.564	523.931	553.801
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	520.631	572.581	572.581	598.142
3	Rasio Elektrifikasi	89,14%	91,44%	91,50%	92,59%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasioelektrifikasi dari Tahun 2016 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2016 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 89,14% sedangkan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 91,44%, lalu pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 91,50%. Dan pada Tahun 2019 meningkat kembali menjadi 92,59%.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2018 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

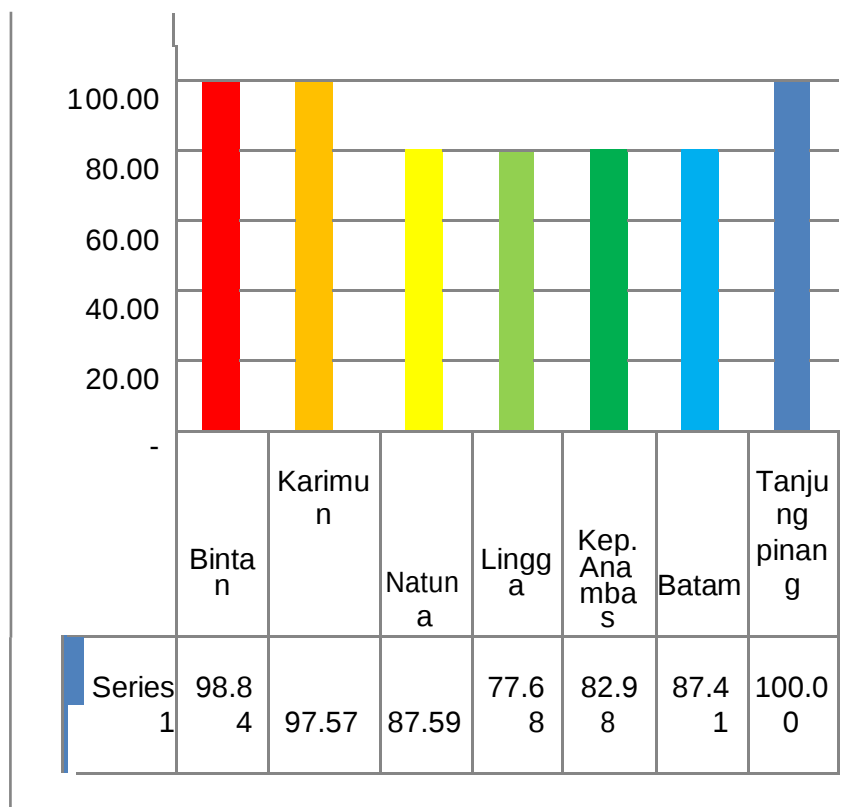
Capaian kinerja dibidang kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut.

Untuk kondisi Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8.1
Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota
dan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019



120.00



Adapun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s.d 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.14
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s.d 2019

No	Kab/Kota	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019		
		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	Rasio Elektrifikasi
1	Tg.Pinang	62.177	63.000	98,70	55.603	55.603	99,64	55.403	55.603	99,64	68.772	68.772	100,00
2	Bintan	42.021	42.915	97,92	37.823	42.003	90,05	37.884	42.003	90,19	41.841	42.330	98,84



3	Batam	262.325	300.043	87,43	329.923	361.364	91,30	329.978	361.364	91,31	336.007	369.250	87,41
4	Karimun	50.936	57.928	83,93	51.600	57.790	89,29	51.669	57.790	89,41	58.327	59.780	97,57
5	Lingga	20.778	25.295	82,14	21.135	24.098	87,70	21.181	24.098	87,90	21.183	25.820	77,68
6	Natuna	16.793	20.268	82,85	18.431	20.790	88,65	18.431	20.790	88,65	18.253	20.840	87,59
7	Anambas	9.077	11.182	81,18	9.249	10.933	84,60	9.385	10.933	85,84	9.418	11.350	82,98
Total		464.107	520.631	89,14	523.564	572.581	91,44	523.931	572.581	91,50	553.801	598.142	92,59

Sumber data : Kabupaten/Kota

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio elektrifikasi pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 paling tinggi adalah Kota Tanjungpinang dan paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan Untuk Tahun 2019 paling tinggi adalah Kota Tanjungpinang yakni 100,00% dan yang paling rendah Kabupaten Lingga yakni 82,04%.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta meningkatkan rasio desa berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

- W. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
- X. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala diatas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

- 2) Menggunakan pembangkit yang kecil – tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan Pemerintah Daerah setempat, tokoh masyarakat, alim



ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

- 3) Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan bahwa kebijakan pendidikan berdasarkan pada pilar 5 K yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian. Pilar Ketersediaan merefleksikan jaminan, bahwa layanan pendidikan harus tersedia bagi semua anak usia pendidikan, dari dasar sampai perguruan tinggi. Pilar Keterjangkauan mempunyai dua makna, yakni Keterjangkauan secara ekonomis (affordable), dan Keterjangkauan secara geografis (reacheable). Pilar Kualitas mempunyai makna perlu adanya peningkatan Kualitas/Mutu dan Relevansi layanan pendidikan. Pilar Kesetaraan memiliki arti bahwa setiap orang di negeri ini memang pantas dan layak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Terakhir pilar Kepastian merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa peserta didik dapat memilih jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan yang sesuai dengan potensi akademis, minat dan bakatnya. Dimana pemerintah pusat dan daerah, beserta masyarakat secara bersama-sama menjamin kepastian ini.

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah, sebagai penanda meningkatnya kualitas pendidikan. Angka Rata-rata Lama sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) di definisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan, cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas dengan asumsi 25 tahun adalah

proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS juga mengikuti standard Internasional yang digunakan oleh UNDP.

Tabel 8.15
Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2019	Capaian (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (%)	10,20	9.81	96,18



Di Kepulauan Riau Angka Rata-Rata Lama Sekolah ditargetkan pada tahun 2019 Kepulauan Riau sebesar 10,20 tahun dan realisasi untuk tahun 2019 belum bisa dihitung karena angka dari BPS baru bisa dikeluarkan bulan Maret 2020 dan angka terakhir tahun 2018 terealisasi sebesar 9,81 tahun. Hal ini berarti penduduk Provinsi Kepulauan Riau rata-rata berada pada jenjang Pendidikan Menengah kelas I, jika dilihat berdasarkan kategori maka indikator ini berada pada kategori “baik” dimana Persentase capaiannya sebesar 96,18%.

Berikut kondisi rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 :

Tabel 8.16
Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Angka rata-rata lama sekolah 2017	Angka rata-rata lama sekolah 2018
1	Tanjungpinang	9.97	9.98
2	Bintan	8.34	8,35
3	Batam	11.11	11.12
4	Karimun	7.80	7.81
5	Lingga	5.97	6.27
6	Natuna	8.47	8.71
7	Anambas	6.69	6.70
Provinsi		9.67	9.81

Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat angka rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota dapat dilihat angka tertinggi yaitu di kota batam angka rata-rata lama sekolah sebesar 11.11 pada tahun 2017 dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 11.12 angka ini menunjukkan pada tahun

2018 rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas sudah berada pada pendidikan SMA kelas 3 dan angka rata-rata lama sekolah yang terendah yaitu di kabupaten Lingga pada tahun 2017 masih di angka 5,97 dan naik pada tahun 2018 yaitu 6,27 angka ini menunjukkan bahwa di kabupaten lingga penduduk berusia 25 tahun ke atas pendidikannya masih di tingkat SMP/MTS kelas 1.

Adapun beberapa langkah yang terus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melalui APBD Provinsi untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:



4. Membuka PKBM, Ujian Paket, rehabilitasi dan revitalisasi serta penambahan ruang kelas baru dan menambah unit sekolah baru.
11. Menekan angka putus sekolah dengan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu.
12. Memberikan bantuan pengadaan alat transportasi Darat untuk siswa di daerah kepulauan yang terkendala masalah jarak dan transportasi.
4. Memberikan bantuan pengadaan Laptop untuk meningkatkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

SASARAN. 7

Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja ditetapkan dua indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , dengan evaluasi capaian sebagai berikut :

Tabel 8.17
Capaian Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,23	6,91	104.63

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan



4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 69.479 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.005.161 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,91%.

Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 7,23 dapat terealisasi sebesar 6,91 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 104.63% termasuk dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.18
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2019



Dalam lima tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar 0,49 poin persen, dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan sebesar 1,49 poin persen, dari tahun 2016 sampai 2018 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Lebih rinci TPT berdasarkan jenis kelamin dan tipe Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2019

DAERAH	TAHUN								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Perkotaan	8.28	5.73	5.97	7.03	6.31	8.18	7.41	7.69	7.21
Perdesaan	5.46	3.49	3.71	4.76	5.58	4.54	5.39	2.77	3.93
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91
JENIS KELAMIN									
Laki-Laki	6.61	5.30	3.64	5.60	6.10	7.54	7.14	7.98	7.78
Perempuan	10.07	5.51	9.67	8.87	6.41	7.97	7.19	5.54	5.90
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2019, diolah Pusdatinaker



Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah, TPT wilayah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin persen. Sebaliknya, TPT di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 5,39 persen pada tahun 2017, menjadi 2,77 persen pada tahun 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. TPT perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada Agustus 2019 TPT perkotaan sebesar 7,21 persen sedang di perdesaan sebesar 3,93 persen. Dibandingkan satu tahun sebelumnya, TPT di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,48 poin, sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,65 persen. TPT tertinggi Berikutnya terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 9,07 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Namun begitu, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK dan SMA masih lebih baik dibandingkan kondisi setahun yang lalu yakni Agustus 2018.

Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019:

Tabel 8.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Pada
Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun
2019

No	Kab/ Kota	Realisasi 2019		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.521	97.886	5.64
2	Bintan	3.553	44.356	8.01
3	Batam	47.207	611.484	7.72



4	Karimun	5.341	97.812	5.46
5	Lingga	1.722	42.617	4.01
6	Natuna	1.318	39.551	3.33
7	Anambas	549	18.852	2.91
Total		69.479	1.005.161	6,91

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2019 terjadi di Kota Batam sebesar 7,72% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,91%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.21
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2018-2019

No	Kab/ Kota	TPT		
		2018	2019	Perubahan 1 Tahun
1	Tanjungpinang	5,49	5.64	0,15
2	Bintan	5,89	8.01	2,12
3	Batam	8,93	7.72	-1,21
4	Karimun	2,45	5.46	3,01
5	Lingga	3,65	4,01	0,36
6	Natuna	3,52	3.33	-0,19
7	Anambas	2,46	2.91	0,45



	Total	7,12	6,91	0,21

--	--	--	--	--

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka Tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Bintan yakni 8,01 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,91 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,21 dari Tahun 2018 ke 2019.

TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2018, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2019 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 284.595 orang (30,42 persen) dan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 196.970 orang (21,05 persen). Dalam tahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) meningkat dari 315.242 orang (34,99) persen pada Agustus 2018 menjadi 315.355 orang (33,70 persen) pada Agustus 2019. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi Perguruan Tinggi) mengalami penurunan dari 170.975 orang (18,98 persen) pada Agustus 2018 menjadi 166.499 orang (17,79 persen) pada Agustus 2019.
2. Adanya Tenaga kerja yang terserap pada tahun 2019 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut
 - a. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2019 sebanyak 647.670 orang (69,22 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 288.012 orang (30,78 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dalam setahun terakhir (Agustus 2018 - Agustus 2019), penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan bertambah sebanyak 33.307 orang (1,20 persen). Keadaan ini menyebabkan jumlah persentase pekerja formal naik dari 67,14 persen pada Agustus 2018 menjadi 69,22 persen pada Agustus 2019.
 - b. Kondisi perekonomian di beberapa kabupaten/kota mulai menunjukkan trend yang positif bagi terserapnya tenaga kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2019 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,21. Adanya peningkatan jumlah buruh/karyawan menyebabkan pekerja informal berkurang sebanyak 8.075 orang, dan secara persentase pekerja informal juga berkurang dari 32,86 persen pada Agustus 2018 menjadi 30,78 persen pada Agustus 2019. Perubahan ini



terjadi pada status pekerja keluarga/tidak dibayar yang berkurang sebesar 1,25 persen poin.

Grafik 8.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi



Sumber : BPS 2019

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa bila dibandingkan dengan 10 Provinsi lain di Sumatera, maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau termasuk paling tinggi yakni 6,91%. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan TPT Nasional yakni 5,61%. Tingkat pengangguran terbuka yang paling baik di Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yakni hanya 3,39%.

SASARAN. 8 **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Persentase Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan, gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Status gizi pada masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi. Bila kondisi sosial ekonomi baik maka status gizi diharapkan semakin baik. Status gizi anak balita akan berkaitan erat dengan kondisi social ekonomi keluarga (orang tua), antara lain pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah anak orang tua, pengetahuan dan pola asuh ibu serta kondisi ekonomi orang tua secara keseluruhan.

Kelompok umur balita (bawah lima tahun) merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan tentunya memerlukan perhatian khusus. Usia di bawah lima tahun merupakan “usia emas” dalam pembentukan sumber daya manusia baik dari segi pertumbuhan fisik maupun kecerdasan, dimana hal ini harus didukung oleh status gizi yang baik karena status gizi merupakan pondasi dalam membangun SDM yang berkualitas. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami hambatan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas di masa dewasa. Kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa.

Provinsi Kepulauan Riau dengan bentuk geografis kepulauan, memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa dan berdampak positif dalam menekan angka permasalahan gizi di wilayah ini. Konsumsi ikan dan hasil laut sudah membudaya di masyarakat tempatan sehingga akses terhadap keseimbangan gizi bersumber hayati cenderung lebih mudah berbanding dengan masyarakat di daratan tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Terendah se-Indonesia untuk temuan kasus balita dengan status kekurangan gizi (*underweight*). *Underweight* adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Kekurangan gizi banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun.

Indikator *underweight* pada balita diukur dengan dengan rumus perhitunganya itu jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari dengan status gizi kurang ($BB/U -3 SD \text{ s.d. } <2 SD$) /Jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari yang dikonfirmasi status gizinya pada periode dan wilayah tertentu x 100%.

Tabel 8.22
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

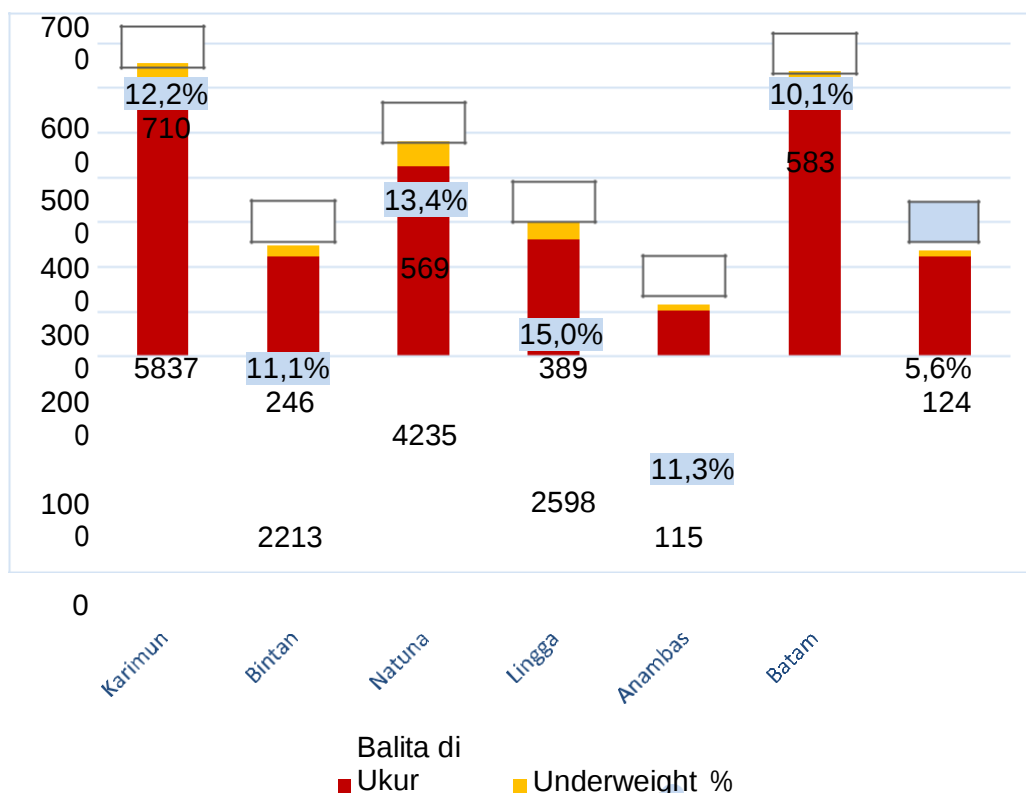
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	-----------	---------



				(%)
1.	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) pada anak balita	16.8	11,45	132

Hasil analisis Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dengan target sebesar 16.8% dapat tercapai sebesar 11,45% sehingga capaian kinerja sebesar 132% atau dalam kategori **sangat baik**.

Realisasi Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 11,45% dihitung berdasarkan hasil temuan surveilans gizi yaitu 2736 balita dengan status gizi sangat kurang dan kurang berbanding 23.899 balita yang di ukur dikali 100%. Distribusi hasil surveilans gizi (BB/U) berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dirincikan sebagai berikut :



Berdasarkan Gambar 3.12, Kabupaten Lingga merupakan Kabupaten dengan persentase balita *underweight* tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (15%), ini dikarenakan perbandingan kasus dan sasaran yang signifikan. Berbeda dengan persentase *underweight* yang terjadi di Kota Batam, walau jumlah kasus *underweight* Kota Batam tinggi (583 kasus) namun sebanding dengan jumlah sasaran balitanya dengan *underweight* sebesar

10,1%. Persentase balita *underweight* terendah berada di Kota Tanjungpinang sebesar 5,6%.

Setiap tahun terjadi penurunan kasus yang signifikan, terlihat dengan perbandingan persentase balita *underweight* Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 – 2019. Tahun 2017, persentase *underweight* sebesar 16,4%, lalu menurun di tahun 2018 menjadi 13%, dan menurun kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 11,45%. Secara tren penurunan tergambar melalui Gambar 3.13 berikut ini:

Penurunan kasus *underweight* di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kinerja dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan RS, bersama lintas sektor terkait telah menjalin komitmen untuk menanggulangi kasus permasalahan gizi yang ditemukan di masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan balita dengan status kekurangan gizi yaitu dengan melakukan monitoring pelacakan dan konfirmasi masalah gizi di Kabupaten/Kota. Hasil temuan dari pelacakan gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau secara umum disebabkan pola Asuh, penyakit penyerta dan tingkat perekonomian rendah. Dari hasil wawancara konseling riwayat Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), balita dengan kekurangan gizi tidak diberikan ASI eksklusif dan pemberian makanan yang tidak adekuat (jumlah yang dikonsumsi masih kurang dari Angka kecukupan Gizi/AKG bagi anak).

Untuk menekan jumlah kasus balita dengan kekurangan gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya sebagai berikut Pola asuh menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk pada Balita. Pola Asuh berkaitan dengan cara pemberian makanan sehari-hari. Anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika mendapatkan pola asuh yang baik yaitu :

- ☐ IMD dan ASI eksklusif selama 6 bulan
- ☐ Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai bayi usia 6 bulan
- ☐ Melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih
- ☐ Pemberian kapsul Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus
- ☐ Menimbang berat badan secara rutin di Posyandu
- ☐ Pemantauan tahap perkembangan balita melalui program Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan kelas Ibu Balita di Puskesmas



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 akan dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 8.23
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penduduk Miskin	5,83%	5,80%	100,51%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (127.758 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.202.724 orang) dengan nilai persentase 5,80%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 dengan target 5,83% dapat tercapai sebesar 5,80% sehingga capaian kinerja sebesar 100,51% atau dalam kategori kinerja **sangat baik**.

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2018-2019:

Tabel 8.24
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Persentase Penduduk Miskin	5,83% (128.460 org)	5,80% (127.758 org)



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2018 ke tahun 2019 turun 0,03%.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 8.25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target 2021
1	Persentase Penduduk Miskin	5,80%	5,53%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam sisa waktu RPJMD (2020 s.d 2021), Provinsi Kepri perlu menurunkan persentase penduduk miskin sebanyak 0,27%.

Tabel 8.26
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan
Maret 2018-Maret 2019

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2018	98.459	5,15
September 2018	104.207	5,33
Maret 2019	104.234	5,26
Perdesaan		
Maret 2018	26.903	11,26
September 2018	24.254	11,04
Maret 2019	23.524	10,67
Total		
Maret 2018	125.362	5,83
September 2018	128.462	5,90
Maret 2019	127.758	5,80

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada tahun 2019, dan terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan, pada tahun 2019.



Adapun Persentase Penduduk Miskin pada setiap kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8.27
Persentase Penduduk Miskin Per
Kabupaten/Kota
Per Maret Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	6,61	0,60	0,11	15.36	232.797
2	Bintan	6,37	0,63	0,09	10.14	159.403
3	Natuna	4,42	0,49	0,09	3.43	77.771
4	Lingga	12,88	1,97	0,46	11.56	89.781
5	Kepulauan Anambas	6,44	1,14	0,26	2.72	42.309
6	Kota Batam	4,85	0,53	0,09	66.21	1.376.009
7	Kota Tanjungpinang	9,03	1,15	0,23	19.05	211.583
	Kepulauan Riau	5,90	0,64	0,11	128.46	2.189.653

Keterangan :

P = Persentase

0 Kemiskinan

P = Indeks Kedalaman

1 Kemiskinan

P = Indeks Keparahan

2 Kemiskinan

Tabel 8.28
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau
Per Maret Tahun 2019

No	Provinsi	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)



1.	Kepulauan Riau	5,80	0,90	0,18	127.758	2.202.724
----	----------------	------	------	------	---------	-----------

Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (12,88%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna (4,42%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2019 paling besar adalah di Kota Batam (66.210 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten di Kepulauan Anambas (2.720 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (1,97%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna (0,49%). Sama halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2019, yakni paling besar adalah kabupaten Lingga (0,46%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna, Bintan dan Batam (0,09%).

Tabel 8.29
Penduduk Miskin
Se-Indonesia Semester I dan Semester II
Tahun 2019

No	Provinsi	Semester 1 (Maret)	No	Provinsi	Semester 2 (September)
1	DKI JAKARTA	3,47	1	DKI JAKARTA	3,42
2	BALI	3,79	2	BALI	3,61
3	KALIMANTAN SELATAN	4,55	3	KALIMANTAN SELATAN	4,47
4	KEP, BANGKA BELITUNG	4,62	4	KEP, BANGKA BELITUNG	4,50
5	KALIMANTAN TENGAH	4,98	5	KALIMANTAN TENGAH	4,81
6	BANTEN	5,09	6	BANTEN	4,94
7	KEP, RIAU	5,90	7	KEP, RIAU	5,80
8	KALIMANTAN TIMUR	5,94	8	KALIMANTAN TIMUR	5,91



9	SUMATERA BARAT	6,42	9	SUMATERA BARAT	6,29
10	KALIMANTAN UTARA	6,63	10	KALIMANTAN UTARA	6,49
11	MALUKU UTARA	6,77	11	MALUKU UTARA	6,91
12	JAWA BARAT	6,91	12	JAWA BARAT	6,82
13	RIAU	7,08	13	RIAU	6,90
14	KALIMANTAN BARAT	7,49	14	KALIMANTAN BARAT	7,28
15	JAMBI	7,60	15	JAMBI	7,51
16	SULAWESI UTARA	7,66	16	SULAWESI UTARA	7,51
17	SULAWESI SELATAN	8,69	17	SULAWESI SELATAN	8,56
18	SUMATERA UTARA	8,83	18	SUMATERA UTARA	8,63
19	JAWA TIMUR	10,37	19	JAWA TIMUR	10,20
20	JAWA TENGAH	10,80	20	JAWA TENGAH	10,58
21	SULAWESI BARAT	11,02	21	SULAWESI BARAT	10,95
22	SULAWESI TENGGARA	11,24	22	SULAWESI TENGGARA	11,04
23	DI YOGYAKARTA	11,70	23	DI YOGYAKARTA	11,44
24	LAMPUNG	12,62	24	LAMPUNG	12,30
25	SUMATERA SELATAN	12,71	25	SUMATERA SELATAN	12,56
26	SULAWESI TENGAH	13,48	26	SULAWESI TENGAH	13,18
27	NUSA TENGGARA BARAT	14,56	27	NUSA TENGGARA BARAT	13,88
28	BENGKULU	15,23	28	BENGKULU	14,91



29	ACEH	15,32	29	ACEH	15,01
30	GORONTALO	15,52	30	GORONTALO	15,31
31	MALUKU	17,69	31	MALUKU	17,65
32	NUSA TENGGARA TIMUR	21,09	32	NUSA TENGGARA TIMUR	20,62
33	PAPUA BARAT	22,17	33	PAPUA BARAT	21,51
34	PAPUA	27,53	34	PAPUA	26,55
	INDONESIA	9,41		INDONESIA	9,22

Sumber: <https://kepri.bps.go.id>

Berdasarkan Persentase Kemiskinan *Update* per Maret 2019, Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat terendah ke-7 se-Indonesia (5,90%), sedangkan berdasarkan *Update* Persentase Kemiskinan per September 2019, terjadi penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar (0,10%) namun Provinsi Kepulauan Riau masih tetap berada di peringkat terendah ke-7 se-Indonesia (5,80%).

SASARAN. 10

Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan



hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, tidak bisa langsung diambil dari masing masing Indeks yang merupakan data dasar yaitu :

1. Persentase Keterwakilan Perempuan di parlemen : 17,78 %
2. Persentase Tenaga Profesional Perempuan : 37,98 %
3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan : 28,37 %

Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda, untuk itu terlebih dahulu dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung indeksnya terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan IDG. Adapun komponen perhitungan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Proporsi Keterwakilan Perempuan di Parlemen
2. Proporsi Profesional Perempuan
3. Proporsi Sumbangan Pendapatan Perempuan
4. Proporsi Sumbangan Pendapatan Laki-laki
5. Proporsi Sumbangan Pendapatan Perempuan
6. Proporsi Penduduk Perempuan
7. Proporsi Pengeluaran Perkapita pertahun
8. Proporsi Penduduk laki-laki
9. Proporsi keterwakilan Laki-laki di Parlemen



10. Proporsi Tenaga Profesional Laki-laki

Hasil perhitungan komponen tersebut diatas menghasilkan tiga indeks antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par}) : 0,593
2. Indeks Pengambil keputusan (I_{DM}) : 0,949
3. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$) : 0,443

Berikut perhitungan IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

$$\begin{aligned}
 & (I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis}) \\
 IDG &= \frac{0,593 + 0,949 + 0,443}{3} \times 100 \\
 &= \frac{1,985}{3} \times 100 \\
 &= 66,18
 \end{aligned}$$

Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2019

Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 8.30
Capaian Kinerja Meningkatnya
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62	66.18	106,7

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan



serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah nilai rata-rata dari penjumlahan indeks keterwakilan perempuan di parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan.

Analisis terhadap persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018 dapat digambarkan dengan persentase nilai rata-rata Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par}) sebesar 0,593, Indeks Pengambil keputusan (I_{DM}) sebesar 0,949, dan Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$) sebesar 0,443, sehingga nilai realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 66,18 %.

Hasil analisis Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 62% dapat tercapai 66,18% sehingga capaian kinerja sebesar 106,7% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pemberdayaan gender Tahun 2016-2018:

Tabel 8.31
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2016- 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2016	2017	2018
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,60	66,96	66,18

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disetiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 65,60 %, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 66,96%, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 66,18%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih banyak dipengaruhi oleh persentase perempuan sebagai profesional sebesar 37,98%. Selain itu, peningkatan IDG juga disebabkan peningkatan komponen sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,37% dan keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 17,78%, Berikut rincian IDG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan komponen pembentuknya serta kondisi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018



Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
	(%)	(%)	(%)	
KEPULAUAN RIAU	17.78	37.98	28.37	66.18
Karimun	10.00	44.91	25.21	57.03
Bintan	16.67	49.81	24.18	63.41
Natuna	5.00	47.34	24.23	49.17
Lingga	5.00	36.47	22.73	46.08
Kepulauan Anambas	10.00	47.39	25.84	57.32
Kota Batam	6.00	34.70	28.89	53.29
Kota Tanjungpinang	24.14	39.18	26.70	68.57

Sumber : Pembangunan Berbasis Gender 2018

Dari data tersebut dapat digambarkan capaian IGD Pada tahun 2018 terbesar di Tanjungpinang dengan nilai capaian sebesar 68,57%. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai IGD secara keseluruhan satu Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IGD terendah adalah Natuna sebesar 49,17%.

Adapun capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2013-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.32
IDG Provinsi Kepri dan kabupaten Kota 2018

No	Provinsi/Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PROV Kepri	60,79	60,54	62,15	65,60	66,96	66,18
2	Karimun	51,49	54,43	55,55		54,47	57,03



3	Bintan	62,59	65,51	65,44	61,24	63.41
4	Natuna	46,40	53,86	52,85	48,55	49.17
5	Lingga	39,98	40,40	40,75	47,82	46.08
6	Kep Anambas	50,64	56,22	56,96	57,07	57.32
7	Batam	69,29	54,31	57,83	55,28	53.29
8	Tanjungpinang	57,60	70,92	70,33	70,33	68.57

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurung waktu 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2016 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 65,60, kemudian meningkat Tahun 2017 sebesar 66,96% dan menurun tidak terlalu signifikan pada Tahun 2018 sebesar 66,18%.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- (1) Memberikan Pemahaman kepada perempuan dan pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan mengadakan Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri



n Pemerintahan
Daerah
Kepulauan Riau
Tahun 2019

Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri

- (2) Meningkatkan kapasitas para organisasi perempuan tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota dengan melakukan pembinaan organisasi perempuan, Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri dan Seminar Ketahanan Keluarga Dharma Wanita Persatuan.



Pelatihan Keterampilan Tata Boga untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Perempuan di Tanjungbatu, Kabupaten Karimun

Capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, Beberapa kabupaten kota yang mensupport indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Beberapa penyebab



yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.33
Anggota Legislatif laki-laki dan perempuan
di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase Caleg
					Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Karimun	27	3	30	11,11%
2.	Bintan	20	5	25	25%
3.	Natuna	19	1	20	5%
4.	Lingga	19	1	20	5%
5.	Kep. Anambas	17	3	20	17,64%
6.	Batam	46	4	50	8,69%
7.	Tanjungpinang	19	11	30	57,89%
8.	Kepulauan Riau	40	5	45	12,5%
Total		207	33	240	16%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 8.34
Pejabat Eselon 2, 3 dan 4 di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	ESSELO N	Laki-laki	Perempua n	Jumla h	Prosentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I	1	0	1	0 %
2.	II	39	4	43	9,30 %
3.	III	132	49	181	27,07 %
4.	IV	336	205	541	37,89 %



Total	508	258	766	33,68 %

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia Prov. Kepri.

SASARAN. 11

Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan

Dalam mencapai sasaran meningkatkannya produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi "Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan".

Apabila melihat Capaian kinerja, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 8.35
Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	305.239,05	309.287,15	101,33

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan perairan Kepulauan Riau oleh perusahaan perikanan maupun kelompok nelayan pesisir dan didaratkan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Analisis terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan sentra produksi baik perikanan tangkap di laut maupun di



perairan umum dan hasil estimasi di desa sampel oleh petugas statistik bidang perikanan tangkap di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas.

Dilihat dari tabel diatas sampai akhir tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 309.287,15 ton, dengan target kinerja sebesar 305.239,05 ton diperoleh capaian kinerja sebesar 101,33 % sehingga capaian kinerja sasaran berada dalam kondisi

sangat baik.

Berikut evaluasi realisasi indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2019 :

Tabel 8.36
Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	410,690.95	304,038.71	304.975,02	309.287,15

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari Tahun 2016 ke Tahun 2017. Pada Tahun 2016 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 410,690.95 ton dan di tahun 2017 menurun menjadi 304,038.71 ton. Pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 304.975,02 ton. Sedangkan pada Tahun 2019 meningkat kembali menjadi 309.287,15 ton.

Adapun Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.37
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Kabupaten/Kota		Jumlah Produksi Tangkap (Ton)			
		2016	2017	2018	2019
1	Karimun	73.693,13	73.545,74	73.619,29	61.174,94
2	Bintan	57.402,94	51.973,74	52.025,71	56.315,00



3	Natuna	51.438,54	81.390,65	82.123,17	47.579,32
4	Lingga	33.647,00	33.643,64	33.650,37	44.137,53
6	Kep Anambas	28.788,11	28.785,23	28.790,99	28.776,88
7	Batam	148.208,41	32.801,21	32.866,81	60.663,48
8	Tanjungpinang	17.512,83	1.898,50	1.898,69	10.640,00
Jumlah/Total:		410,690.95	304,038.71	304.975,02	309.287,15

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 410.690,95 ton sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 304.038,71 ton. Untuk tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yakni 81.390,65 ton dan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yakni 1.898,50 ton. Sedangkan di Tahun 2018 jumlah produksi perikanan tangkap paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yakni 82.123,17 Ton sedangkan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yakni 1.898,69 Ton.

Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap tertinggi pada Kabupaten Karimun dengan hasil tangkap sebesar 61.174,94 Ton dan disusul oleh Kota Batam dengan hasil tangkapan sebesar 60.663,48 Ton. Sedangkan produksi terendah dihasilkan oleh Kota Tanjungpinang sebesar 10.640,00 Ton.

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2019 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, berupa bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan pesisir Kepri,
- b. Pengelolaan usaha perikanan tangkap skala kecil berupa modernisasi armada perikanan tangkap nelayan Kepri dari perahu tanpa motor menjadi perahu bermotor,
- c. Pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan berupa dukungan pembangunan Pelabuhan perikanan di Natuna dan dan operasional Pelabuhan Perikanan di Anambas serta pembangunan tambatan perahu di sentra-sentra perikanan di Provinsi Kepri,
- d. Dukungan pelayanan perizinan usaha perikanan berupa penerbitan/ fasilitasi perizinan kapal perikanan yang beroperasi di perairan Kepulauan Riau, dan
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap di 7 Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain



- a. Fasilitas pemberian izin kapal perikanan dan pencatatan kapal perikanan,
- b. Fasilitas rekomendasi mendapatkan BBM bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau,
- c. Fasilitas pemberian asuransi bagi nelayan.

SASARAN. 12

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pariwisata telah menjadi sektor prioritas dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pariwisata diharapkan menjadi penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha dan penerimaan devisa.

Selain itu pariwisata juga dapat digunakan untuk memperkenalkan identitas dan kebudayaan baik daerah maupun nasional. Untuk itu pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata.

Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu fokus dalam pembangunan sesuai dengan RPJMD Kepulauan Riau 2016 – 2021 dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pariwisata tidak bisa mewujudkan sasaran ini sendiri. Pariwisata Kepulauan Riau menjadi tanggungjawab semua elemen, baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media. Berkembangnya sektor pariwisata sangat bergantung dari sektor lainnya, pada prinsipnya pembangunan pariwisata dikerjakan lintas sektor dan lintas aktor.

Kedatangan wisatawan akan meningkatkan perekonomian, karena wisatawan dapat menimbulkan multiplier efek bagi daerah yang dikunjungi. Dampak kunjungan wisatawan akan dirasakan langsung oleh pengelola akomodasi, sektor konsumsi/ makan minum, transportasi, hiburan, dan penyedia oleh-oleh tentunya.

Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat gencar berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :



Tabel 8.38
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	2.300.000	2.864.795	124,56

Sumber : data BPS

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Wisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan data masuk melalui 4 (empat) pintu masuk yaitu; Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Evaluasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2019 dapat digambarkan jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau melalui 4 (empat) pintu masuk dengan jumlah total 2.864.795 kunjungan wisatawan mancanegara yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Hasil evaluasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 dengan target 2.300.000 kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai 2.864.795 kunjungan wisatawan mancanegara sehingga capaian kinerja sebesar 124,56 % atau dalam

kategori kinerja sangat baik.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Tabel 8.39
Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019



1. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	2.635.664	2.864.795
---	-----------	-----------

Dilihat dari tabel diatas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 sebesar 2.635.664 dan tahun 2019 sebesar 2.864.795. Data tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 8,69 % atau 229.131 Wisatawan.

Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2019 apabila diperbandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 40,59% di mana pada akhir 2015 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau mencapai 2.037.673.

Sementara itu capaian kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 jika diperbandingkan dengan capain kinerja tahun 2016, maka capaian mengalami kenaikan sebesar 49,19% di mana angka kunjungan wisatawan mancanegara pada akhir tahun 2016 mencapai 1.920.232. Capaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan

Riau pada tahun 2019 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 33,87 % di mana angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau di tahun tersebut sebesar 2.074.534.

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.40
Evaluasi Pencapaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.037.673	1.920.232	2.074.534	2.635.664	2.864.795

Sumber : data BPS

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 maka Provinsi Kepulauan Riau telah melawati target pada akhir periode RPJMD (2021), di mana pada akhir periode



RPJMD jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 2.500.000 kunjungan yang berarti telah mencapai mencapai angka 114,59 %. Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2019 disajikan seperti pada tabel di bawah :

Tabel 8.41
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan
Target akhir RPJMD

N O	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2019	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.864.795	2.500.000	114,59

Sementara itu capaian pada indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka masih jauh dari target Nasional, di mana Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 ditargetkan mencapai

3.600.000 kunjungan wisatawan mancanegara, dan hanya mencapai 79,58 % seperti tabel dibawah.

Tabel 8.42
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 dengan
Target Nasional

N O	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional 2019	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.864.795	3.600.000	79,58

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memaksimalkan sumberdaya yang ada, baik melalui sumber dayapenganggaran maupun memaksimalkan segala sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau berusaha mencapai sasaran dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata, baik Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai *leading sector*, dinas-dinas pendukung di Kepulauan Riau seperti Dinas



Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, serta seluruh asosiasi pariwisata.

Menurut analisa kami penyebab penunjang keberhasilan dari capaian sasaran strategis pada indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau sampai sejauh ini adalah kuatnya komitmen dari Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk terus melaksanakan berbagai pembangunan di sektor pariwisata, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan ekonomi kreatif. Selain itu komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat terutama dengan adanya program *hot deals* dan pengembangan *Cross Boarder Tourism* di mana Kepulauan Riau termasuk salah satu Provinsi yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah kabupaten kota Maupun pihak swasta dalam mendorong naiknya kunjungan

wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau baik melalui regulasi, promosi, maupun peningkatan kualitas event yang sangat membantu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau.

Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung kepada keberhasilan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau, diantaranya melaksanakan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui pelaksanaan kegiatan promosi di Negara utama dan Negara potensial penyumbang wisatawan mancanegara (Promosi Pariwisata di Singapura, China dan Korea), menyelenggarakan dan memfasilitasi event baik skala Nasional maupun internasional, Peningkatan Informasi Pariwisata (Teknologi Digital Marketing Pariwisata), Pendukung Pada kegiatan event daerah bertaraf nasional dan internasional, Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata, dan Pengembangan sarana promosi pariwisata.



*Gambar 3.15
"Tour de Kepri"
Merupakan
Salah satu event
unggulan di
Kepulauan Riau tahun
2019.*







Gambar 3.16
Promosi Pariwisata
Mancanegara/ NATAS
Travel
Fair Singapura 22-24
Februari 2019



Gambar 3.17
Promosi Pariwisata
Mancanegara/ MODE
TOUR
Travel Mart Seoul Korea
Selatan 5-24 September
2019



Gambar 3.18
Promosi Pariwisata
Mancanegara/ CITM
KUMMING CHINA 15-17
November 2019



Gambar 3.19
"Malam Seni Budaya"
Merupakan Rangkaian
Acara Festival Bahari
Kepri 2019



Gambar 3.20
"Parade Kapal Hias"
Merupakan Rangkaian
Pelaksanaan kegiatan
Festival Bahari Kepri 2019

Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau menurut pintu masuk Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 8.43
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
ke Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Pintu Masuk Tahun 2018 - 2019

No	Pintu Masuk	2018		2019*	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Persentase
1.	Batam	1,887,244	71,60	1,947,943	68,00
2.	Bintan	523,106	19,85	634,735	22,16
3.	Tanjungpinang	140,596	5,35	169,364	5,90
4.	Karimun	84,718	3,20	112,753	3,94
Total		2,635,664	100	2,864,795	100

Sumber: Data BPS



Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau dihitung berdasarkan empat kabupaten/kota sebagai pintu masuk yaitu: Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 paling banyak melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu sebanyak 1,947,943 orang (68%), selanjutnya Kabupaten Bintan sebanyak 634,735 orang (22,16%), Kota Tanjungpinang sebanyak 169,364 orang (5,90%) dan paling sedikit melewati Kabupaten Karimun sebanyak 112,753 orang (3,94%). Total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 2,864,795 orang. Dari seluruh kabupaten/kota pintu masuk mengalami peningkatan kunjungan; Kota Batam mengalami prosentase kenaikan 3,22%, Kabupaten Bintan mengalami kenaikan 21,34%, Kota Tanjungpinang mengalami prosentase kenaikan 20,46% dan Kabupaten Karimun mengalami prosentase kenaikan tertinggi sebesar 33,09.

Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Tahun 2018 – 2019 menurut Provinsi sebagai berikut :

Tabel 8.44
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
Menurut Provinsi Tahun 2018– 2019

NO	Pintu Masuk/ Provinsi	2018		2019	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Bali	6,057,489	38.32	6,268,999	38.92
2.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2,812,482	17.79	2,419,196	15.02
3.	Kepulaun Riau	2,635,664	16.67	2,864,795	17.79
4.	Jawa Timur	322,964	2.07	243,899	1.51
5.	Sumatera Utara	225,167	1.42	244,530	1.52



6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	181,777	1.15	113,028	0.70
7.	Jawa Barat	155,371	0.98	157,833	0.98
8.	Papua	104,075	0.66	56,287	0.35
9.	Sulawesi Utara	122,101	0.77	130,285	0.81
10.	Nusa Tenggara Timur	85,914	0.64	103,905	0.65
11.	Nusa Tenggara Barat	78,930	0.50	57,763	0.36
12.	Lainnya	3,024,257	19.23	3,446,434	21.40
TOTAL		15,806,191	100	16,106,954	100

Sumber : data BPS

Pada tahun 2019 total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 16,106,954, dimana Kepulauan Riau menyumbang 2,864,795 kunjungan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau untuk pertama kalinya ada pada peringkat II secara nasional setelah Bali dengan kontribusi sebesar 17,79% terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional, sebelumnya Kepulauan Riau selalu menempati peringkat III secara nasional. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ada diperingkat teratas untuk wilayah Sumatera.

Sementara itu komposisi wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau berdasarkan Negara asal dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
Berdasarkan Negara Asal Wisatawan Tahun 2019

	Jumlah
	
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	

No	Negara Asal	Kunjungan	Prosentase
1.	Singapura	1,390,076	48.52
2.	Malaysia	302,837	10.57
3.	Tiongkok	286,512	10.00
4.	India	150,542	5.25
5.	Philipina	67,217	2.35
6.	Korea Selatan	39,888	1.39
7.	Jepang	39,031	1.36
8.	Inggris	34,323	1.20
9.	Australia	30,236	1.06
10.	Amerika	25,958	0.91
11.	Lainnya	498,175	17.39
TOTAL		2,864,795	100

Berdasarkan komposisi asal wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau masih didominasi wisatawan asal Singapura yang menyumbang wisatawan sebesar 48,52 %, Malaysia 10,57 %, dan Tiongkok sebesar 10 %.

Realisasi Anggaran

Jumlah total anggaran pada Dinas Pariwisata tahun 2019 termasuk dana Dekonsentrasi adalah Rp. 24.047.662.460,- (*Dua Puluh Empat Miliar*



Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terbagi dalam dua sumber Anggaran yaitu APBD Rp. Rp. 22.245.978.531.460,- dan APBN Rp. 1.801.684.000,-, sedangkan realisasi keseluruhan anggaran pada akhir tahun anggaran adalah Rp. 23.456.712.338,- atau 97,54 %.

Dari jumlah anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata pada tahun 2019 total Rp 24.047.662.460,- di mana jumlah anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah diperjanjikan adalah Rp. 19.280.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.772.724.138,- atau 97,37 % sebagaimana pada table berikut :

Tabel 8.46
Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Ket
I.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
1.	Promosi Pariwisata Nusantara	894.000.000 ,-	838.173.240,-	93.76	APBD
2.	Pengadaan Direktori Pariwisata	905.000,000,-	897.339.100,-	99.15	APBD
3.	Penyelenggaraa n Festival Bahari Kepri	1,440,000,000,-	1.405.768.500,-	97.62	APBD
4.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	120.000.000,-	119.988.770,-	99.99	APBD
5.	Kampanye Wonderful Riau Island pada Event Pariwisata Daerah	2.968.965.000,-	2.910.145.800,-	98.02	APBD
6.	Peningkatan Branding Wonderful Riau Island Pada Event Internasional di Bintan dan Batam	1.176.535.000,-	1.159.064.100,-	98.52	APBD
7.	Penyelenggaraan Festival Sungai Caran g	950.000.000,-	932.367.700,-	98.14	APBD
8.	Festival Pulau Penyengat	460.000.000,-	433.736.290,-	94.29	APBD
9.	Penyelenggaraa n International Tour de Kepri	2.500.000.000,-	2.406.810.900,-	96.27	APBD



10.	Sosialisasi dan Publikasi	350.000.000,-	346.714.400,-	99.06	APBD
11.	Penyelenggaraan Festival Barongsai	876.000.000,-	874.520.578,-	99.83	APBD
12.	Mission Sales in North China 2019	150.000.000,-	196.424.100,-	98.21	APBN
13.	Partisipasi pada NATAS Travel Fair 2019	150.000.000,-	149.027.000,-	99.35	APBN
14.	Festival Dukungan Event Pulau Senoa	500.000.000,-	495.624.900,-	99.12	APBN
15.	Golf Sales Mission	200.000.000,-	138.620.900,-	92.41	APBN
II.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
1.	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung Daya Tarik	60.000.000,-	59.980.000,-	99.97	APBD
2.	Penganugerahan Kelompok	825.000.000,-	762.121.800,-	92.38	APBD
	Sadar Wisata, Desa Wisata dan Pengelola Daya Tarik Wisata				
3.	Pembinaan Pengembangan dan Satuan Karya (Saka) Pariwisata	300.000.000,-	297.292.600,-	99.10	APBD
III.	Program Pengembangan Industri Pariwisata				
1.	Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Akomodasi dan MICE	100.000.000,-	97.877.500,-	97.88	APBD
IV.	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata				



1.	Analisis Laporan a dan Evaluasi Kunjungan Wisman dan Wisnus	60.000.000,-	56.760.880,-	94.60	APBD
2.	Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata	120.000.000,-	112.731.280,-	93.94	APBD
3.	Workshop Media Sosial	80.000.000,-	72.870.000,-	91.09	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata	1.900.000.000,-	1.883.324.900,-	99.12	APBD
5.	Updating Data Kepariwisataa n Kepulauan Riau	450.000.000,-	446.133.600,-	99.14	APBD
6.	Pelaksana Pelatihan SDM Kepariwisataa n	430.000.000,-	425.671.000,-	98.99	APBN
7.	Apresiasi Kelompok Sadar Wisata	265.000.000,-	260.569.000,-	98.33	APBN
V.	Progra m Pengembangan Ekonomi Kreatif				
1.	Penyediaan Sarana Ruang Kreatif	200.000.000,-	94.490.000,-	62.99	APBD
2.	Kepri <i>Carnival</i>	320.000.000,-	319.490.100,-	99.84	APBD
3.	Worksho p Pengembangan Ekonomi Kreatif	300.000.000,-	299.734.050,-	99.91	APBD
4.	Pengadaan Souvenir Kreatif	160.000.000,-	159.924.700,-	99.95	APBD
5.	Identifikasi Produk& Pelaku Ekonomi Kreatif	120.000.000,-	119.426.450,-	99.52	APBD
	JUMLAH	19.280.500.000	18.772.724.138	97.37	

SASARAN. 13
Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi ditetapkan dua indikator kinerja yaitu jumlah nilai realisasi investasi Penanaman



Modal Asing (PMA) dan jumlah nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan evaluasi capaian sebagai berikut :

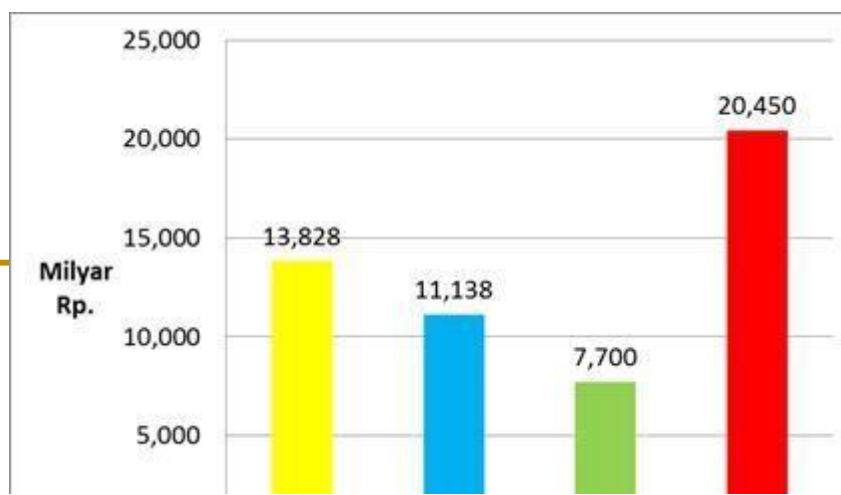
Tabel 8.47
Capaian Meningkatnya Realisasi Investasi
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	7.700	20,450	265,58
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	700	5,656	808

- **Nilai Realisasi Investasi (PMA)**

Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha Perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha Perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja atas nilai realisasi investasi (PMA) dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.700.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 20.450.475.000.000,- sehingga capaian kinerja adalah sebesar 265,58% yang termasuk dalam kategori **sangat baik**.



rintahan
Daerah
epulauan
un 2019

Grafik 3.5

Perbandingan Nilai Realisasi Investasi (PMA) Tahun 2017 - 2018 dengan Target 2019 dan Nilai Realisasi Investasi (PMA) Tahun 2019.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian target **Nilai Realisasi Investasi (PMA)** Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 20.450.475.000.000,- (Dua Puluh Triliun Empat Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) atau 265% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 7.700.000.000.000,- (Tujuh Triliun Tujuh Ratus Milyar Rupiah), Nilai realisasi investasi (PMA) Tahun 2019 ini meningkat 184% dibanding Nilai realisasi investasi (PMA) pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 11.138.727.220.000,- (Sebelas Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

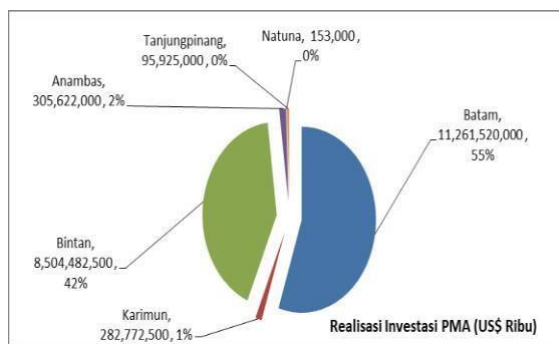
Tabel 8.48

**Evaluasi Realisasi
Investasi
Penanaman Modal Asing di Kabupaten dan
Kota
Tahun 2016 sd Tahun
2019**

No	Lokasi	Realisasi Investasi PMA (Rp)			
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Batam	5.370.626.580.200	6.515.951.000.000	7.666.390.580.000	11.261.520.000.000
2	Karimun	967.444.126.200	2.401.846.820.000	144.697.220.000	282.772.500.000
3	Bintan	477.416.660.800	4.802.823.020.000	3.268.774.560.000	8.504.482.500.000
4	Anambas	278.483.922.800	38.752.800.000	9.481.840.000	305.622.000.000
5	Tanjungpinang	4.136.957.400	48.727.760.000	88.440.000	95.925.000.000
6	Lingga	1.843.212.400	5.231.360.000	3.652.840.000	
7	Natuna	8.298.564.000	9.278.160.000	45.641.740.000	153.000.000
Total		7.108.250.023.800	13.822.619.920.000	11.138.727.220.000	20.450.475.000.000



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA) pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 Nilai Realisasi Investasi (PMA) paling tinggi adalah Kota Batam. Pada Tahun 2019 Nilai Realisasi Investasi (PMA) paling tinggi adalah Kabupaten Bintan yakni sebesar Rp 11.262.520.000.000,- dan yang paling rendah adalah Kabupaten Lingga yakni tidak memiliki nilai realisasi Investasi PMA. Kabupaten Lingga tidak memiliki nilai realisasi investasi PMA hal ini dikarenakan tidak ada perusahaan yang melaporkan secara online Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hal ini tentunya perlu pengawasan dan bimbingan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, DPMPTSP Kabupaten Lingga, sehingga pelaku usaha dapat merealisasikan investasinya. Gambar persebaran realisasi investasi (PMA) pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 3.21
Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMA)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran investasi (PMA) diwilayah Provinsi Kepulauan Riau masih belum merata, Salah satu pemicu minimnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah mengingat peta persebaran investasi belum banyak berubah masih terpusat pada pulau Batam, hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengingat dengan adanya pemerataan penyebaran investasi tentunya akan berimbas baik terhadap pembangunan di suatu wilayah.

Untuk mengetahui perkembangan Nilai Realisasi PMA berdasarkan Sektor Usaha (5 besar) dapat dilihat dari tabel berikut ini :

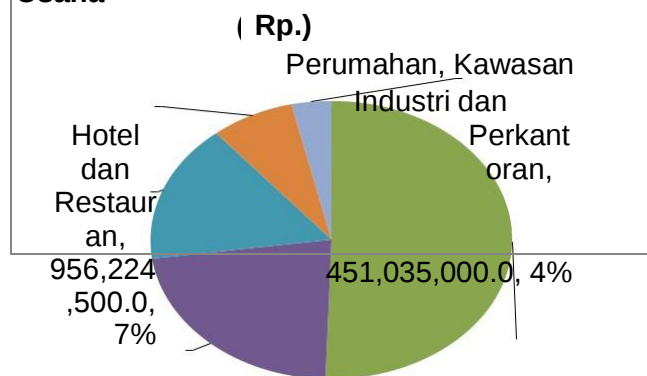
Tabel 8.49
Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA
Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi Investasi PMA (Rp)
----	--------------	---



1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	7.811.371.500.000
2	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	5.675.562.000.000
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2.064.414.000.000
4	Hotel dan Restoran	1.022.413.500.000
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	547.371.000.000

5 besar Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan sektor Usaha



Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi,
2,059,513,500.0, 16%

Industri
Mesin,
Elektronik,
Instrumen
Kedokteran,
Presisi,
Optik dan
Jam,

Industri
Logam
dasar,
Barang
Logam,
Mesin
dan
Elektronik,
6,449,70
0,000.0,
51%



2,850,66
9,000.0,
22%

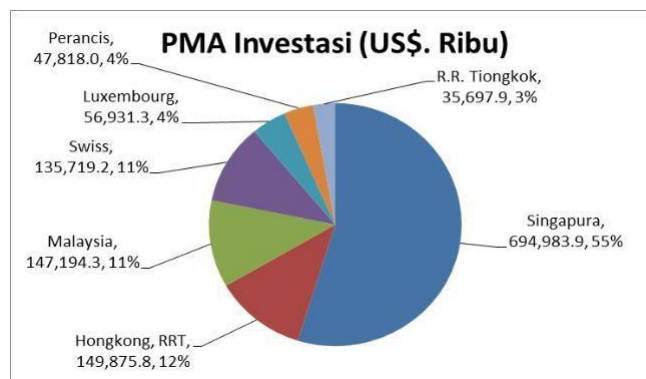
Gambar 3.22
Realisasi Investasi (PMA) Berdasarkan Sektor Usaha

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Sektor Usaha Industri Logam dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik merupakan sektor yang paling tinggi yakni sebesar Rp 7.811.371.500.000,- dan sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran merupakan sektor paling rendah yakni Rp 547.371.00.00 ,-. Realisasi investasi PMA dilihat dari asal negara dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.51
Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA
berdasarkan asal negara (5 besar)

No	Negara Asal	Nilai Investasi Investasi PMA (Rp)
1	Singapura	10.424.758.500.000
2	Hongkong	2.248.137.000.000
3	Malaysia	2.207.914.500.000
4	Swiss	2.035.788.000.000
5	Luxembourg	835.969.500.000
6	Perancis	717.270.000.000
7	R.R Tiongkok	535.468.500.000

Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA dilihat dari asal negara dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 3.23
Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara

Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan **asal Negara** (5 besar) adalah **Singapura** (US\$.Ribu) 694,983.9 sama dengan Rp



10.424.758.500.000,- atau 50,98%, Hongkong, RRT (US\$.Ribu) 149,875.8 sama dengan Rp. 2,248,137,000,000,- atau 10,99%; Malaysia (US\$.Ribu) 147,194.3 sama dengan Rp. 2,207,914,500,000,- atau 10.8%; swiss (US\$.Ribu) 135,719.2 sama dengan 2,035,788,000,000 atau 9.95%; **Luxembourg** (US\$.Ribu) 56,931.3 sama dengan Rp 853,969,500,000 atau 4,18%; **Perancis** (US\$.Ribu) 47,818.0 sama dengan Rp. 717,270,000,000 atau 3,51% dan **R.R. Tiongkok** (US\$.Ribu) 47,818.0 sama dengan Rp.717,270,000,000 atau 2,62% Beberapa hal yang membuat Realisasi Investasi Meningkat di Tahun 2019 yaitu :

- (1) Semakin banyak perusahaan yang memiliki kesadaran untuk menyampaikan LKPM secara online,
- (2) Banyak investor besar yang masuk merealisasikan investasinya
- (3) Kinerja dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
- (4) BKPM dan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

memberikan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi penyampaian LKPM kepada Pelaku usaha, dan juga karena Batam memiliki banyak fasilitas, seperti tax holiday, tax allowance, insentif sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dan juga bebas bea masuk atas impor barang tertentu.

- **Nilai Realisasi Investasi (PMDN)**

Indikator kinerja nilai realisasi investasi (PMDN) dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp 700.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 4.561.958.500.000,- sehingga capaian kinerja adalah sebesar 651% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.



Grafik 3.6



Perbandingan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2017 – 2018 dengan Target 2019 dan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.656.425.300.000,- (*Lima triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) atau 808% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.700.000.000.000,- (*Tujuh ratus miliar rupiah*) atau naik sebesar 128% dibandingkan dengan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Tahun 2018 sebesar Rp. 4.385.980.300.000,- (*Empat triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pencapaian Target dikarenakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berdasarkan LKPM yang sudah masuk. Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.52
Evaluasi Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016
s.d 2019

No	Kabupaten /Kota	Realisasi Investasi PMDN (Rp)			
		2016	2017	2018	2019
1	Kota Batam	489,455,800,000	1,091,447,700,000	3,181,498,500,000	4.876.613.800.000
2	Kota Tanjungpinang	-	79,535,100,000	45,473,800,000	160.197.100.000
3	Kabupaten Karimun	2,077,400,000	106,663,300,000	109,269,300,000	342.777.900.000
4	Kabupaten Bintan	400,000,000	47,127,600,000	1,030,980,700,000	259.803.700.000
5	Kabupaten Lingga	-	940,700,000	0	1,530.600.000
6	Kabupaten Anambas	-	-	0	4,985.000.000



7	Kabupaten Natuna	579,300,000	72,247,800,000	18,758,000,000	10,517,200,000
Jumlah		492,512,500,000	1,397,962,200,000	4.385.980.300.000	5.656.425.300.000

Realisasi Investasi P M D N berdasarkan sector usaha (5 besar) adalah Industri Kimia Dasar Barang Kimia Dasar dan Farmasi Rp 1.745.241.700.000,- Hotel dan Restaurant Rp 896.404.000.000,-. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp 731.132.000.000,- Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp 465.134.700.000,- dan Industri mesin, elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam Rp 329.380.700.000,- Adapun realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.53
Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMDN
Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi Investasi PMA (Rp juta)
1	Industri Kimia dan Farmasi	1,745,241,700,000,-
2	Hotel dan Restoran	896,404,000,000,-
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	731,132,000,000,-
4	Perdagangan dan Reparasi	465,134,700,000,-
5	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	329,380,700,000,-



Gambar 3.24
Realisasi Investasi (PMDN) berdasarkan sektor usaha

SASARAN. 14
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis didalam pembangunan di bidang ekonomi, sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan maka ditetapkanlah indikator kinerja yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 3.54
PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan
Riau
Tahun 2017-2019

No	Lapangan Usaha/Sektor Usaha PDRB	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,981,525.77	8,126,820.17	8,250,038.50
2	Pertambangan dan Penggalian	32,061,779.41	35,215,934.08	35,151,420.25
3	Industri Pengolahan	84,404,227.84	91,794,558.67	100,707,250.61



4	Pengadaan Listrik, Gas	2,689,974.52	2,653,579.54	2,772,775.51
5	Pengadaan Air	282,713.05	290,076.36	291,792.65
6	Konstruksi	41,409,192.35	46,628,248.31	52,239,254.82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,653,105.04	22,074,794.10	24,314,345.42
8	Transportasi dan Pergudangan	7,471,819.99	7,648,632.38	7,219,023.71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,061,473.37	5,628,204.51	6,259,111.36
10	Informasi dan Komunikasi	4,485,789.72	5,041,522.98	5,654,558.48
11	Jasa Keuangan	6,254,648.42	6,796,810.67	7,293,132.23
12	Real Estate	3,415,727.76	3,474,264.11	3,520,695.87
13	Jasa Perusahaan	11,341.95	12,537.77	11,454.46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,914,071.69	6,415,582.04	6,843,648.97
15	Jasa Pendidikan	3,415,199.47	3,722,017.73	3,877,006.83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,119,212.96	2,231,905.52	2,329,105.56
17	Jasa lainnya	1,075,073.68	1,320,014.81	1,345,372.25
	PDRB	227,706,877.03	249,075,503.75	268,079,987.44

Sumber Data : BPS Kepulauan Riau Tahun 2020

Capaian kinerja dari indikator kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.55
Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja sektor perdagangan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------



1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,35%	9,07%	108%
---	---	-------	-------	------

Sumber Data : BPS Kepulauan Riau Tahun 2020

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB dihitung menggunakan pendekatan produksi, yaitu PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan menjadi 17 kategori, yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;
2. Pertambangan dan Penggalan;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi ;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa Lainnya.

Unit ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kontribusi sektor perdagangan merupakan



perbandingan dari jumlah PDRB sektor perdagangan dengan jumlah PDRB dikali 100.

Analisis terhadap Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019 dapat digambarkan jumlah PDRB sektor perdagangan yakni 24.314.345,42 (dalam juta rupiah) dibagi dengan jumlah PDRB yakni 268.079.987,44 (dalam juta rupiah) dengan persentase 9,07 %.

Hasil Analisis Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target sebesar 8,35 % dapat tercapai sebesar 9,07% sehingga capaian kinerja sebesar 108% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi meningkatnya kinerja sector perdagangan dari Tahun 2018-2019:

Tabel 3.56
Meningkatnya kinerja sektor perdagangan
Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	8,79%	9,07%

Dari table diatas dapat diketahui bahwa persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mengalami kenaikan dari Tahun 2018 ke 2019. Pada tahun 2018 capaian realisasi persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 8,79% dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 9,07%. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan dengan cara :

1. Meningkatkan Fasilitas Ekspor dan Impor untuk mendukung daya saing produk daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, Standarisasi, Pengawasan, Pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen
3. Meningkatkan peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan system distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil

Peningkatan Fasilitas Ekspor dan Impor untuk mendukung daya saing produk daerah dilakukan dengan meningkatkan sarana promosi dan informasi ekspor serta peningkatan kapasitas pelaku ekspor melalui kegiatan:

- a). Desiminasi regulasi kebijakan perdagangan luar negeri,
- b). Pameran dagang dan promosi luar negeri,
- c). Pemasaran produk unggulan export didalam negeri
- d). Koordinasi antar lembaga,
- e). Partisipasi pada pameran MIHAS di Malaysia,



- f). Pameran produk prospek ekspor BIATTEX Malang, g).
- Pelatihan Pengisian SKA secara online, h). PIATTEX Pontianak Expo,
- i). Partisipasi pameran Internasional Islamic di Malaysia.

Untuk Meningkatkan peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan system distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga dilakukan dengan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang strategis, dan pengendalian harga kebutuhan pokok melalui kegiatan:

- a). Pengendalian dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok, b).
- Penyusunan dan updating profil pasar provinsi.

Sedangkan untuk Meningkatkan pemberdayaan konsumen, Standarisasi, Pengawasan, Pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen dilakukan dengan meningkatkan pengawasan barang dan jasa, dan meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen melalui kegiatan Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kegiatan Pengawasan dan Penyidikan Barang Beredar dan Jasa.

SASARAN. 15

Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan,

Perkembangan pembangunan menuntut lingkungan yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Untuk mencapai sasaran Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan dapat dilihat melalui Indikator Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan.

Evaluasi pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	% CAPAIAN
1	Propor RT si H Publik di	10,68	16,27	152,34

Kawasan Perkotaan
(%)

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang



digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

Definisi operasional Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan merupakan merupakan perbandingan dari Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan dengan Luas Wilayah.

Evaluasi terhadap Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Tahun 2019 dapat digambarkan Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan yakni 22.392,155 Ha dibagi dengan Luas Wilayah yakni 137.667 Ha dengan persentase 16,27 %.

Hasil evaluasi Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan dengan target sebesar 10,68% dapat tercapai sebesar 16,27% sehingga capaian kinerja sebesar 152,34% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Adapun Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.58
Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan se Provinsi Kepri

No	Kab/	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Luas RTH Publik di Wilayah Perkotaan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Proporsi RTH Publik (%)	Luas RTH Publik di Wilayah Perkotaan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Proporsi RTH Publik (%)	Luas RTH Publik di Wilayah Perkotaan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Proporsi RTH Publik (%)



1	TanjungP inang	1.414,4 9	15.124	9,35	1.414,4 9	15.12 4	9,35	1.414,49	15.124	9,35
---	-------------------	--------------	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	------



2	Bintan	378,62	5.070	7,47	378,62	5.070	7,47	378,62	5.070	7,47
3	Batam	19.236,05	102.957	18,69	19.321,07	102.957	18,77	19.321,07	102.957	18,77
4	un ^{rim}	955,13	5.594	17,07	955,13	5.594	17,07	955,13	5.594	17,07
5	Lingga	192,53	4.240	4,54	192,53	4.240	4,54	192,53	4.240	4,54
6	Natuna	130,31	4.509	2,89	130,31	4.509	2,89	130,31	4.509	2,89
7	Anambas	na	173	0,00	n.a	173	0,00	n.a	173	0,00
Total		22.307,13	137.667	16,20	22.392,15	137.667	16,27	22.392,15	137.667	16,27

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan pada Tahun 2017 paling banyak adalah di Kota Batam yakni 18,69% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas yakni 0,00%. Sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami perubahan realisasi yaitu paling banyak adalah di Kota Batam sebesar 18,77% dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,00%.

SASARAN. 16
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah ditetapkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas pegawai, Nilai Hasil SAKIP, dan Nilai E-Government. Capaian Kinerja dari Indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas pegawai	75	62.89	83.85



2.	Nilai Hasil SAKIP	BB	BB	100
3.	Nilai E-Government	2,3	2,2	100

- **Indeks Profesionalitas Pegawai**

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Profesional seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan alat untuk mengukur tingkat keprofesionalitas ASN.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan dibarengi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun Pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN serta sistem berbasis web, hal ini merupakan penyempurnaan dari Indeks Profesionalitas Pegawai yang telah dikeluarkan oleh BKN tahun sebelumnya.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil) diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai) dengan bobot 25%;
- b. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan) dengan bobot 40%;
- c. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja) dengan bobot 30%; dan
- d. Disiplin (diukur dari indikator penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami) dengan bobot 5%.



Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mempunyai 5 (lima) Kategori Tingkat Profesionalitas ASN ;

- a. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Peta atau potret Tingkat Profesionalitas ASN bisa bermanfaat bagi ASN sendiri karena bisa mengetahui sejauh mana ASN bisa profesional dalam bekerja; bagi Instansi Pemerintah karena dapat melihat ASN yang mempunyai tingkat profesionalitas tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah sehingga bisa dilakukan peningkatan bagi yang masih rendah dan pemberian reward bagi yang sudah mempunyai kategori tinggi profesionalitasnya; dan bermanfaat bagi masyarakat, hal ini bisa digunakan bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada pimpinan instansi pemerintah agar meningkatkan ASN yang berkategori rendah dan sangat rendah tingkat profesionalitasnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sesuai dengan amanat dari Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadikan Indeks Profesionalitas Pegawai (ASN) sebagai Indikator Kinerja Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari masing-masing Instansi dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara secara manual dan elektronik dan diteruskan ke Menteri secara manual dan elektronik dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan oleh Menteri.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau melakukan penilaian IPP pada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan indikator Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Sasaran penilaian IPP



dilakukan kepada seluruh PNS dengan jumlah 2.837 PNS dan 2.324 Guru tetapi untuk tahun 2019 masih menggunakan data sampling sebanyak 4.992 pegawai.

Formula dalam penghitungan IPP adalah Jumlah Total Hasil Perkalian: (Bobot Dimensi/Indikator) X Skor (masing-masing jawaban Dimensi/Indikator).

$$\begin{array}{|c|}
 \hline
 \begin{array}{c}
 \Sigma \\
 \\
 IP = \\
 \\
 = \\
 IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{array}
 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{|l}
 IP1 = \\
 W1j \quad * R1j \\
 IP2 = W2k * R2k \\
 IP3 = \\
 W3l \quad * R3l \\
 IP4 = \\
 W4m \quad * R4m
 \end{array}$$

Dimana :

IP = Indeks Profesionalitas ASN
 IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i
 IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi
 IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi
 IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja
 IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin
 W1_j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
 W2_k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
 W3_l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
 W4_m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Metode pengukurannya dilakukan oleh tim penilai dengan menginput data proxy dan data pendukung dimana sumber data antara lain Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN), E-PUPNS, SILAT BKPSDM, SKP Pegawai, dan data pegawai yang pernah dijatuhi hukuman.

Pengolahan data IPP dibagi ke dalam beberapa jenis identifikasi, untuk Dimensi Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal yang dicapai, meliputi Pendidikan S-3; Pendidikan S-2; Pendidikan S-1; Pendidikan D-3; Pendidikan D-2/D-1/SLTA Sederajat dan Pendidikan di bawah SLTA dengan nilai secara berurutan dari 5;4;3;2;1 dan 0.



Pada penghitungan Dimensi Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara dengan nilai jika pernah mengikuti diklat kepemimpinan 1 jika tidak pernah mengikuti mempunyai nilai 0 demikian seterusnya.

Perhitungan Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja dengan nilai perhitungan sesuai dengan nilai Gabungan Penilaian Kinerja.

Dimensi keempat yang dinilai adalah Dimensi Disiplin. Penilaian ini diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; dan Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang dan Berat) dengan penilaian 0 untuk yang Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin; R Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan; S Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang; dan B Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat.

Ketika semua data dari empat aspek tersebut telah diisi, maka tabel perhitungan akan secara otomatis memberikan data yang diperlukan untuk mengetahui nilai indeks. Adapun hasil rekapitulasi pengolahan data Indeks Profesionalitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah 65,10 yang berarti Tingkat Profesionalitas ASN (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada kategori Sedang, dengan rincian kategori :

NO	KATEGORI	BOBOT	NILAI
1	Kualifikasi	25	14.30
2	Kompetensi	40	20.55
3	Kinerja	30	25.25
4	Disiplin	5	5
TOTAL			65.10

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.60

**Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas Pegawai	75	65.10	86.80

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai.

Persentase Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) merupakan rekapitulasi terhadap indikator kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Analisis Persentase Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) Tahun 2019 dapat digambarkan dengan penjumlahan nilai kualifikasi sebesar 14,30%, kompetensi sebesar 20,55%, kinerja sebesar 25,25%, dan Disiplin 5% sehingga nilai Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) Tahun 2019 sebesar 65,10%.

Hasil Analisis Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) dengan target 75% dapat tercapai sebesar 65,10%, sehingga capaian kinerja sebesar 86,80% atau dalam **kategori kinerja baik**.

Tabel 3.61
Analisis Indeks Pegawai (IPP)
Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2017	2018	2019
1	Indeks Profesionalitas Pegawai	84,56	79	65.10

Dari data tersebut dapat digambarkan hasil rekapitulasi pengolahan data Indeks Profesionalitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019. Pada Tahun 2017 reaslisasi IPP sebesar 84,56%. Pada Tahun 2018 menjadi 79%, kemudian Tahun 2019 menjadi 65.10%.

Rendahnya nilai Indeks Profesionalitas Pegawai di Tahun 2019 dapat dilihat dari dimensi kompetensi yang paling besar pengaruhnya disusul



dimensi kualifikasi pendidikan. Kurangnya dimensi kompetensi pegawai diakibatkan kurangnya pengiriman diklat bagi setiap pegawai. Sehingga perlu adanya diklat untuk meningkatkan

kompetensi pegawai. Komponen dimensi kompetensi dalam setiap individu pegawai mencakup diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, diklat kompetensi teknis minimal 20 jam pelajaran, dan bimbingan teknis/workshop atau seminar.

Komponen dimensi kualifikasi dapat dilihat pada aspek pendidikan. pendidikan bagi individu pegawai dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dengan mengambil jenjang setingkat di atasnya. Peningkatan jenjang ini dapat dilakukan melalui Tugas Belajar.

- **Nilai Hasil Evaluasi SAKIP**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk Mewujudkan harapan dari reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memasukkan “akuntabilitas” menjadi sasaran strategis pada RPJMD 2016-2021 yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Hasil Evaluasi SAKIP”.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor B/173/M.AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai SAKIP “BB”. Realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2019, sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100%.

Tabel 3.62
Perbandingan Nilai SAKIP Provinsi Kepri Tahun 2019
Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi s.d 2019	Capaian s.d 2019
-------------------	--------------	--------------------	------------------



Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	100%

Tabel 3.63
Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP
Tahun 2018 – 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (72,48)	BB (75,28)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2018 realisasi Nilai Evaluasi SAKIP mendapat nilai BB (72,48) sedangkan pada Tahun 2019 meningkat menjadi nilai BB (75,28).

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-SAKIP Provinsi Kepri 2019 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Berdasarkan target pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan kategori “BB”, hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah mencapai target yakni 100%.

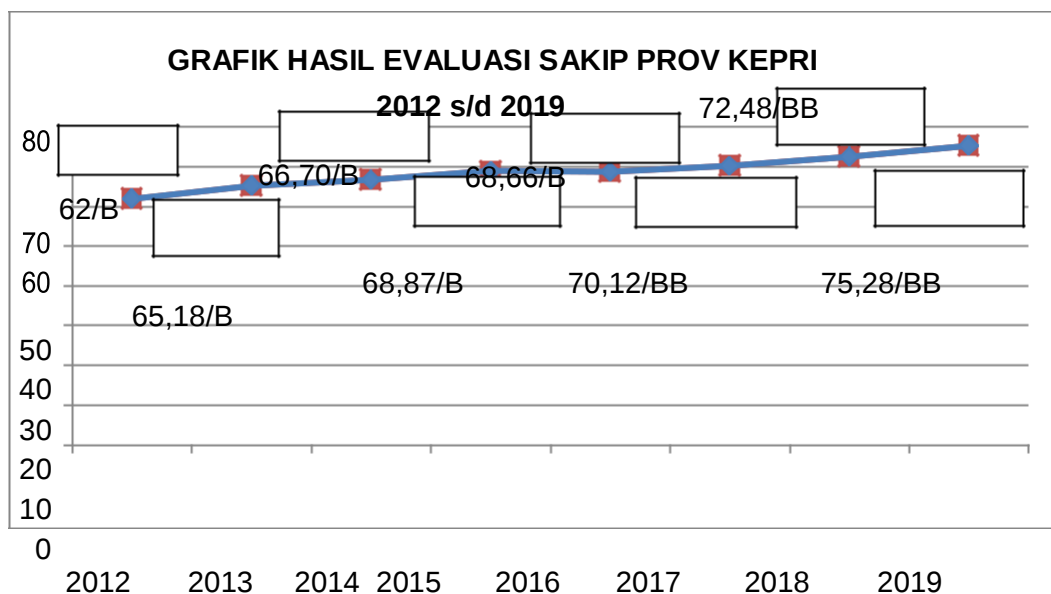
Tabel 3.64
Tabel Hasil Penilaian Komponen SAKIP
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dan 2019

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	23,97	24,47
2	Pengukuran Kinerja	25	18,88	18,88
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59	12,01
4	Evaluasi Internal	10	6,39	6,95
5	Capaian Kinerja	20	11,65	12,97



Nilai Hasil Evaluasi	100	72,48	75,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Berdasarkan table diatas menunjukkan komponen SAKIP yang dinilai mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Sehingga capaian kinerjanya sudah berhasil yakni **“baik”** Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau sudah mengalami peningkatan sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan sistem manajemen kinerja



Grafik 3.7
Hasil evaluasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012 s/d 2019

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2017 dan tahun 2018 hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang artinya adanya kenaikan nilai yakni tahun 2017 dengan nilai 70,12/BB dan tahun 2018 dengan nilai 72,48/BB, masing-masing mengalami kenaikan 7,35% dan 3,86%.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bahwa implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 14 atau 45,16% dari 31 Perangkat Daerah yang dievaluasi sudah mendapat kategori “BB” dan sebanyak 2 atau 6,45% OPD yang mendapat kategori A yakni Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja OPD dalam menerapkan manajemen kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2018 Keberhasilan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan hal- hal sebagai berikut :



1. Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2018, meskipun belum semuanya dapat dituntaskan sampai saat ini;
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen jajaran pimpinan daerah termasuk para Kepala Perangkat Daerah dalam memperbaiki indikator kinerja utama, baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran yang jelas terkait hasil-hasil (outcome) yang ingin diwujudkan;
3. Perencanaan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dikembangkan secara terpadu, mulai dari level

Pemerintah Daerah sampai pada level Perangkat Daerah. Hal itu tercermin dengan telah dijabarkannya (cascading) sasaran strategis dan indikator kinerja level Pemerintah Provinsi sampai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah bahkan sampai struktur terbawah;

4. Perencanaan Kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang dapat membantu memantau perkembangan capaian kinerja baik pada level Provinsi maupun Perangkat Daerah secara berkelanjutan. Aplikasi ini juga mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan guna meningkatkan kualitas laporan kinerja;
5. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil evaluasi internal menggambarkan kondisi penerapan AKIP di Perangkat Daerah, namun hal tersebut masih perlu di tingkatkan, khususnya pada pemahaman evaluator terhadap AKIP;
6. Evaluasi atas eefektifitas dan efisiensi program juga sudah mulai dilakukan oleh Bappelitbang, namun evaluasi tersebut belum sepenuhnya menilai sejauhmana program dan kegiatan dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMD.



- Nilai e-Government

Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diukur dari indikator kinerja nilai e-government dengan menggunakan 2 instrumen yaitu instrumen Pegi dan instrumen SPBE. Pada Tahun 2018 nilai e-government didapat dari hasil penilaian dengan menggunakan instrumen SPBE. Pada tahun 2019 penilaian terhadap e-government menggunakan 2 instrumen yaitu instrumen SPBE dan Pegi. Namun sampai saat ini nilai e-government dengan instrumen SPBE belum tersedia, sedangkan nilai e-government dengan instrumen Pegi sudah tersedia.

Pegi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan e-government. Dalam instrumen penilaian Pegi, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Tabel Skala Penilaian e-government

Skala Penilaian e-government	Kategori
$3,50 \leq 4,00$	Sangat Baik
$2,50 \leq 3,50$	Baik
$1,50 \leq 2,50$	Kurang
$1,00 \leq 1,50$	Sangat Kurang

Tabel 3.65
Hasil Penilaian e-government Tahun 2019

Tahun	Dimensi					Nilai rata	Kategori
	Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan		
2019	2.40	2.67	2.60	2.53	1.87	2.41	Kurang

Evaluasi terhadap nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau adalah total penjumlahan nilai masing-masing dimensi kemudian dibagi Dari



hasil perhitungan tersebut didapat nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 2,4.

Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Nilai e-government Provinsi Kepri
Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai e-government Provinsi Kepri	2,3	2,4	104,35%

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa nilai e-government Provinsi Kepri dengan target sebesar 2,3 dapat terealisasi sebesar 2,4 sehingga capaian kinerja sebesar 104,35% atau dapat dikatakan dalam kategori kinerja **sangat baik**.

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2019 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.67
Perbandingan Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2019
Terhadap Target RPJMD

NO	Indikator kinerja	Target	Realisasi	
1	Nilai e-government provinsi kepri	2,3	2,4	104,35%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja nilai e-government realisasi kinerja dibandingkan dengan target RPJMD adalah 104,35%.

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2019 terhadap target Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.68
Perbandingan Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2019
terhadap Target Nasional

N O	Indikator kinerja	Target Nasional	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Nilai e-government	3,4	2,4	70,58%



	provinsi kepri			
--	----------------	--	--	--

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepri realisasi dibandingkan dengan target nasional adalah 70,58%.

Pencapaian kinerja e-government Provinsi Kepri mengalami peningkatan sebesar 104,35% dikarenakan :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki beberapa kebijakan terkait implementasi e-government. Namun perlu dikembangkan kelengkapan regulasi dalam bentuk peraturan daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola TIK di Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai tugas dan fungsinya dan telah dibentuknya komite TIK.
3. Infrastruktur dan tata kelola pendukung pelaksanaan e-government sudah demikian baik yaitu :
 - a. Tersedia dan beroperasinya ruangan server beserta sarana pendukung
 - b. Tersedia dan beroperasinya jaringan data menghubungkan seluruh OPD yang disertai dengan alat monitoring
 - c. Tersedia dan beroperasinya portal internet pemerintahan.
4. Aplikasi utama sudah tersedia dan dapat dioperasikan dengan baik.

REALISASI ANGGARAN

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 16 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripadarealisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.





NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu (%)	32,33	14,32	44,29	Rp 550.000.000	Rp. 533.781.149	97,05 %	Efisien
2	Meningkatkan Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase jalan provinsi ber kondisi baik (%)	71,49	73,64	102,97	Rp 322.022.073.744,68,-	Rp 304.464.321.606,45,-	94,50	Efisien
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut (%)	82,35	85,29	103,57	Rp 11,182,189,000.00	Rp 10,545,879,897.99	94,31 %	Efisien
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman (%)	96,79 %	92,47 %	95,53	Rp 1.878.997.000,-	Rp 1.683.751.275	89,60	Efisien
5	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi (%)	92,50 %	92,59 %	100,09	Rp 6.935.000.000,-	Rp 4.100.35.4611,-	59,1	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah	10,20	9.81	96,18	Rp. 360.029.790.908,02	Rp.337.171.154.999	93.65	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas dan	Tingkat Pengangguran	7,23	6,91	104.63	Rp 5.912.538.553,-	Rp 5.667.343.791,-	95,85	Efisien



	Profesionalisme Tenaga Kerja	Terbuka (TPT)							
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (Under weight) Pada Anak Balita	16.8	11,86	129	Rp 642.435.000,-	Rp 593,342,310,-	92,35	Efisien
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,83%	5,80 %	100,51	Rp 6.633.231.000,-	Rp 6.488.540.958,-	97,82	Efisien
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62	66,18	106,7	Rp. 1,957,000,000.00	Rp. 1,820,895,097.00	93,05	Efisien
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	305.239,05	309.287,15	101,23	Rp 12.500.115.000,-	Rp 11.872.284.833,17	94,98	Efisien

12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta)	2.300.000	2.864.795	124,56	Rp 19.280.500.000,-	Rp 18.772.724.138,-	97,37	Efisien
13	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Nilai Realisasi Investasi Penanaman modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	7.700	20.450	265,58	Rp 867.884.200,-	Rp 268.949.626,-	72,47	Efisien



			Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanam an Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	700	5.656	808				
14	Meningkatnya Perdagangan	Kinerja Sektor	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,35	9,07	108	Rp. 4,492,365, 120.00	Rp. 4,313,040, 265.00	96. 00	Efisien
15	Berkurangnya Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan	Kerusakan Meningkatnya Luasan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,68	16,27	152, 34				
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah		Indeks Profesionalitas Pegawai	75	65.10	86.8 0	Rp. 8,957,490, 720.00	Rp. 7,207,406, 502.00	80. 46	Efisien
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	100	Rp. 659.736.80 0,-	Rp. 506.434.25 0,-	76, 76	Efisien
			Nilai e- Government	2,3	2,4	104, 35	Rp. 9,281,640, 000	Rp. 9,044,998, 271	97. 45	Efisien



BAB IX

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ini dibuat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Namun demikian, disamping berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya pada tahun 2019 tentunya disadari masih banyak pula kekurangan dan permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan yang sekaligus akan menjadi prioritas utama yang harus diatasi ditahun yang akan datang demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi dari berbagai elemen yang meliputi; Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan, dengan harapan keberhasilan yang telah diperoleh dapat terus ditingkatkan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufiq dan Hidayahnya kepada kita semua, didalam menjalankan dan mengemban tugas serta amanah dalam pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAKO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. ZULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/ d)
NIP. 19660611 198602 1 004

